

LAPORAN KINERJA SEMESTER 1 TA 2026

**BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Semester 1 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang ini merupakan Amanat Peraturan Presiden No 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 Semester 1 Balai Kekarantinaan kesehatan Kelas I Palembang ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas.

29 Juli 2026

Kepala,

Balai Kekarantinaan Kesehatan

Kelas I Palembang,



EMMILYA ROSA, SKM, MKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Tugas Pokok dan Fungsi	11
C. Struktur Organisasi	12
D. Sumber Daya Manusia.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan Kinerja.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	71
BAB IV PENUTUP	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. TINDAK LANJUT	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Jabatan Fungsional BKK Palembang Pada Tahun 2026	14
Tabel 2. Jenis Jabatan Pelaksana BKK Palembang Tahun 2026	15
Tabel 3. Jenis Tenaga PPPK BKK Palembang Tahun 2026	15
Tabel 4. CPNS BKK Palembang Tahun 2026.....	16
Tabel 5. Perjanjian Kerja BKK Kelas I Palembang Tahun 2026	21
Tabel 6. Target Kinerja dan Realisasi BKK Palembang Tahun 2026 Semester 1	23
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	28
Tabel 8. Realisasi Anggaran Per Satker Tahun 2026 Semester 1	72
Tabel 9. Realisasi Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026 Semester 1	73
Tabel 10. Realisasi Per RO	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Kelompok Umur.....	16
Grafik 2. Jumlah Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Grafik 3. Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2026	17
Grafik 4. Jumlah Pegawai PNS BKK Palembang Berdasarkan Golongan	18
Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Pada Indikator 1.....	26
Grafik 6. Perbandingan Capaian Pada Indikator 1 Tahun 2023 s.d Tahun 2026 Semester I.	27
Grafik 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RAK)	27
Grafik 8. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pada Indikator 1 BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin	29
Grafik 9. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 2 pada Tahun 2026 Semester 1	33
Grafik 10. Perbandingan Capaian pada Indikator 2 pada 2023 s.d Tahun 2026 Semester 1	33
Grafik 11. Perbandingan Capaian pada Indikator 2 pada Tahun Tahun 2026 Semester 1 dengan target jangka menengah (RAK).....	34
Grafik 12. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 1 tahun Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1 ...	36
Grafik 13. Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator 3 BKK Palembang Tahun 2026 semester 1	40
Grafik 14. Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator 3 BKK Palembang Tahun 2026 semester 1	41
Grafik 15. Perbandingan Capaian Indikator 3 tahun Tahun 2026 semester 1 dengan target RAK.....	41
Grafik 16. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 3 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1 ...	44
Grafik 17. Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator 4 BKK Palembang Tahun 2026 semester 1	48
Grafik 18. Perbandingan Capaian pada Indikator 4 pada Tahun 2023 sd Tahun 2026 semester 1	48
Grafik 19. Perbandingan Capaian pada Indikator 4 pada Tahun 2026 semester 1 dengan target jangka menengah (RAK)	49
Grafik 20. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 4 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1 ...	51

Grafik 21. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 5 Tahun 2026 Semester 1	54
Grafik 22. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 5 pada Tahun 2023 sd Tahun 2026 semester 1	54
Grafik 23. Perbandingan Capaian pada Indikator 5 pada Tahun 2026 semester 1 dengan target jangka menengah (RAK)	55
Grafik 24. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 5 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1 ...	56
Grafik 25. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 6 Tahun 2025 semester 1	60
Grafik 26. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 5 pada Tahun 2023 sd Tahun 2026 semester 1	60
Grafik 27. Perbandingan Capaian pada Indikator 6 dengan target jangka menengah (RAK)	61
Grafik 28. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 6 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1 ...	63
Grafik 29. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 7 Tahun 2026 Semester I.....	68
Grafik 30. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 7 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1 ...	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2026	13
Gambar 2. Cascading Perencanaan Kinerja BKK Kelas I Palembang	21

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2026 Semester 1 ini sebagai salah satu cara untuk melakukan evaluasi secara objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dalam rangka mewujudkan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Penyusunan LAKIP Tahun 2026 Semester 1 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan dan RB Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian kinerja dari setiap keuangan negara yang digunakan. Garis besar Laporan Kinerja ini memuat informasi terkait rencana kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan capaian realisasi kinerja serta realisasi anggaran pada tahun 2026 Semester 1.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2026 Semester 1 menunjukkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang beberapa indikator telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dengan mengukur realisasi target indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026. Ada perbedaan indikator kinerja tahun 2025 dengan tahun 2026. Salah satu kunci keberhasilan peningkatan capaian kinerja ini adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan anggaran kegiatan. Nilai total pagu anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang pada Tahun 2026 sebesar Rp 17.424.804.000,-

Realisasi anggaran Tahun 2026 bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp 8.419.195.727 atau mencapai 45,92% dari total pagu anggaran. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar 50,01%, realisasi Belanja Barang sebesar 35,24%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 0%.

Dari 7 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dengan Direktur Jenderal P2 Kementerian Kesehatan RI, secara keseluruhan semua indikator telah mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase penyakit di pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah dengan realisasi capaian 100% dari target 76% yang ditetapkan sehingga persentase capaian 131,57%.
- b. Nilai SAKIP dengan realisasi capaian 89,75 dari target sebesar 83 yang ditetapkan sehingga persentase capaian 108,13%
- c. Nilai kinerja anggaran dengan realisasi capaian 63,28% dari target yang ditetapkan sebesar 30% sehingga persentase capaian 210,93%
- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan realisasi capaian 100 % dari 95 target yang ditetapkan sehingga persentase capaian 105,26%
- e. Persentase Realisasi Anggaran dengan realisasi capaian 45,92 dari target 45% yang ditetapkan sehingga persentase capaian 102,11%
- f. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2 x 24 Jam dengan realisasi capaian 100 dari 95% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian 105,26%
- g. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance dengan realisasi capaian 0 dari target yang ditetapkan sebesar 0 sehingga persentase capaian sebesar 100%

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Tahun 2026, secara umum seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan pada periode berikutnya, terutama terkait nilai kinerja anggaran dan persentase realisasi anggaran. Oleh karena itu, beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan secara berkelanjutan agar mampu mendukung pencapaian indikator kinerja secara optimal.
2. Memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian sasaran strategis organisasi.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap seluruh indikator kinerja, sehingga setiap kendala dapat diidentifikasi sejak dini dan segera dilakukan langkah perbaikan untuk memastikan target kinerja tetap tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2025-2029, maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 Sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan fondasi yang kuat menuju visi "Indonesia Emas 2045". Pada periode ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi sistem pendidikan, penurunan angka stunting, serta perluasan akses layanan kesehatan yang merata dan

berkualitas. Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Palembang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya International Health Regulation (IHR) revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang kemudian berubah nomenklatur menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2026. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan misi mencapai visi atau tujuan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang pada awal tahun 2026 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Adapun fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai berikut :

- Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- Pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

C. Struktur Organisasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 8 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasi yang terdiri dari:

- Kepala;
- Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2022

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKK dapat dibentuk Wilker BKK yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Wilker BKK merupakan unit pelayanan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKK. Wilker BKK dipimpin oleh koordinator yang dibantu tugasnya oleh pejabat fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas dibentuk tim kerja yang dipimpin oleh ketua tim kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala BKK masing-masing.

D. Sumber Daya Manusia

Pegawai BKK Kelas I Palembang Tahun 2026 sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrator, 82 (delapan puluh dua) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 3 (tiga) orang Jabatan Pelaksana (JP), 3 (tiga) orang tenaga PPPK, 5 (lima) orang CPNS. Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah:

- Kepala Kantor : Emmilya Rosa, SKM, MKM

Tabel 1. Jenis Jabatan Fungsional BKK Palembang Pada Tahun 2026

NO	JENIS FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Dokter Ahli Madya (JF)	3
2	Dokter Ahli Muda (JF)	7
3	Dokter Ahli Pertama (JF)	1
4	Perawat Ahli Madya (JF)	1
5	Perawat Ahli Pertama (JF)	1
6	Perawat Mahir (JF)	4
7	Perawat Penyelia (JF)	4
8	Perawat Terampil (JF)	1
9	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	3
10	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	11
11	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	2
12	Epidemiolog Kesehatan Penyelia (JF)	1
13	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JF)	1
14	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	1
15	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	3
16	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	3
17	Entomolog Kesehatan Terampil (JF)	1
18	Sanitarian Ahli Madya (JF)	1
19	Sanitarian Ahli Muda (JF)	2
20	Sanitarian Ahli Pertama (JF)	4
21	Sanitarian Terampil (JF)	2
22	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1
23	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JF)	2
24	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JF)	1
25	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JF)	3

NO	JENIS FUNGSIONAL	JUMLAH
26	Administrator Kesehatan Ahli Muda (JF)	1
27	Analisis Anggaran Ahli Pertama (JF)	1
28	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	2
29	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (JF)	1
30	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JF)	1
31	Arsiparis Ahli Pertama (JF)	1
32	Perencana Ahli Pertama (JF)	2
33	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JF)	1
34	Asisten Apoteker Penyelia (JF)	1
35	Asisten Apoteker Mahir (JF)	1
36	Asisten Apoteker Terampil (JF)	1
37	Pranata Komputer Ahli Muda (JF)	1
38	Pranata Komputer Ahli Pertama (JF)	1
39	Pranata Humas Ahli Pertama (JF)	1
40	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	2
Jumlah		82

Tabel 2. Jenis Jabatan Pelaksana BKK Palembang Tahun 2026

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Pengelola Layanan Operasional (JP)	2
2	Operator Layanan Operasional (JP)	1
Jumlah		3

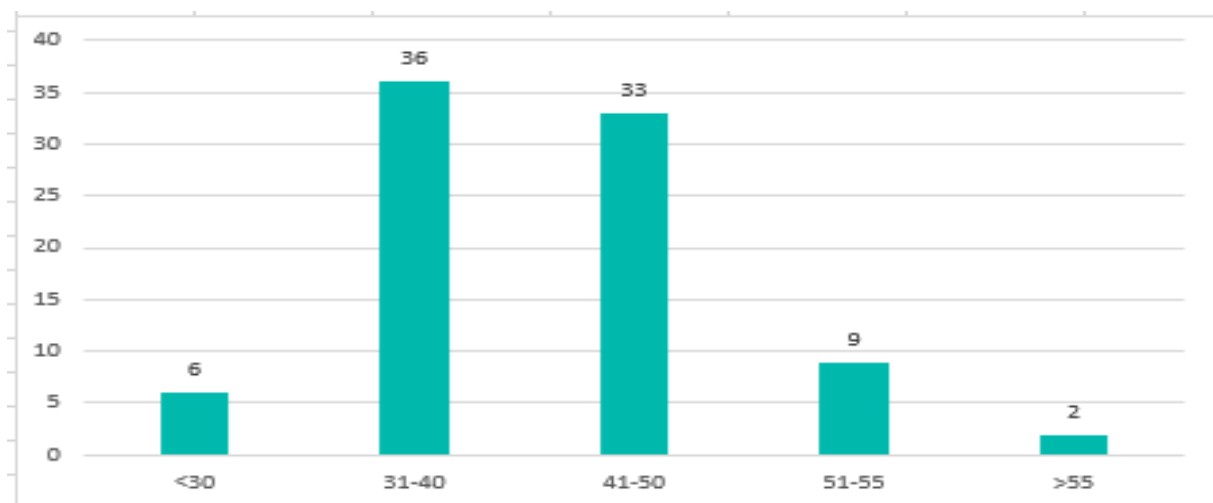
Tabel 3. Jenis Tenaga PPPK BKK Palembang Tahun 2026

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Perawat Terampil (JF)	1
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JF)	1
3	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JF)	1
Jumlah		3

Tabel 4. CPNS BKK Palembang Tahun 2026

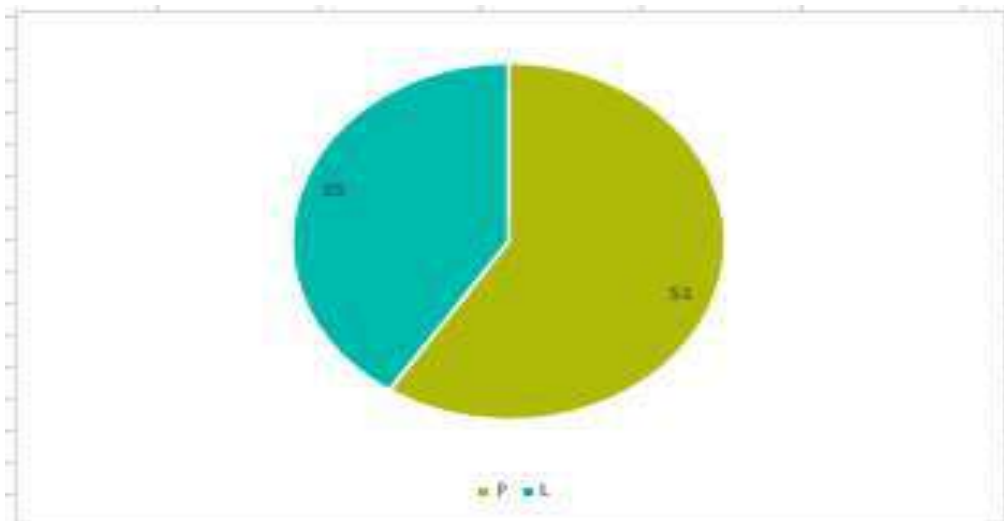
No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Dokter Ahli Pertama (JF)	1
2	Pranata Komputer Ahli Pertama (JF)	1
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (JF)	1
4	Perencana Ahli Pertama (JF)	1
5	Sanitarian Terampil (JF)	1
Jumlah		5

Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2026 berdasarkan kelompok umur pada dapat dilihat pada grafik berikut, bahwa kelompok umur terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang atau sebesar 41,86%.



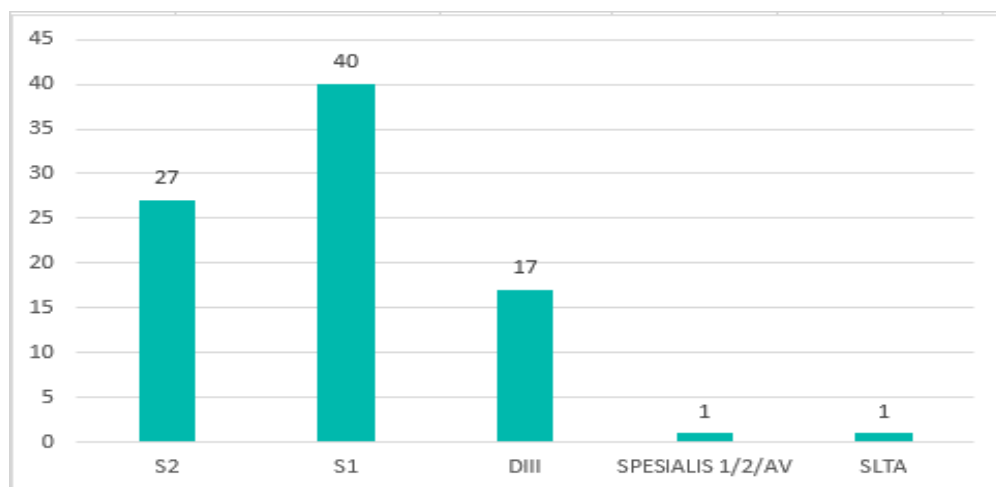
Grafik 1. Jumlah Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai wanita sejumlah 51 (lima puluh satu) orang atau sebesar 59,30%, sedangkan pegawai laki laki sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang atau sebesar 40,69%.



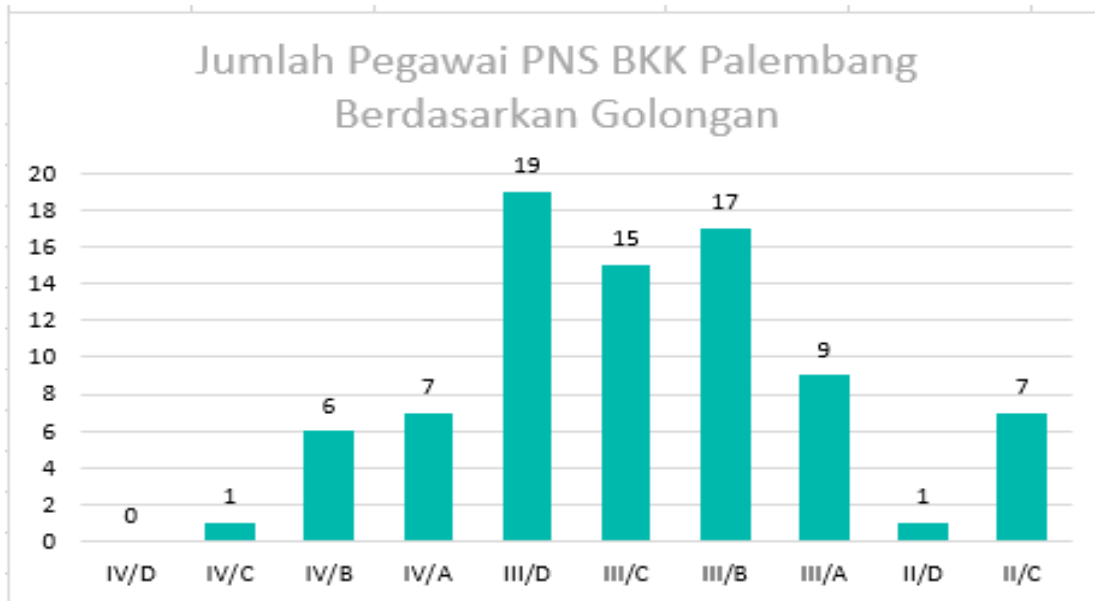
Grafik 2. Jumlah Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan pendidikan pada Grafik 1.4 dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai berpendidikan S1 sejumlah 40 (empat puluh) orang atau sebesar 46,51%, tingkat pendidikan pegawai dengan pendidikan Diploma III sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau sebesar 19,76% sedangkan pendidikan Pasca Sarjana berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Orang atau sebesar 31,39%.



Grafik 3. Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2026

Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai Golongan III sejumlah 60 (enam puluh) orang atau sebesar 69,76%.



Grafik 4. Jumlah Pegawai PNS BKK Palembang Berdasarkan Golongan

E. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang pada Tahun 2026 Semester 1

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi. Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Kinerja. Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV. Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah tindak lanjut dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

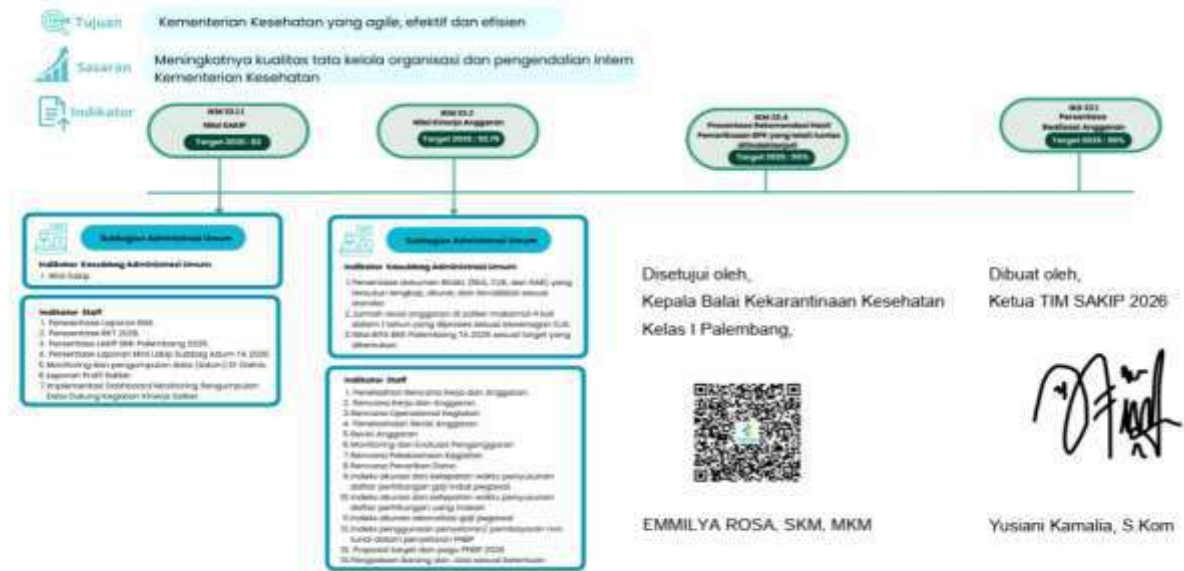
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja terdiri atas 3 (tiga) instrumen, yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perencanaan tahunan Ditjen P2 tahun 2026 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen P2 Tahun 2025-2029, sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2026 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAP Program Pengendalian Penyakit Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang mengacu pada RAP Program Pengendalian Penyakit Tahun 2025-2029 dengan indikator:

1. Persentase faktor risiko penyakit di Pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
2. Nilai SAKIP.
3. Nilai kinerja anggaran.
4. Persentase Rekomendasi Hasil BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti.
5. Persentase Realisasi Anggaran.
6. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam.
7. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance.

Perencanaan kinerja Satker termasuk dalam proses cascading, yaitu penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja secara vertikal, dari level yang lebih tinggi (Eselon I dan K/L) ke level yang lebih rendah (Satker).

Cascading memastikan bahwa seluruh unit kerja dalam organisasi berkontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih besar. Ini juga membantu menciptakan akuntabilitas,



Gambar 2. Cascading Perencanaan Kinerja BKK Kelas I Palembang

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja Kepala BKK Kelas 1 Palembang kepada Direktur Jenderal P2 Kementerian Kesehatan RI untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran BKK Kelas 1 Palembang pada tahun 2026. Perjanjian tahunannya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2026. Perjanjian Kinerja telah disusun, di dokumentasikan, dan ditetapkan oleh Kepala BKK Kelas I Palembang pada Januari 2026 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun Anggaran 2026. Target – Target Indikator Kinerja yang ingin dicapai BKK Kelas 1 Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kerja BKK Kelas I Palembang Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76 Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai SAKIP	83 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran	92.75 Nilai
		Persentase Rekomendasi Hasil BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen
		Penerbitan dokumen Layanan kekarantinaaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95 Persen
		Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0 Penyalahgunaan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Semester 1 Tahun 2026 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian masing-masing indikator. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja. Dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang. Realisasi masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Target Kinerja dan Realisasi BKK Palembang Tahun 2026 Semester 1

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	100%	131,57%
2	Nilai SAKIP	83	89,75	108,13%
3	Nilai Kinerja Anggaran	30	63,28	210,93%
4	Persentase Rekomendasi Hasil BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
5	Persentase Realisasi Anggaran	45%	45,92%	102,11%
6	Penerbitan dokumen Layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat	95%	100%	105,26%

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	angkutan dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam			
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0	0	0

Pengendalian dan pengukuran diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja dan penyebab tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Hasil analisis akan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki perencanaan strategis, operasional, dan penganggaran, serta pengendalian dan pengukuran kinerja BKK Kelas I Palembang. Analisis pencapaian realisasi kinerja dilakukan pada setiap Indikator Kinerja Kerja (IKK) sebagai berikut:

IKK. 24.2.1. Persentase penyakit dipintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah

Kinerja Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah. Jumlah pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah

Deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN dihitung dari 4 parameter pintu masuk di Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang terdiri dari wilayah kerja Bandar Udara SMB II, Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Khusus Sungai Lumpur, Pelabuhan Tanjung Api-api dan untuk Bandar Udara Silampari mengikuti induk yaitu ke wilayah Pelabuhan Boom Baru. Adapun pemeriksaan yang dilakukan yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar, dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang diskriminasi TB serta skrining Covid-19. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara. Pelaksanaan pemeriksaan Lingkungan meliputi sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPP memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat Kesehatan dan Survei Vektor yang direkap melalui laporan bulanan wilker dan pos setiap bulan. Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantina.

a) Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
4. Permenkes 8 Tahun 2026.
5. International Health Regulation (IHR) 2005.

b) Pengertian

Persentase jumlah pintu masuk (bandara, pelabuhan, atau pos lintas batas) yang telah melaksanakan kegiatan deteksi terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah, dibandingkan dengan seluruh pintu masuk yang menjadi tanggung jawab unit kerja, sesuai standar yang telah ditetapkan.

c) Definisi Operasional

Jumlah pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah.

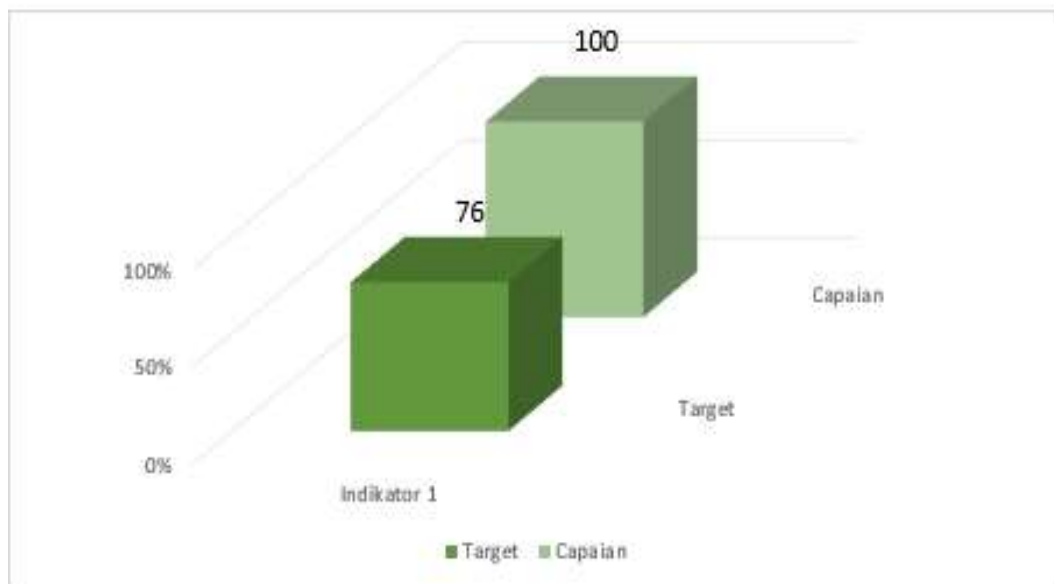
d) Cara Perhitungan

Jumlah Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik dikali 100%

e) Capaian Indikator Kinerja

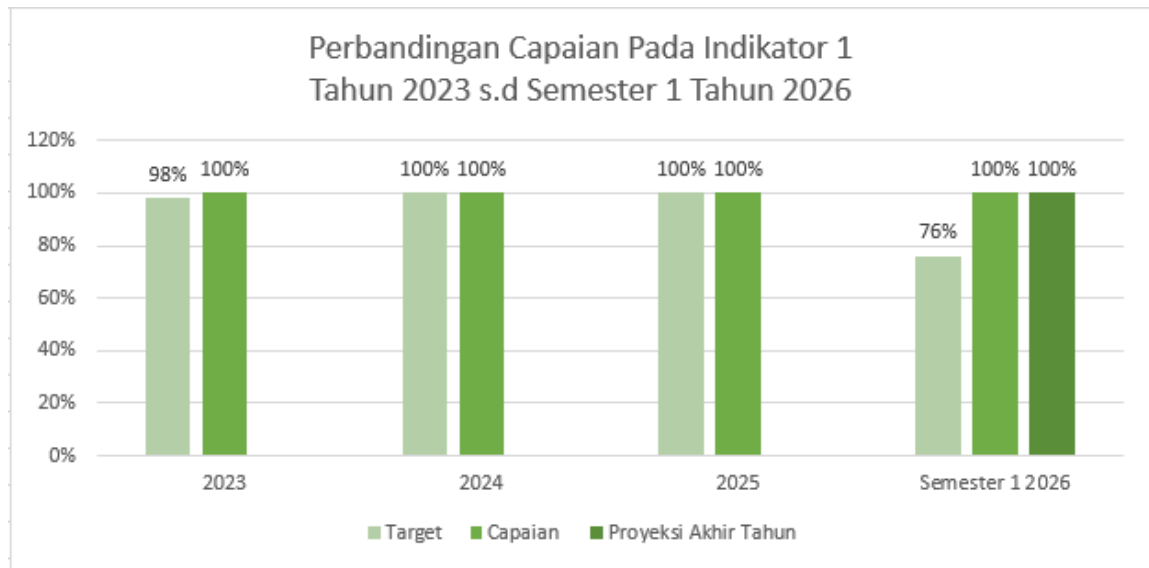
Target pada Indikator ini capaian sebesar 100% dari target 76% sehingga persentase capaian Balai Kekarantinaan Kelas I Palembang pada indikator ini sebesar 131,57%. Dengan capaian indikator ini disimpulkan pada Semester 1 tahun 2026 realisasi capaian pada indikator ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja



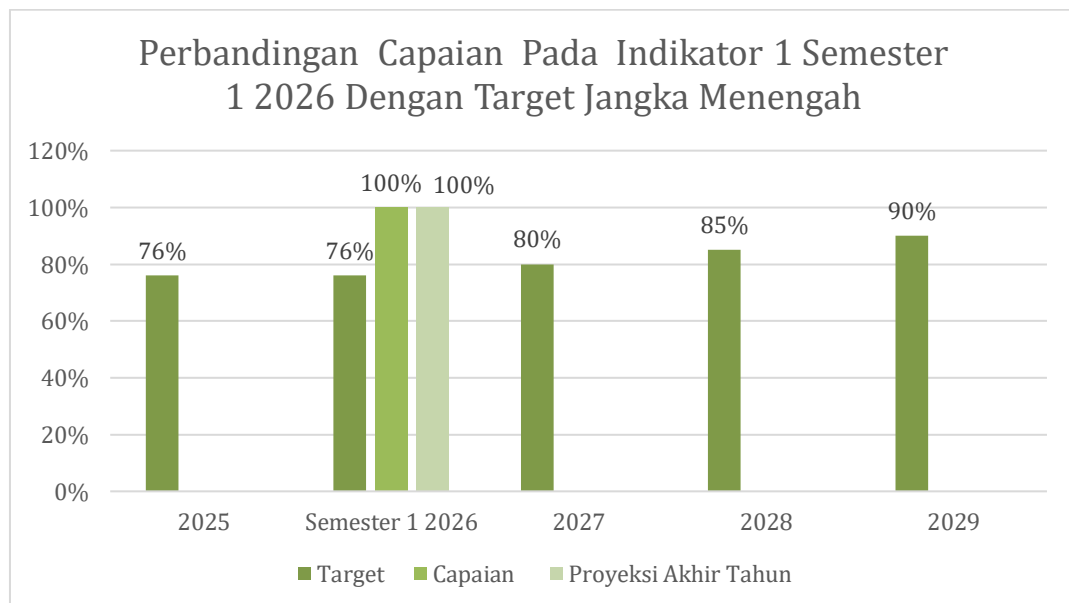
Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Pada Indikator 1

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 6. Perbandingan Capaian Pada Indikator 1 Tahun 2023 s.d Tahun 2026 Semester I

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RAK)



Grafik 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (RAK)

Target indikator Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 76%, sama dengan target tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan karena indikator ini belum digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data capaian sebagai dasar penyusunan target secara bertahap. Oleh karena itu, target

tahun 2025 disamakan dengan target awal implementasi indikator pada tahun 2026 sebagai baseline dalam perencanaan kinerja jangka menengah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, capaian indikator telah mencapai 100%, sehingga melampaui target tahunan sebesar 76%. Apabila capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka proyeksi capaian Tahun 2026 tetap sebesar 100%. Capaian ini juga telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan secara bertahap, yaitu 80% pada tahun 2027, 85% pada tahun 2028, dan 90% pada tahun 2029.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah pada seluruh pintu masuk yang menjadi sasaran telah berjalan dengan baik. Meskipun target jangka menengah telah terlampaui, diperlukan upaya untuk mempertahankan konsistensi pelaksanaan deteksi, menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan, serta memastikan keberlanjutan capaian tersebut agar tetap sesuai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

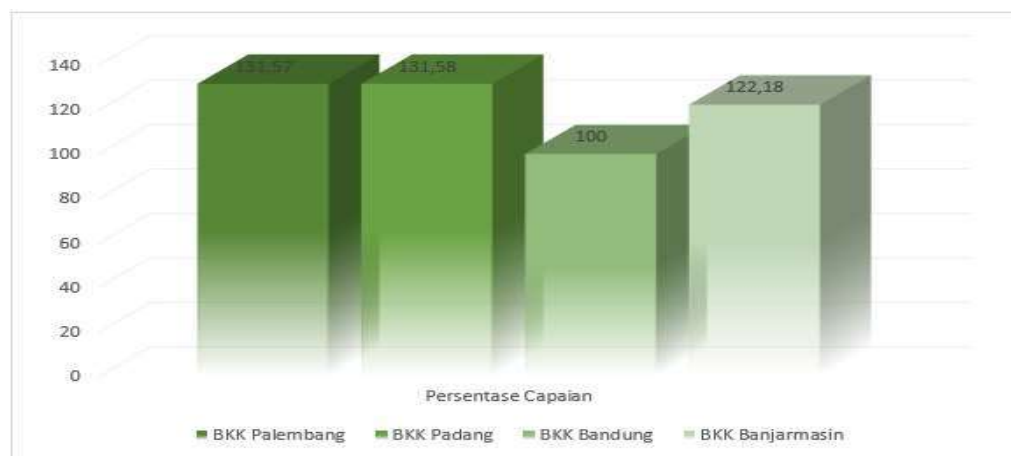
Penetapan kinerja IKK 24.2.1. Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah dengan target 76% tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Indikator ini merupakan *cascading* dari indikator RPJMN / Renstra Kemenkes yaitu IKP 24.2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan dengan target 96%, yang selanjutnya *cascading* dari indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKK 24.2.2. Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah dengan target 54%. Berdasarkan hasil capaian kinerja apabila dibandingkan dengan kedua indikator tersebut dengan obyek utama adalah pintu masuk (pelabuhan / bandara) dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Level IK	Target	Indikator RAK	Target	Realisasi
IKP 24.2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	RPJMN /Renstra	96%	IKK 24.2.1. Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit	76%	100%

IKK Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan berpotensi KLB/wabah	24.2.2	RAP	54%	dan faktor risiko Kesehatan berpotensi KLB/wabah		
---	--------	-----	-----	--	--	--

5. Perbandingan realisasi kinerja satker dengan satker lain yang sejenis



Grafik 8. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pada Indikator 1 BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin

Berdasarkan tabel, perbandingan persentase capaian BKK Padang lebih tinggi dari BKK Palembang sebesar 131,58%, BKK Palembang lebih tinggi dari BKK Banjarmasin sebesar 122,18% dan lebih tinggi dari BKK Bandung yaitu sebesar 100%.

f) Upaya Yang dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja indikator ini antara lain:

1. Melakukan layanan kekarantina kesehatan di bandar udara dan pelabuhan
2. Koordinasi lintas sektor di bandara & pelabuhan yang cukup baik dalam melakukan pengawasan & pemeriksaan terhadap alat angkut, orang dan barang
3. Meningkatkan kompetensi petugas dalam pelaksanaan Tupoksi dengan cara mengikuti pelatihan, workshop

g) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian target persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik yang melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan orang/pelaku

perjalanan menunjukkan bahwa pelaksanaan surveilans di pintu masuk telah berjalan sesuai dengan rencana. Keberhasilan pencapaian indikator ini memberikan dampak positif terhadap upaya deteksi dini dan pencegahan masuk maupun keluarnya faktor risiko penyakit, sehingga memperkuat sistem kewaspadaan kesehatan di pintu masuk negara.

h) Kendala/Masalah yang dihadapi

Meskipun telah mencapai target ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu belum terdeteksinya penyakit menular pada kegiatan penapisan orang dikarenakan waktu yang singkat pada pemeriksaan dan kemungkinan gejala penyakit belum terlihat.

i) Pemecahan Masalah

1. Melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku perjalanan yang akan masuk / keluar
2. Meningkatkan kewaspadaan dini di pintu masuk negara dengan pemberdayaan tenaga serta sarana & prasarana pendukung semaksimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kedatangan / keberangkatan pelaku perjalanan serta alat angkut.

j) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/201 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n PAKi \times CKi} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

CKi : % Capaian Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Capaian indikator Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah pada semester 1 sebesar 100% dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 76%. Indikator Persentase Pintu Masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah telah dilaksanakan secara efisien dengan Nilai Efisiensi sebesar 153%. Capaian keluaran mencapai 100% dengan realisasi anggaran s.d Juni sebesar Rp 630.167.185 atau 26,62% dari pagu anggaran sebesar Rp2.366.796.000, sehingga menunjukkan pemanfaatan anggaran yang sangat efisien dalam mencapai target kinerja.

IKM 33.1.1. Nilai SAKIP

a) **Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

b) **Pengertian**

Nilai LAKIP adalah nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LAKIP sendiri merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dokumen yang menjelaskan: perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan, pengukuran capaian kinerja, serta evaluasi dan pelaporan kinerja instansi.

c) **Definisi Operasional**

Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh TIM SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi dan kualitas unit kerja dalam menerapkan SAKIP

d) **Cara Perhitungan**

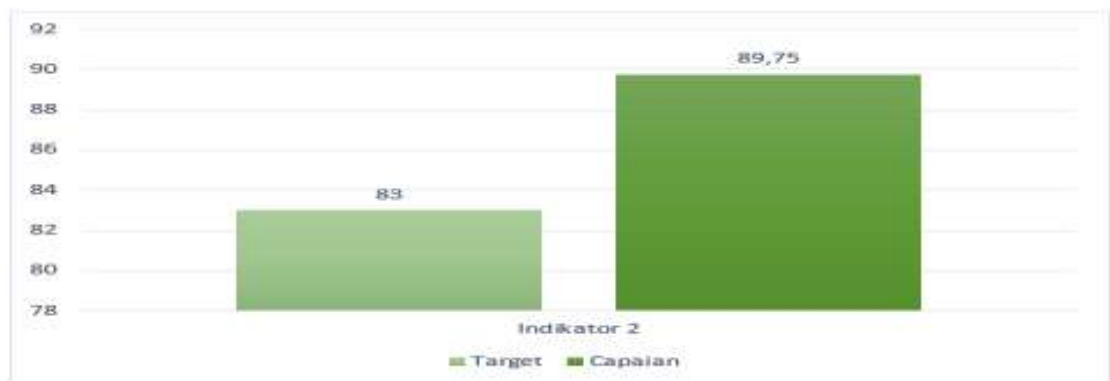
Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian Tim SKI Internal dengan menggunakan LHE, KKE dengan komponen penilaian dan bobot meliputi :

- Perencanaan Kinerja (30,00)
- Pengukuran kinerja (30,00)
- Pelaporan Kinerja (15,00)
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25,00)

e) **Capaian Indikator Kinerja**

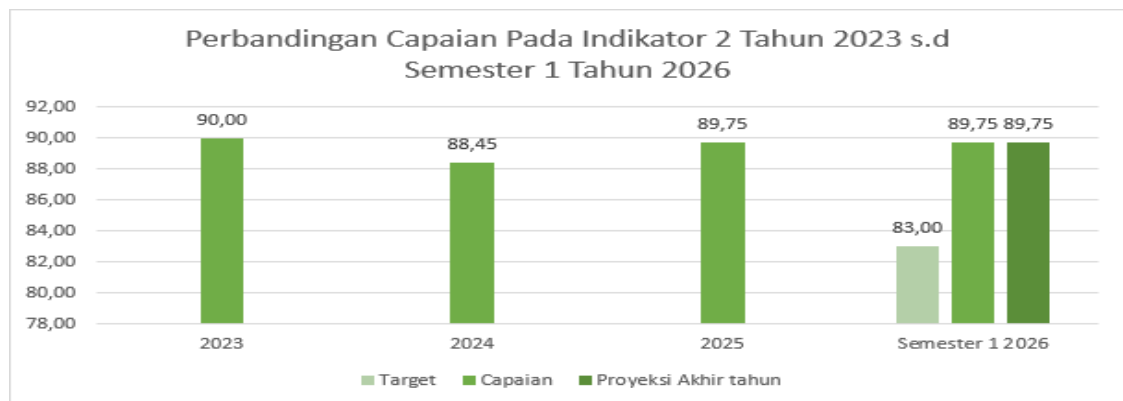
Capaian indikator kinerja Nilai LAKIP Tahun 2026 semester 1 masih menggunakan nilai pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 89,75 dari target 83, sehingga persentasinya 108,13%

1. Perbandingan antara realisasi dan target semester 1 tahun 2026



Grafik 9. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 2 pada Tahun 2026 Semester 1

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



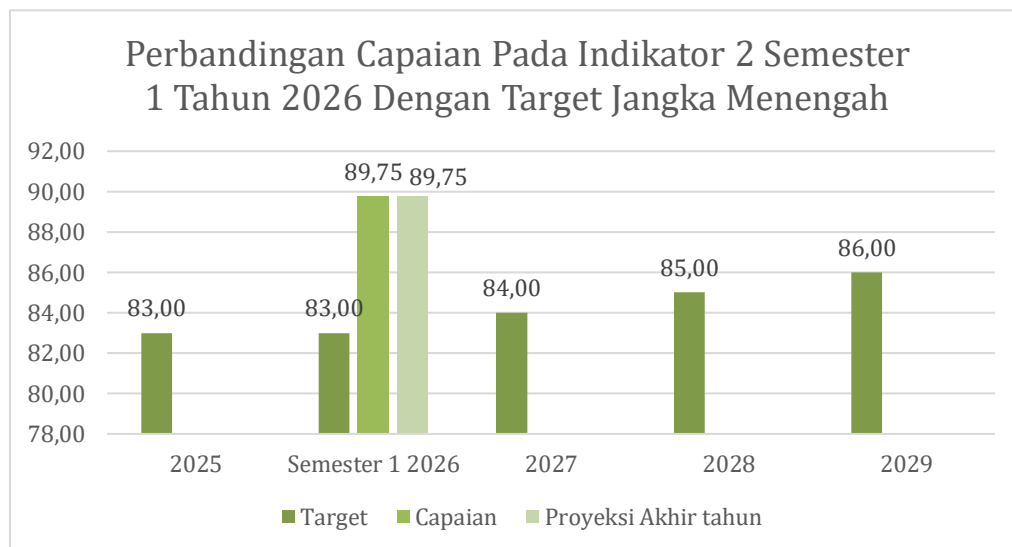
Grafik 10. Perbandingan Capaian pada Indikator 2 pada 2023 s.d Tahun 2026 Semester 1

Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026, sehingga periode 2023 s.d. 2025 tidak memiliki target resmi. Meskipun demikian, capaian historis awal sudah berada di angka yang tinggi (90,00 pada 2023; 88,45 pada 2024; dan 89,75 pada 2025).

Pada tahun pertama penerapannya (2026), target ditetapkan sebesar 83,00. Realisasi Semester 1 2026 berhasil mencapai 89,75 (melampaui target tahun berjalan) dan diproyeksikan bertahan hingga akhir tahun. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah beberapa tahun ke depan—yaitu 84,00 (2027),

85,00 (2028), dan 86,00 (2029)—realisasi saat ini (89,75) sebenarnya sudah melampaui seluruh target jangka menengah hingga tahun 2029.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RAK)



Grafik 11. Perbandingan Capaian pada Indikator 2 pada Tahun Tahun 2026 Semester 1 dengan target jangka menengah (RAK)

Target indikator Nilai SAKIP pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 83,00, sama dengan target tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan karena indikator ini belum digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025, sehingga belum terdapat data historis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan target secara bertahap. Oleh karena itu, target tahun 2025 disamakan dengan target awal implementasi indikator pada tahun 2026 sebagai *baseline* dalam pencapaian target jangka menengah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, capaian indikator telah mencapai 89,75, sehingga melampaui target tahunan sebesar 83,00. Apabila capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka proyeksi capaian Tahun 2026 tetap sebesar 89,75. Capaian tersebut juga telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan secara bertahap, yaitu 84,00 pada tahun 2027, 85,00 pada tahun 2028, dan 86,00 pada tahun 2029.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Meskipun demikian, peningkatan kualitas implementasi SAKIP perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai

dasar perbaikan kinerja, sehingga capaian yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode Renstra berikutnya.

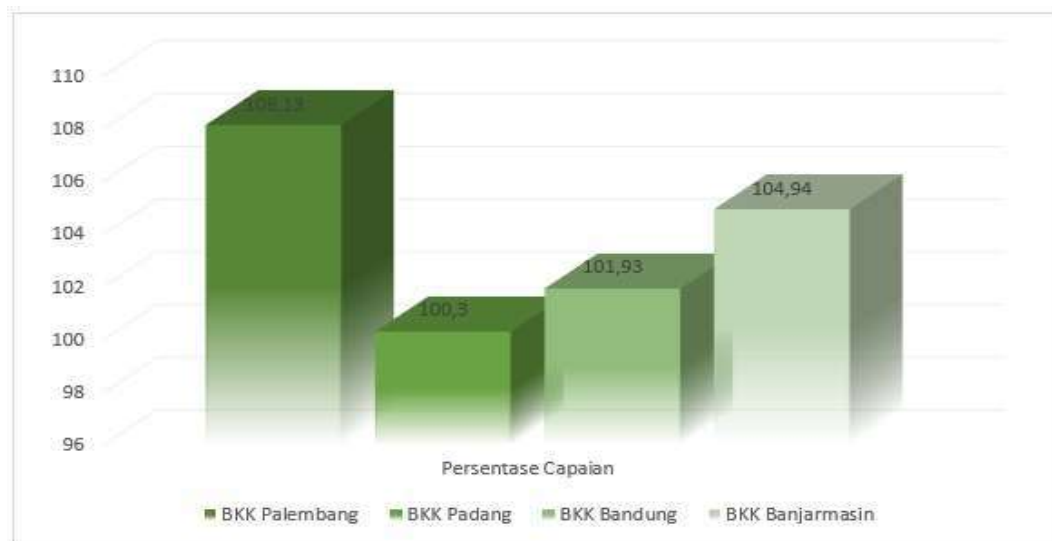
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Penetapan kinerja IKM 33.1.1 - Nilai SAKIP dengan target 83 Nilai tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Indikator ini merupakan cascading dari indikator RPJMN /Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai, yang selanjutnya cascading dari indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKM 33.1 - Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dengan target 83 Nilai. Berdasarkan hasil capaian kinerja apabila dibandingkan dengan kedua indikator tersebut dengan obyek utama adalah dalam upaya reformasi birokrasi seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada data berikut ini :

Indikator Kinerja	Level IK	Target	Indikator RAK	Target	Realisasi
ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	RPJMN/ Renstra	92,16 Nilai	IKK 33.1.1- Nilai SAKIP	83 Nilai	89,75 Nilai
IKM 33.1 - Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	RAP	83 Nilai			

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target indikator RPJM / Renstra Kemenkes tidak dapat dibandingkan karena perbedaan jenis indikator dan target, sedangkan apabila dibandingkan dengan target indikator RAP Ditjen P2, capaian kinerja RAK dapat tercapai diatas target.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis



Grafik 12. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 1 tahun Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja semester 1 indikator 2 antara BKK Kelas I Palembang lebih tinggi dari BKK lainnya adalah persentase capaian kinerja BKK Kelas I Palembang sebesar 108,13 % lebih besar dari BKK Padang sebesar 100,3%, BKK Bandung sebesar 101,93% serta lebih besar dari BKK Banjarmasin sebesar 104,94%.

f). Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator

1. Penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan indikator organisasi.
2. Penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

g). Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian Nilai SAKIP yang melebihi target dipengaruhi oleh:

- a. Adanya komitmen pimpinan dan unit kerja dalam penerapan SAKIP;
- b. Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang relatif lengkap;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang cukup berjalan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- a. Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang belum sepenuhnya optimal
- b. Kualitas indikator kinerja yang belum seluruhnya memenuhi prinsip SMART

- c. Pemahaman SDM terkait SAKIP yang belum merata.

h) Kendala/Masalah yang dihadapi

- a. Belum dilaksanakannya evaluasi SAKIP untuk tahun berjalan (2025) pada periode Semester I.
- b. Keterbatasan SDM yang memiliki pemahaman mendalam terkait implementasi SAKIP.
- c. Belum optimalnya integrasi data dukung antar unit kerja.
- d. Dinamika perubahan kebijakan dalam evaluasi SAKIP.
- e. Masih terdapat SDM yang belum mengikuti diklat/bimbingan teknis SAKIP.

i) Pemecahan Masalah

- a. Melakukan persiapan lebih dini dalam menghadapi evaluasi SAKIP tahun berjalan.
- b. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pendampingan.
- c. Penguatan koordinasi lintas unit kerja dalam penyediaan data dukung.
- d. Penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur dan relevan.
- e. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat/bimbingan teknis SAKIP

j) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n PAKi \times CKi} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

CKi : % Capaian Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Nilai SAKIP pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang sangat efisien, dengan memanfaatkan SDM yang tersedia serta dukungan sarana dan sistem informasi yang ada tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Namun demikian, efisiensi tersebut belum sepenuhnya optimal, mengingat masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi SDM dengan tugas yang diemban, khususnya pada fungsi pengelolaan kinerja. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya melalui peningkatan kapasitas SDM, penyesuaian penugasan sesuai kompetensi, serta penguatan koordinasi internal agar pencapaian kinerja dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

IKM 33.2.1 Nilai Kinerja Anggaran

a) Dasar Hukum

1. PMK 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b) Pengertian

Nilai kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian / lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran terdapat 4 indikator penilaian yaitu:

1. Realisasi Anggaran
2. Konsistensi RPD
3. CRO
4. Efisiensi

c) Definisi Operasional

Besarnya Nilai Kinerja Anggaran BKK diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari :

- a. Kinerja atas perencanaan anggaran BKK diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK.
- b. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BKK, diukur menggunakan sistem Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.

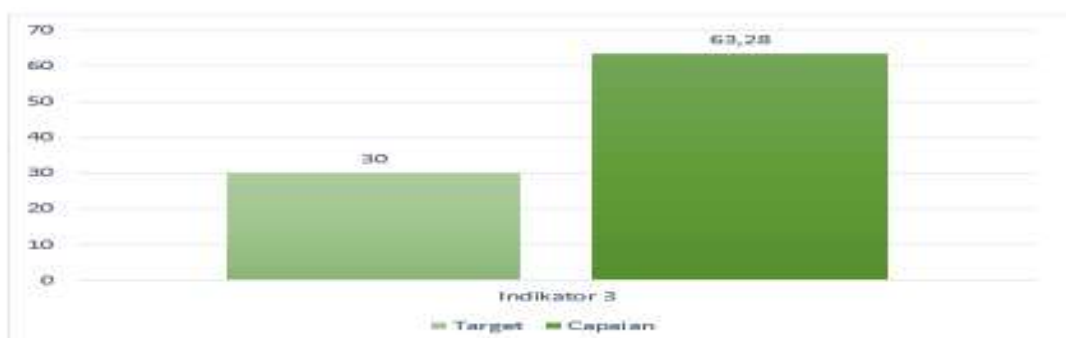
d) Cara Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) =
 50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran (yang terdiri 75%
 efektivitas + 25% efisiensi) + 50% Nilai Indikator Pelaksanaan
 Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)

e) Capaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai kinerja anggaran Tahun Anggaran 2026 BKK Palembang adalah sebesar 63,28% Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan kontribusi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, masing-masing dengan bobot 50%. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran tercatat sebesar 27,86 sehingga memberikan kontribusi sebesar 13,93 terhadap NKA. Sementara itu, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang mencapai 98,53 memberikan kontribusi sebesar 49,27. Rendahnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (27,86) menunjukkan bahwa aspek perencanaan anggaran masih memerlukan penguatan, terutama dalam menjaga kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran. Meskipun Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah mencapai 98,53 yang mencerminkan pelaksanaan anggaran berjalan sangat baik, capaian NKA secara keseluruhan belum optimal karena kualitas perencanaan memiliki bobot yang sama besar (50%) dalam perhitungan NKA.

1. Perbandingan antara realisasi dan target semester 1 tahun 2026



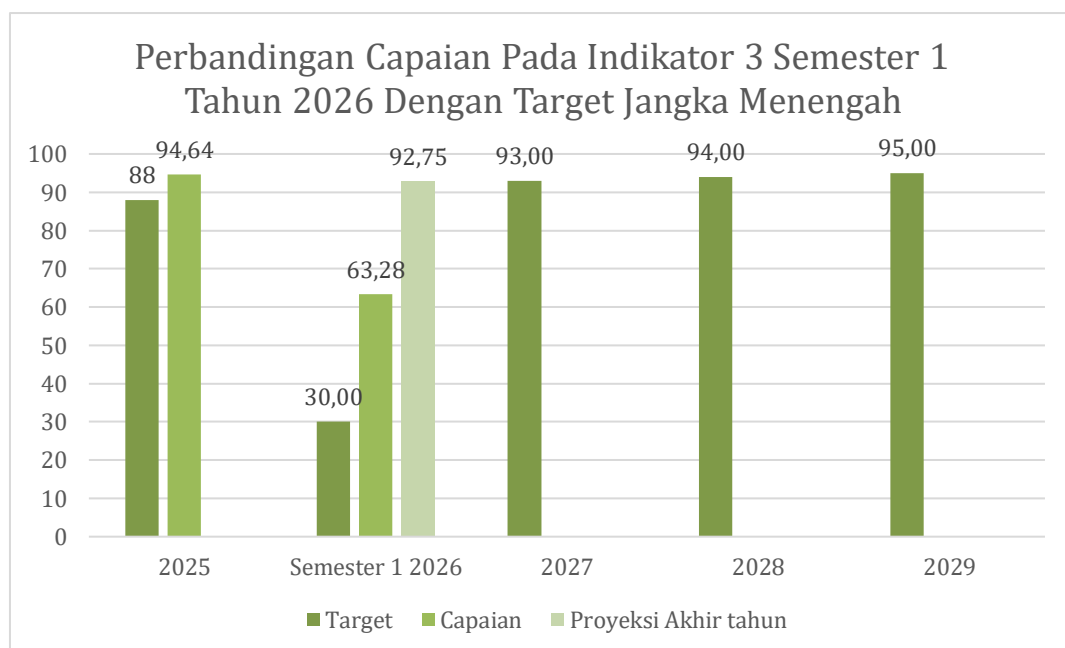
Grafik 13. Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator 3 BKK Palembang Tahun 2026 semester 1

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 14. Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator 3 BKK Palembang Tahun 2026 semester 1

- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RAK)



Grafik 15. Perbandingan Capaian Indikator 3 tahun Tahun 2026 semester 1 dengan target RAK

Target Indikator 3 pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 88. Memasuki Tahun 2026, target Semester I ditetapkan sebesar 30 sebagai target antara (*milestone*) yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan pola penilaian indikator sepanjang tahun anggaran. Dengan demikian, target Semester I tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan karena merupakan bagian dari target yang akan dicapai secara bertahap hingga akhir tahun.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, capaian indikator mencapai 63,28, atau telah melampaui target Semester I sebesar 30. Apabila tren pencapaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka proyeksi capaian Tahun 2026 diperkirakan mencapai 92,75. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa capaian akhir tahun diperkirakan hampir memenuhi target jangka menengah Tahun 2027 sebesar 93, serta berada di atas target Tahun 2025 sebesar 88.

Meskipun proyeksi capaian akhir tahun menunjukkan hasil yang sangat baik, masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II agar target Tahun 2026 dapat dicapai secara maksimal dan menjadi landasan yang kuat untuk memenuhi target jangka menengah pada tahun 2027–2029 yang meningkat secara bertahap menjadi 93, 94, dan 95. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi peningkatan kinerja sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan Renstra.

Secara historis (periode **2023 s.d. 2025**), realisasi capaian Indikator 3 selalu menunjukkan tren positif yang meningkat secara konsisten dan **selalu melampaui target tahunannya**:

- **2023**: Capaian **88,42** (Target: 86,00)
- **2024**: Capaian **93,29** (Target: 87,00)
- **2025**: Capaian **94,64** (Target: 88,00)

Pada **Semester 1 2026**, dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar **30,00**, organisasi berhasil mencatatkan realisasi sebesar **63,28** (telah melampaui target tahun berjalan pada paruh pertama tahun) dan diproyeksikan mencapai **92,75** pada akhir tahun 2026. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah beberapa tahun ke depan—yaitu **93,00** (2027), **94,00** (2028), dan **95,00** (2029)—maka realisasi saat ini menunjukkan tren yang sangat akseleratif mendekati target akhir 2029. Meskipun seluruh target internal dan target jangka menengah secara umum telah terpenuhi dengan baik, organisasi tetap perlu melakukan analisis dan evaluasi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan jika disandingkan dan dibandingkan dengan capaian BKK lain, nilai riil yang kita peroleh saat ini sebenarnya masih tergolong kecil. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan tambahan agar capaian yang sudah memenuhi target ini juga mampu bersaing secara kompetitif di tingkat nasional.

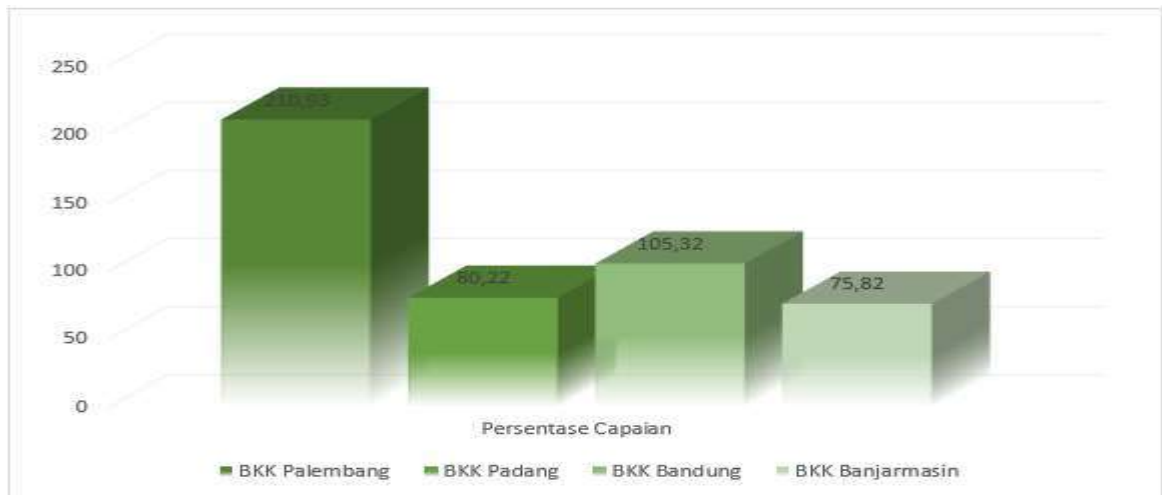
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Penetapan kinerja IKM 33.2.1 - Nilai Kinerja Anggaran dengan target 92,75 Nilai tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Indikator ini merupakan cascading dari indikator RPJMN / Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai, yang selanjutnya cascading dari indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKM 33.2 - Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dengan target 92,75 Nilai. Berdasarkan hasil capaian kinerja apabila dibandingkan dengan kedua indikator tersebut dengan obyek utama adalah dalam upaya reformasi birokrasi seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada data berikut ini :

Indikator Kinerja	Level IK	Target	Indikator RAK	Target	Realisasi
ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	RPJMN/ Renstra	92,16 Nilai	IKK 33.2.1- Nilai Kinerja Anggaran	30	63,28
IKM 33.1 - Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	RAP	92,75 Nilai			

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target indikator RPJM / Renstra Kemenkes tidak dapat dibandingkan karena perbedaan jenis indikator dan target, sedangkan apabila dibandingkan dengan target indikator RAP Ditjen P2, capaian kinerja RAK dapat tercapai diatas target.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis



Grafik 16. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 3 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja semester 1 indikator 3 antara BKK Kelas I Palembang lebih tinggi dari BKK lainnya adalah persentase capaian kinerja BKK Palembang I sebesar 210,93 % lebih besar dari BKK Padang sebesar 80,22%, BKK Bandung sebesar 105,32% serta lebih besar dari BKK Banjarmasin sebesar 75,82%.

d. Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator

- Pengetatan penyusunan dan pengendalian Rencana Penarikan Dana (RPD).
- Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- Pemanfaatan data dan evaluasi kinerja pada monev periode sebelumnya

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Semester 1 belum optimal, yang dipengaruhi oleh belum sepenuhnya kesesuaian antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penarikan dana pada tahap pelaksanaan.

Meskipun penyusunan perencanaan anggaran, termasuk RPD, telah dilakukan secara optimal, dalam pelaksanaannya masih terdapat deviasi waktu penarikan dana yang mempengaruhi nilai kinerja perencanaan anggaran.

Di sisi lain, kinerja pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada konsistensi pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah disusun.

f) Kendala/Masalah yang dihadapi

- a. Belum optimalnya kesesuaian antara jadwal RPD dengan realisasi penarikan dana pada pelaksanaan kegiatan.
- b. Adanya pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada deviasi penarikan anggaran.
- c. Perlunya peningkatan kedisiplinan dalam mengikuti rencana yang telah ditetapkan.

g) Pemecahan Masalah

- a. Meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian antara RPD dan realisasi penarikan dana.
- c. Melakukan penyesuaian dini terhadap potensi deviasi pelaksanaan agar tidak berdampak signifikan terhadap kinerja anggaran.
- d. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n PAKi \times CKi} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

CKi : % Capaian Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan anggaran pada Semester I telah berjalan secara efisien, yang tercermin dari tingginya capaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Namun demikian, untuk mendukung peningkatan capaian NKA secara keseluruhan, diperlukan peningkatan konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dan rencana yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal penarikan dana sesuai RPD.

Capaian indikator nilai kinerja anggaran tahun 2026 semester 1 sebesar 63,20% bila dibandingkan antara kinerja anggaran BKK Kelas I Palembang dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 92,75% dicapai anggaran sebesar 7.789.028.542 dengan nilai 48,79%. Meskipun penggunaan anggaran tergolong efisien, capaian NKA secara substansi masih dipengaruhi oleh rendahnya nilai kinerja perencanaan anggaran dibandingkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

IKM 33.4.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

a) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

b) Pengertian

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah perbaikan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menindaklanjuti temuan dan saran yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan.

c) Definisi Operasional

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap

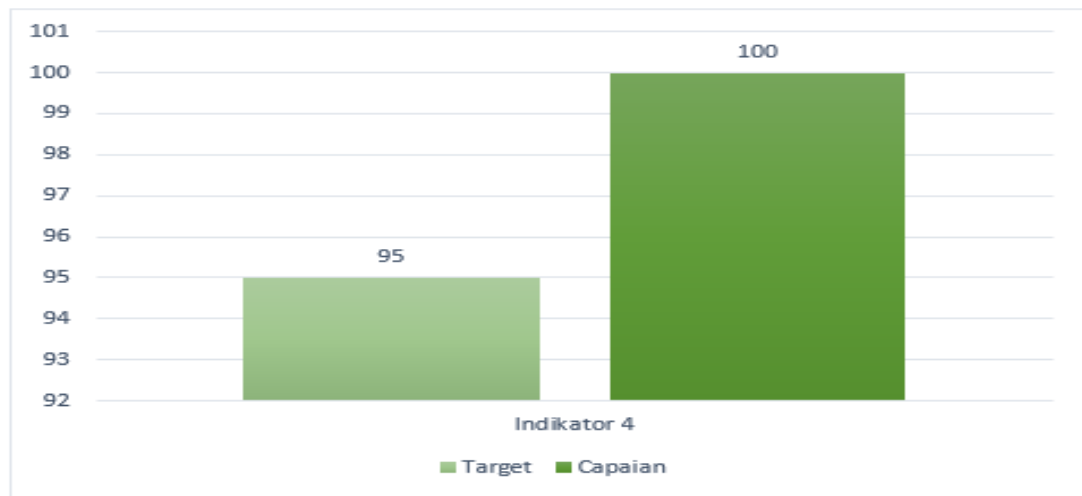
d) Cara Perhitungan

Jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%.

c) Capaian Indikator Kinerja

Pada Semester I, persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang adalah sebesar 100%. Capaian ini disebabkan karena pada periode tersebut tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti, sehingga tidak terdapat outstanding tindak lanjut.

1. Perbandingan antara realisasi dan target semester 1 tahun 2026



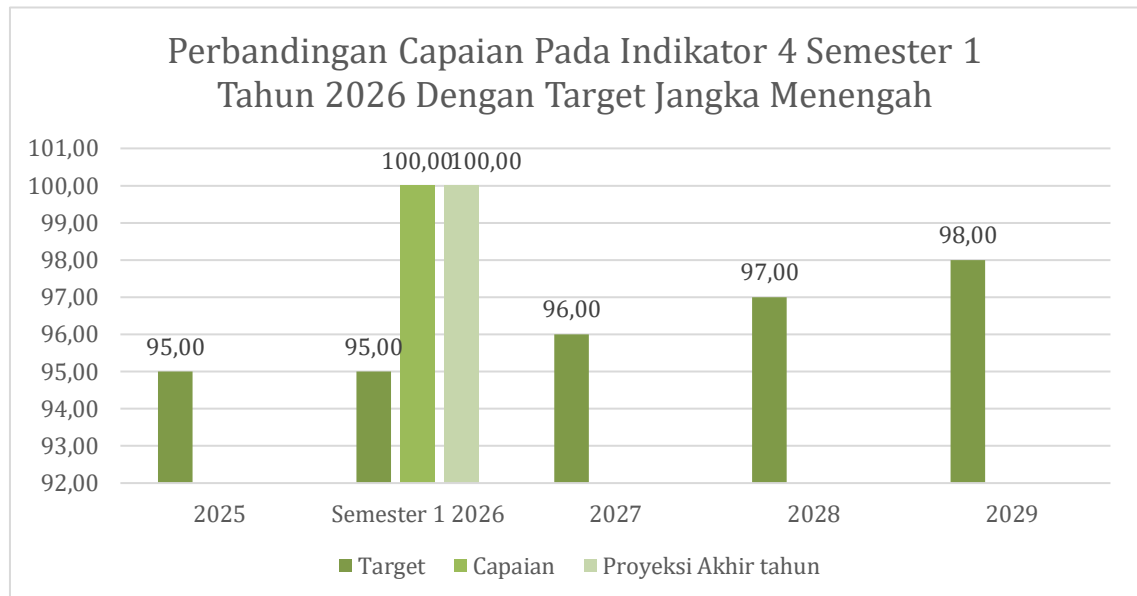
Grafik 17. Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator 4 BKK Palembang Tahun 2026 semester 1

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 18. Perbandingan Capaian pada Indikator 4 pada Tahun 2023 sd Tahun 2026 semester 1

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RAK)



Grafik 19. Perbandingan Capaian pada Indikator 4 pada Tahun 2026 semester 1 dengan target jangka menengah (RAK)

Target indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Ditindaklanjuti pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 95%, sama dengan target tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan karena indikator ini belum digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data historis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan target secara bertahap. Oleh karena itu, target tahun 2025 disamakan dengan target awal implementasi indikator pada tahun 2026 sebagai *baseline* dalam pencapaian target jangka menengah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, capaian indikator telah mencapai 100%, sehingga melampaui target tahunan sebesar 95%. Apabila capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka proyeksi capaian Tahun 2026 tetap sebesar 100%. Capaian tersebut juga telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan secara bertahap, yaitu 96% pada tahun 2027, 97% pada tahun 2028, dan 98% pada tahun 2029.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dilaksanakan secara optimal sehingga seluruh rekomendasi yang menjadi kewajiban organisasi dapat diselesaikan. Meskipun target jangka menengah telah terlampaui, pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan tingkat penyelesaian rekomendasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Penetapan kinerja IKM 33.4.1 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan target 95%. Nilai tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Indikator ini merupakan cascading dari indikator RPJMN / Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai, yang selanjutnya cascading dari indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKM 33.4-Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dengan target 95%. Berdasarkan hasil capaian kinerja apabila dibandingkan dengan kedua indikator tersebut dengan obyek utama adalah dalam upaya reformasi birokrasi seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada data berikut ini :

Indikator Kinerja	Level IK	Target	Indikator RAK	Target	Realisasi
ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	RPJMN/ Renstra	92,16 Nilai	IKK 33.2.1- Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95	100
IKM 33.1 - Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal penanggulangan Penyakit	RAP	95%			

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target indikator RPJM / Renstra Kemenkes dan indikator RAP Ditjen P2 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan jenis indikator dan target, meskipun capaian kinerja RAK tercapai melebihi target karena semua rekomendasi BPK telah tuntas ditindaklanjuti.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis



Grafik 20. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 4 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja semester 1 indikator 4 antara BKK Kelas I Palembang dengan BKK lainnya sama yaitu adalah persentase capaian kinerja BKK Palembang I sebesar 105,26 % sama seperti dari BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin sebesar 105,26%, karena seluruh unit kerja mampu menyelesaikan indikator kinerja yang menjadi target, sehingga masing-masing memperoleh capaian yang sama sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.

d) Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan pemantauan dan koordinasi secara berkala terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian indikator sebesar 100% disebabkan tidak adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada periode Semester I yang harus ditindaklanjuti. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi pada periode sebelumnya telah diselesaikan, sehingga tidak terdapat kewajiban yang tertunda.

f) Kendala/Masalah yang dihadapi

- Tidak terdapat kendala yang signifikan pada periode pelaporan.
- Namun demikian, potensi kendala dapat muncul apabila terdapat rekomendasi baru yang memerlukan tindak lanjut lintas unit kerja.

g) Pemecahan Masalah

- a. Mempertahankan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- b. Meningkatkan kesiapan dokumen dan koordinasi antar unit kerja dalam menghadapi pemeriksaan.
- c. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap potensi temuan yang dapat muncul.

h) Efisiensi penggunaan sumber daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n PAKi \times CKi} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

CKi : % Capaian Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini sangat efisien, karena tidak memerlukan upaya tambahan dalam tindak lanjut rekomendasi. Kegiatan

difokuskan pada pemantauan dan pemeliharaan tertib administrasi sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi pemeriksaan di masa mendatang

IKD 33.1.1 Persentase Realisasi Anggaran

a) Dasar Hukum

1. PMK 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b) Pengertian

Persentase Realisasi Anggaran yang dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan anggaran bersumber DIPA dengan pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA pada satu tahun anggaran.

c) Definisi Operasional

Persentase realisasi anggaran adalah perbandingan antara jumlah anggaran yang telah direalisasikan (digunakan) dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%)

d) Cara Perhitungan

Persentase Realisasi Anggaran dihitung dari Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah anggaran satuan kerja dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah anggaran}} \times 100 \%$$

e) Capaian indikator Kinerja

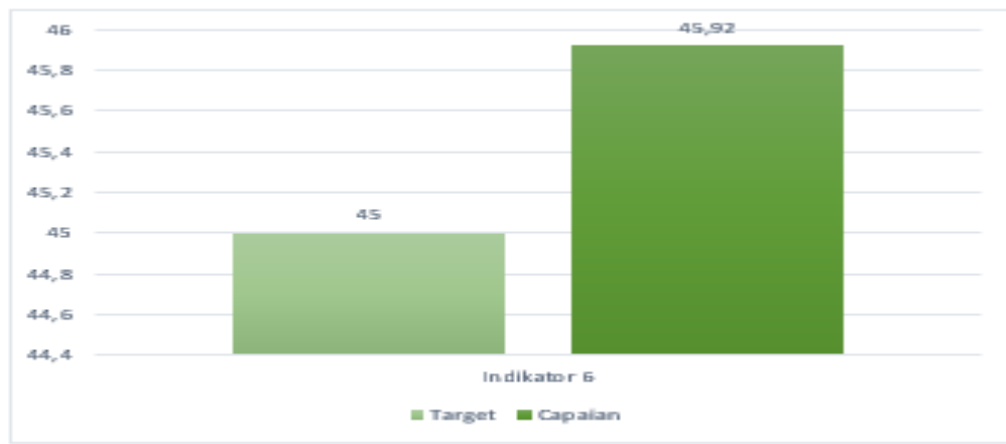
Realisasi belanja merupakan wujud konkret dari pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan keuangan, seperti DIPA atau RKA-K/L. Realisasi belanja menunjukkan seberapa besar dana yang telah digunakan oleh satuan kerja dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi belanja menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas penyerapan anggaran.

Pagu total Anggaran BKK Palembang Tahun 2026 sebesar Rp 18.332.808.000.

Pagu Efektif BKK Palembang sebesar Rp 18.332.808.000. Realisasi anggaran

tahun 2026 semester 1 adalah sebesar Rp 8.419.195.727 atau mencapai 45,92% dari total pagu anggaran. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 6.772.547.521 atau 50,01% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp 1.646.648.206 atau 35,24% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 0 atau 0% dari anggarannya. Persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Barang/Jasa.

1. Perbandingan antara realisasi dan target semester 1 tahun 2026



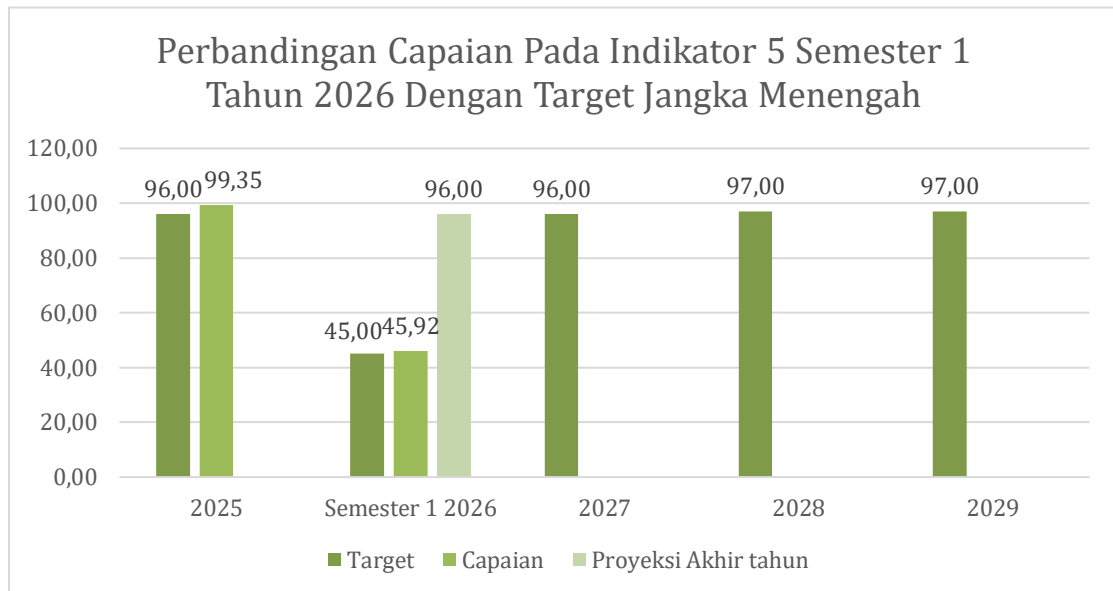
Grafik 21. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 5 Tahun 2026 Semester 1

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 22. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 5 pada Tahun 2023 sd Tahun 2026 semester 1

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RAK)



Grafik 23. Perbandingan Capaian pada Indikator 5 pada Tahun 2026 semester 1 dengan target jangka menengah (RAK)

Target indikator Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 96% dan dipertahankan pada tahun 2026. Pada Semester I Tahun 2026, target yang ditetapkan sebesar 45% sebagai target antara (milestone) yang disesuaikan dengan tahapan penyerapan anggaran pada semester pertama. Selanjutnya, target jangka menengah ditetapkan sebesar 96% pada tahun 2027 serta meningkat menjadi 97% pada tahun 2028 dan 2029.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai 45,92%, sehingga telah melampaui target Semester I sebesar 45%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada semester pertama telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Apabila tren penyerapan anggaran dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka proyeksi capaian Tahun 2026 diperkirakan mencapai 96%, sehingga sesuai dengan target tahunan dan menjadi dasar yang baik untuk mendukung pencapaian target jangka menengah pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun capaian Semester I telah memenuhi target, optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan tetap perlu dilakukan pada Semester II agar penyerapan anggaran berlangsung tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi secara berkala perlu terus diperkuat untuk memastikan target realisasi anggaran sebesar 96% pada tahun 2027 serta 97% pada tahun 2028–2029 dapat tercapai secara konsisten.

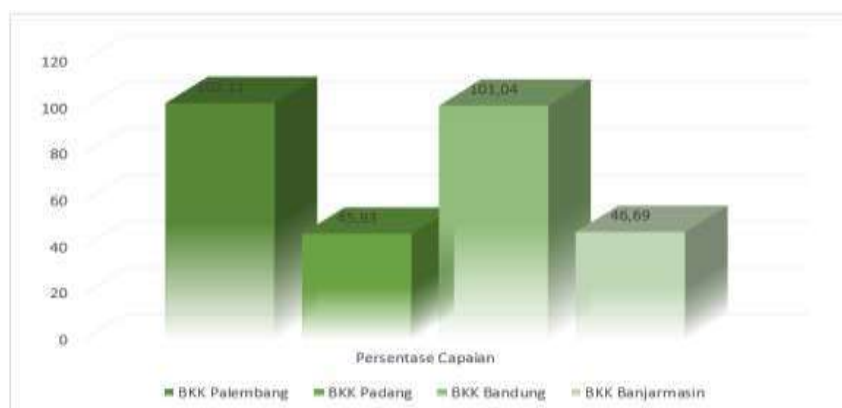
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Penetapan kinerja IKD 33.1.1 - Persentase Realisasi Anggaran dengan target 45% merupakan indikator direktif yang tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Indikator ini merupakan cascading dari indikator RPJMN / Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 – Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai, yang selanjutnya cascading dari indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKM 33.2 - Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dengan target 92,75 Nilai. Berdasarkan hasil capaian kinerja apabila dibandingkan dengan kedua indikator tersebut dengan obyek utama adalah dalam upaya reformasi birokrasi seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada data berikut ini :

Indikator Kinerja	Level IK	Target	Indikator RAK	Target	Realisasi
ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	RPJMN/ Renstra	92,16 Nilai	IKK 33.1.1- Persentase Realisasi Anggaran	45	45,92
IKM 33.1.1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	RAP	95%			

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target indikator RPJM / Renstra Kemenkes dan indikator RAP Ditjen P2 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan jenis indikator dan target.

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis



Grafik 24. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 5 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja semester 1 indikator 5 antara BKK Kelas I Palembang lebih tinggi dari BKK lainnya adalah persentase capaian kinerja BKK Palembang I sebesar 102,11 % lebih besar dari BKK Padang sebesar 45,93%, BKK Bandung sebesar 101,04% serta lebih besar dari BKK Banjarmasin sebesar 46,69%.

d) Upaya Yang dilakukan Untuk Mencapai Indikator

1. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala.
3. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya belanja operasional.
4. Mengoptimalkan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan anggaran.

e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

1. Proses penyesuaian anggaran diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan capaian kinerja dan output kegiatan.
2. Perbedaan tingkat deviasi yang cukup signifikan antar bagian mencerminkan ketimpangan dalam kapasitas perencanaan dan pengendalian anggaran.

f) Kendala/Masalah yang dihadapi

Kendala / masalah yang dihadapi terkait indikator tersebut diatas sebagai berikut:

1. Sebagian kegiatan masih dalam tahap persiapan dan proses administrasi.
2. Proses pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu.
3. Penjadwalan kegiatan yang belum sepenuhnya optimal pada awal tahun.
4. Ketergantungan pada mekanisme pencairan anggaran

g) Pemecahan Masalah

1. Melakukan percepatan proses pengadaan dan administrasi kegiatan
2. Menyusun penjadwalan kegiatan yang lebih terstruktur dan realistis
3. Meningkatkan monitoring dan pengendalian pelaksanaan anggaran
4. Mendorong percepatan realisasi belanja pada triwulan berikutnya

h) Efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Persentase Realisasi Anggaran memperoleh Nilai Efisiensi sebesar 101%. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.789.028.542 atau 48,78% dari pagu

anggaran sebesar Rp15.966.012.000, indikator ini mencapai target keluaran sebesar 100%. Meskipun penggunaan anggaran tergolong efisien, capaian NKA secara substansi masih dipengaruhi oleh rendahnya nilai kinerja perencanaan anggaran dibandingkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

IKD 33.1.2 Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2 x 24 Jam

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang kemudian berubah nomenklatur menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan yang berlaku.

b. Pengertian

Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan adalah proses penerbitan dokumen resmi oleh petugas kekarantinaan kesehatan sebagai bukti bahwa alat angkut telah menjalani pemeriksaan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Alat Angkut meliputi sarana transportasi seperti kapal, pesawat udara, atau alat angkut lain yang keluar, masuk, atau berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas. Kategori Merah menunjukkan bahwa alat angkut memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat, misalnya: berasal dari wilayah yang sedang mengalami wabah atau kejadian luar biasa penyakit menular; terdapat penumpang atau awak yang diduga atau

terkonfirmasi menderita penyakit menular; ditemukan faktor risiko kesehatan lain yang memerlukan tindakan kekarantinaan. Kurang dari 2 × 24 Jam merupakan standar waktu penyelesaian pelayanan, yaitu dokumen diterbitkan dalam waktu kurang dari 48 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan proses pemeriksaan selesai.

c. Definisi Operasional

layanan yang diberikan oleh otoritas kekarantinaan kesehatan untuk menerbitkan dokumen izin atau persetujuan terhadap alat angkut (kapal, pesawat udara, atau kendaraan tertentu) yang dikategorikan berisiko tinggi (kategori merah), dengan waktu penyelesaian pelayanan kurang dari 2 × 24 jam (kurang dari 48 jam).

d. Cara Perhitungan

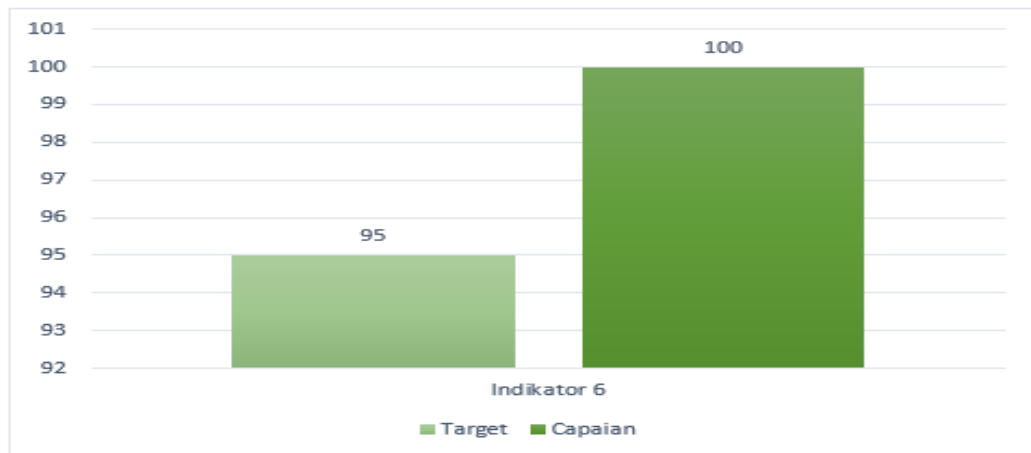
Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam dapat diukur dengan :

Persentase ketepatan waktu = Jumlah dokumen terbit $\leq$ 2x24 jam / total dokumen dalam kategori merah x 100%

e. Capaian indikator Kinerja

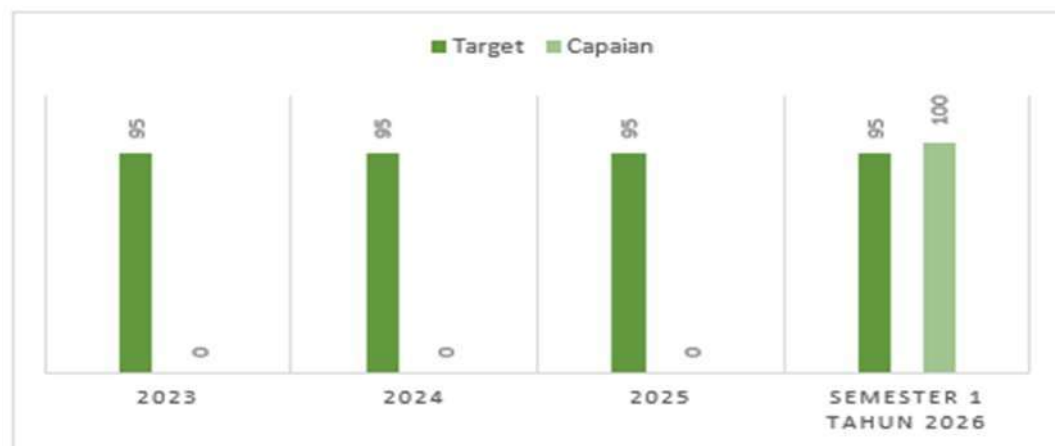
Capaian indikator kinerja "Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2 × 24 Jam" menggambarkan persentase dokumen layanan kekarantinaan kesehatan bagi alat angkut kategori merah yang berhasil diterbitkan dalam waktu kurang dari 48 jam sesuai standar pelayanan. Semakin tinggi nilai capaian, semakin baik kinerja unit dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. capaian pada semester 1 tahun 2026 sebanyak 100% dari target realisasi 95%.

1. Perbandingan antara realisasi dan target semester 1 tahun 2026



Grafik 25. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 6 Tahun 2025 semester 1

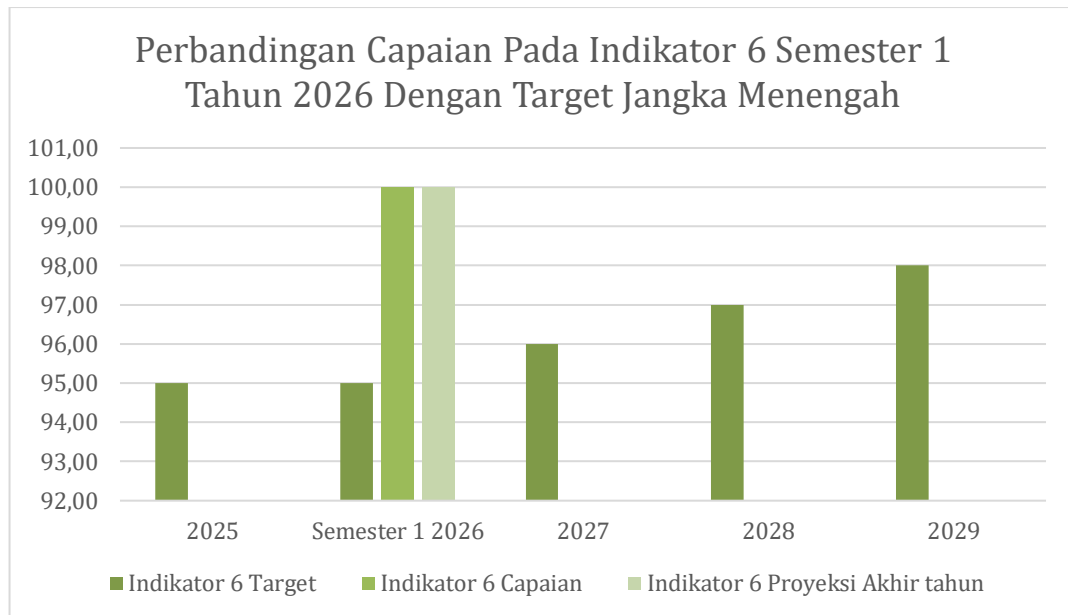
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Grafik 26. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 5 pada Tahun 2023 sd Tahun 2026 semester 1

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RAK)

Capaian indikator kinerja kegiatan Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 jam pada Semester I Tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target RAK Tahun 2025 s.d 2029 telah dapat dibandingkan meskipun indikator ini baru ditetapkan Tahun 2026 dan capaian kinerja Semester I Tahun 2026 telah dapat melampaui target setiap tahunnya. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan Target RAK pada Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:



Grafik 27. Perbandingan Capaian pada Indikator 6 dengan target jangka menengah (RAK)

Target indikator Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 95% dan dipertahankan pada tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan karena indikator ini belum digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data historis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan target secara bertahap. Oleh karena itu, target tahun 2025 disamakan dengan target awal implementasi indikator pada tahun 2026 sebagai *baseline* dalam pencapaian target jangka menengah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, capaian indikator telah mencapai 100%, sehingga melampaui target tahunan sebesar 95%. Apabila capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka proyeksi capaian Tahun 2026 tetap sebesar 100%. Capaian tersebut juga telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan secara bertahap, yaitu 96% pada tahun 2027, 97% pada tahun 2028, dan 98% pada tahun 2029.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut kategori merah dapat diterbitkan dalam waktu kurang dari 2×24 jam sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas proses pelayanan, koordinasi antarpetugas, serta kesiapan sumber daya dalam mendukung pelayanan kekarantinaan kesehatan. Meskipun target jangka menengah telah terlampaui, peningkatan kualitas pelayanan, pemantauan terhadap ketepatan waktu penerbitan dokumen, dan penguatan sistem monitoring perlu

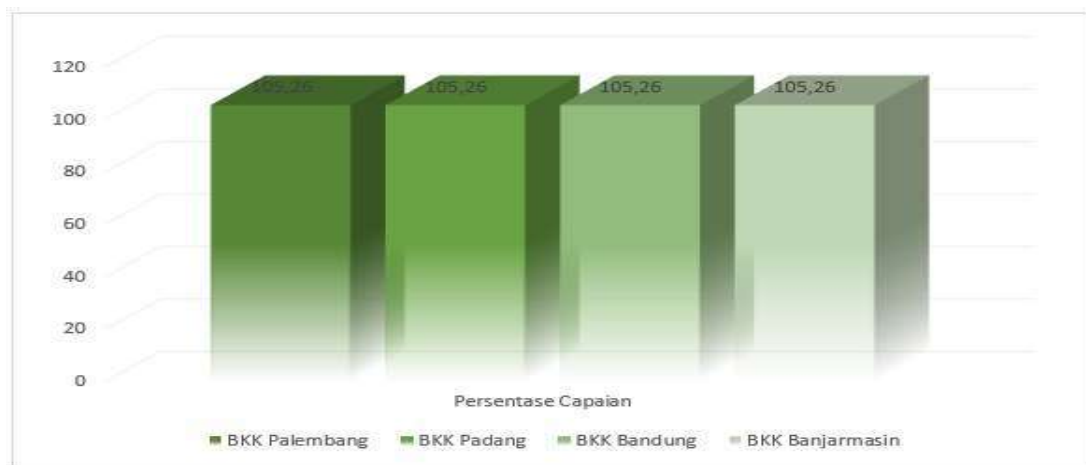
terus dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut secara berkelanjutan serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Penetapan kinerja IKD 33.1.2 - Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam dengan target 95% merupakan indikator direktif yang tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Indikator ini merupakan cascading dari indikator RPJMN / Renstra Kemenkes yaitu ISS 33 – Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target 92,16 Nilai, yang selanjutnya cascading dari indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKM 33.1.2 Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam target 95%. Berdasarkan hasil capaian kinerja apabila dibandingkan dengan kedua indikator tersebut dengan obyek utama adalah dalam upaya reformasi birokrasi seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada data berikut ini :

Indikator Kinerja	Level IK	Target	Indikator RAK	Target	Realisasi
ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	RPJMN/ Renstra	92,16 Nilai	IKD 33.1.2- Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95	100
IKD 33.1. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	RAP	95%			

5. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis



Grafik 28. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 6 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja semester 1 indikator 6 antara BKK Kelas I Palembang dengan BKK lainnya sama yaitu adalah persentase capaian kinerja BKK Palembang I sebesar 105,26 % sama seperti dari BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin sebesar 105,26%, karena seluruh target penyelesaian pekerjaan dapat direalisasikan secara penuh sehingga menghasilkan persentase capaian yang setara.

d) Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator

1. Melaksanakan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan secara cepat dan sesuai prosedur terhadap alat angkut kategori merah segera setelah alat angkut tiba.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti otoritas pelabuhan/bandara, bea cukai, imigrasi, syahbandar, maskapai, atau agen pelayaran, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dan mempercepat proses pelayanan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi pelayanan sehingga proses pencatatan, verifikasi, dan penerbitan dokumen dapat dilakukan secara lebih efisien.
4. Menjamin kesiapan sumber daya manusia, termasuk pengaturan jadwal petugas secara bergiliran (shift) agar pelayanan dapat diberikan setiap saat sesuai kebutuhan operasional.

5. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen secara cepat dan akurat sehingga tidak terjadi penundaan akibat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai.
6. Melaksanakan monitoring terhadap waktu penyelesaian pelayanan untuk memastikan setiap dokumen diterbitkan sesuai standar waktu kurang dari 2 × 24 jam.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap kendala pelayanan serta menyusun langkah perbaikan untuk mengurangi hambatan dalam proses pemeriksaan dan penerbitan dokumen.
8. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan dan pembinaan terkait tata laksana kekarantinaan kesehatan, penggunaan aplikasi pelayanan, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP).

e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Belum tercapainya target indikator disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dari agen atau operator alat angkut, sehingga proses verifikasi dan penerbitan dokumen memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, peningkatan jumlah kedatangan alat angkut pada waktu yang bersamaan, keterbatasan jumlah petugas pada jam-jam tertentu, serta kendala teknis pada sistem informasi turut memengaruhi waktu penyelesaian pelayanan.

f) Kendala/Masalah yang dihadapi

1. Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan oleh agen atau operator alat angkut sehingga proses verifikasi tidak dapat segera dilakukan.
2. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen administrasi yang mengharuskan petugas melakukan klarifikasi atau meminta perbaikan dokumen.
3. Meningkatnya jumlah kedatangan alat angkut kategori merah pada waktu yang bersamaan, sehingga beban kerja petugas meningkat dan berpotensi memengaruhi waktu penyelesaian pelayanan.
4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama pada jam operasional tertentu atau ketika terjadi peningkatan volume pelayanan.

5. Gangguan pada sistem informasi atau jaringan internet, yang dapat menghambat proses input data, verifikasi, dan penerbitan dokumen.
6. Diperlukannya pemeriksaan atau tindakan kekarantinaan lanjutan terhadap alat angkut yang memiliki faktor risiko kesehatan, sehingga waktu penyelesaian layanan menjadi lebih lama.
7. Koordinasi dengan instansi atau pihak terkait yang belum optimal, terutama apabila diperlukan konfirmasi data atau tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

g) Pemecahan Masalah

Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan agen atau operator alat angkut untuk memastikan kelengkapan dokumen, optimalisasi proses verifikasi awal, pengaturan sumber daya manusia sesuai beban pelayanan, peningkatan pemanfaatan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap waktu penyelesaian layanan. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dan peningkatan kompetensi petugas agar proses penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan bagi alat angkut kategori merah dapat diselesaikan sesuai standar waktu kurang dari 2 × 24 jam.

h) Efisiensi penggunaan sumber daya

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n PAKi \times CKi} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

CKi : % Capaian Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

Sedangkan untuk menentukan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini sangat efisien, karena tidak memerlukan upaya tambahan dalam tindak lanjut rekomendasi. Kegiatan difokuskan pada pemantauan dan pemeliharaan tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

IKD 33.1.3 Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance

a) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

b) Pengertian

Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK (Balai/Instansi Kekarantinaan Kesehatan) dalam prinsip *Zero Tolerance* adalah setiap bentuk tindakan penyimpangan, penyalahgunaan jabatan, atau penggunaan wewenang secara tidak sah oleh Kepala BKK yang tidak ditoleransi sedikit pun (tanpa pengecualian) dan harus ditindak secara tegas sesuai aturan hukum dan disiplin aparatur negara.

c) Definisi Operasional

Indikator ini secara spesifik mengukur ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

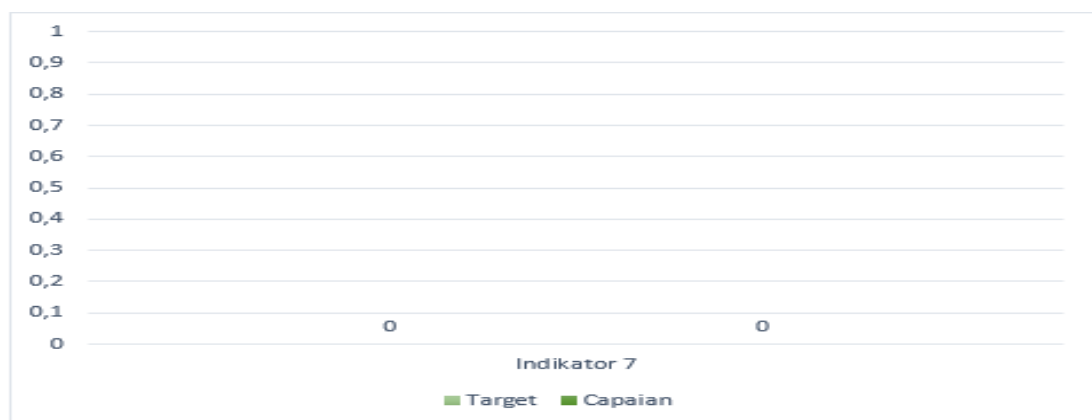
d) Cara Perhitungan

Diukur berdasarkan jumlah kasus penyalahgunaan kewenangan yang terbukti.

e) Capaian indikator Kinerja

Pada Semester I, tidak terdapat kasus penyalahgunaan kewenangan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang, sehingga capaian indikator adalah sebesar 0%. Selama tahun pelaporan tidak ditemukan maupun tidak tercatat adanya kasus penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang. Oleh karena itu, target indikator telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern, pengawasan, serta kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku.

1. Perbandingan antara realisasi dan target semester 1 tahun 2026



Grafik 29. Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 7 Tahun 2026 Semester I

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan pada Semester I Tahun 2026, berbeda dengan Tahun 2025, karena adanya perubahan Rencana Strategis (Renstra), perubahan Rencana Aksi Program (RAP) dan perubahan Rencana Aksi Kegiatan

(RAK), namun relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga kinerja Semester I Tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan Tahun 2025.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan telah menjadi suatu keharusan dan etika jabatan pejabat negara, sehingga masih dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun hasil perbandingan realisasi kinerja 2025 s.d 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2025	2026
Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	0

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (RAK)

Capaian indikator kinerja kegiatan Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* pada Semester I Tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target RAK Tahun 2025 s.d 2029 telah dapat dibandingkan meskipun indikator ini baru ditetapkan Tahun 2026 dan capaian kinerja Semester I Tahun 2026 telah dapat melampaui target setiap tahunnya. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan Target RAK pada Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2025		2026		2027	2028	2029
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	-	0	0	0	0	0

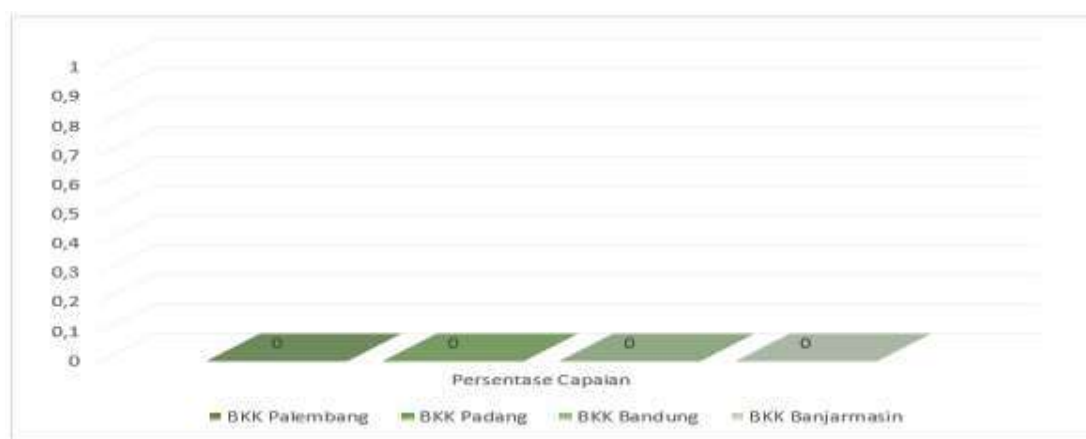
Indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK (Zero Tolerance) memiliki target 0 (nol) pada tahun 2025 dan dipertahankan hingga tahun 2029. Penetapan target tersebut menunjukkan komitmen organisasi untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, realisasi indikator tetap 0 (nol), sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa selama periode pelaporan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Balai yang memenuhi kriteria indikator.

Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan telah diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan tugas. Meskipun target telah tercapai, upaya pencegahan melalui penguatan pengawasan internal, penerapan budaya integritas, pengendalian gratifikasi, serta peningkatan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku perlu terus dilakukan agar kondisi zero tolerance dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan satker lain yang sejenis



Grafik 30. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 7 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin Tahun 2026 semester 1

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja semester 1 indikator 7 antara BKK Kelas I Palembang dengan BKK lainnya sama yaitu adalah persentase capaian kinerja BKK Palembang I sebesar **0** sama seperti dari BKK Padang, BKK Bandung dan BKK Banjarmasin sebesar **0**.

f) Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator

- Mendorong penerapan prinsip integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pengawasan internal secara berkala
- Sosialisasi kode etik dan peraturan perundang-undangan kepada pegawai
- Penguatan budaya kerja yang transparan dan berintegritas

g) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian indikator sebesar 100% dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menjaga integritas serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan internal yang berjalan dengan baik turut mendukung tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

h) Kendala/Masalah yang dihadapi

- a. Tidak terdapat kendala signifikan pada periode pelaporan
- b. Namun demikian, potensi risiko tetap ada apabila pengawasan dan pengendalian internal tidak dilaksanakan secara konsisten

i) Pemecahan Masalah

- a. Mempertahankan dan meningkatkan pengawasan internal
- b. Meningkatkan sosialisasi terkait integritas dan anti penyalahgunaan kewenangan
- c. Mendorong pelaporan melalui mekanisme pengaduan apabila terdapat indikasi pelanggaran

i) Efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini relatif efisien, karena dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan pembinaan yang telah menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja merupakan wujud konkret dari pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan keuangan, seperti DIPA atau RKA-K/L. Realisasi belanja menunjukkan seberapa besar dana yang telah digunakan oleh satuan kerja dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi belanja menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas penyerapan anggaran. Realisasi belanja tidak hanya menggambarkan aspek administratif penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi ukuran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Tingkat realisasi yang baik menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mendukung tercapainya output dan outcome organisasi sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan nilai manfaat

bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan anggaran pada Semester I Tahun 2026, adapun alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Per Satker

Realisasi belanja per satuan kerja (satker) adalah jumlah dana yang telah digunakan oleh satker dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan di DIPA dalam periode tertentu. Dengan kata lain, realisasi belanja per satker menggambarkan tingkat pelaksanaan anggaran di level unit kerja pelaksana, bukan secara keseluruhan kementerian atau lembaga. Nilai total pagu anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp18.332.808.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp13.541.975.000, Belanja Barang sebesar Rp4.672.672.000, dan Belanja Modal sebesar Rp118.161.000. Pagu anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai sebesar 73,87% dari total pagu anggaran dan pagu anggaran terendah berasal dari Belanja Modal sebesar 0,64% dari total pagu anggaran.

Realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp8.419.195.727 atau mencapai 45,92% dari total pagu anggaran. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp6.772.547.521 atau 50,01% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.646.648.206 atau 35,24% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggarannya. Persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Modal.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Per Satker Tahun 2026 Semester 1

NO.	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
1	416094 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	PAGU	Rp 13,541,975,000	Rp 4,672,672,000	Rp 118,161,000	Rp 18,332,808,000
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		REALISASI	Rp 6,772,547,521	Rp 1,646,648,206	Rp -	Rp 8,419,195,727
		%	50.01%	35.24%	0.00%	45.92%
		SISA	Rp 6,769,427,479	Rp 3,026,023,794	Rp 118,161,000	Rp 9,913,612,273

Pada tahun 2026 terdapat blokir Automatic Adjustment (AA) tentang Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 sebesar Rp908.004.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp0, Belanja Barang sebesar Rp884.372.000, dan Belanja Modal sebesar Rp23.632.000. Komposisi

persentase nilai total blokir sebesar 4,95% dari nilai total pagu anggaran dengan rincian nilai blokir Belanja Pegawai sebesar 0,00% dari anggarannya, nilai blokir Belanja Barang sebesar 18,93% dari anggarannya, dan nilai blokir Belanja Modal sebesar 20,00% dari anggarannya. Pada tanggal 07 April 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja Program Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Intensif dan Percepatan Terhadap Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Tahun 2026 telah dilakukan Buka Blokir Kegiatan Layanan Kesehatan Haji sebesar Rp292.315.000. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas Presiden dan/atau menambah kegiatan utama sesuai perjanjian PHLN/SBSN, kegiatan utama yang mendukung penerimaan negara (PNBP), dan kegiatan utama yang meningkatkan layanan BLU telah dilakukan Buka Blokir Kode A sebesar Rp. 615.689.000,- Sehingga pada akhir periode bulan Juni, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang tidak memiliki pagu blokir.

2. Realisasi per Indikator

Tabel 9. Realisasi Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026 Semester 1

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			RUPIAH	%
1	Persentase Pintu Masuk Yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	Rp. 2.366.796.000	Rp. 630.167.185	26,63%
2	Nilai SAKIP	Rp. -	Rp. -	0,00%
3	Nilai Kinerja Anggaran	Rp. 15.966.012.000	RP.7.789.028.542	48,79%
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	Rp. -	Rp. -	0,00%
5	Persentase Realisasi Anggaran	Rp. -	Rp. -	0,00%
6	Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Alat Angkut Dalam Kategori Merah Kurang Dari 2x24 Jam	Rp. -	Rp. -	0,00%
7	Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	Rp. -	Rp. -	0,00%

Laporan realisasi keuangan dan capaian indikator kinerja untuk 7 program/kegiatan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Palembang terdapat 5 indikator yang tidak ada pembiayaan atau pagu anggaran karena tidak dialokasikan secara langsung.

Rincian Per Indikator Kinerja

1. Persentase Pintu Masuk Yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah
Kegiatan deteksi penyakit di pintu masuk (pelabuhan/bandara/PLBN) ini telah menyerap dana sebesar Rp. 630.167.185,- atau sebesar 26,63% dari total anggaran yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.736.628.815,- belum terealisasi.
2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Merupakan indikator kinerja pelaporan yang sifatnya non-anggaran
3. Nilai Kinerja Anggaran
Merupakan alokasi anggaran terbesar dan Penyerapan anggaran untuk kinerja semester I tahun 2026 telah mencapai Rp. 7.789.028.542, atau sebesar 48,79%.
4. persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti
Indikator pengawasan dan kepatuhan audit internal tidak memiliki alokasi pagu khusus
5. Persentase Realisasi Anggaran
Merupakan indikator persentase tolok ukur penyerapan anggaran dan kinerja, sehingga tidak dialokasikan dana secara terpisah di tahun 2026
6. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Alat Angkut Dalam Kategori Merah Kurang Dari 2x24 Jam
Indikator standar pelayanan publik (SOP) kekarantinaan kesehatan alat angkut, tidak ditemukan alat angkut dengan katagori merah kurang dari 2x24 jam sepanjang semester I tahun 2026 di BKK Kelas I Palembang
7. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance
Indikator ini tidak memerlukan pembiayaan khusus karena integritas pimpinan *zero tolerance* terhadap korupsi/penyalahgunaan wewenang

3. Realisasi per RO

Tabel 10. Realisasi Per RO

NO.	KRO - RO	URAIAN RO	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SISA ANGGARAN (Rp)
1	7960.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	152.934.000	49.253.142	32,21	103.680.858
2	7960.QAA.001	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	83.126.000	2.983.038	3,59	80.142.962
3	7960.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	270.862.000	74.616.789	27,55	196.245.211
4	7960.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	322.121.000	72.893.000	22,63	249.228.000
5	7960.QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	16.500.000	6.796.000	41,19	9.704.000
6	7960.QAH.U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	61.600.000	7.920.000	12,86	53.680.000
7	7960.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	24.520.000	1.610.500	6,57	22.909.500
8	7960.QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES dan Leptospirosis	117.240.000	12.804.212	10,92	104.435.788
9	7960.QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	7.712.000	507.600	6,58	7.204.400
10	7960.QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	18.000.000	2.659.000	14,77	15.341.000
11	7960.QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	27.520.000	680.000	2,47	26.840.000
12	7960.QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	18.020.000	2.730.000	15,15	15.290.000
13	7960.QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	15.768.000	510.000	3,23	15.258.000
14	7960.QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	65.460.000	11.397.600	17,41	54.062.400
15	7960.QAH.U19	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	66.000.000	0	-	66.000.000
16	7960.QAH.U20	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	13.580.000	1.530.000	11,27	12.050.000
17	7960.QAH.U21	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria Skala Besar	6.280.000	0	-	6.280.000
18	7960.QAH.U25	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Dalam Kota	318.250.000	309.608.000	97,28	8.642.000
19	7960.QAH.U28	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Dalam Kota	290.700.000	0	-	290.700.000
20	7960.QAH.U34	Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Kecil Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	61.770.000	30.780.000	49,83	30.990.000
21	7960.QAH.U38	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan Jarak Dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	13.600.000	1.440.000	10,59	12.160.000
22	7960.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	395.233.000	39.448.304	9,98	355.784.696
23	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	15.966.012.000	7.789.028.542	48,79	8.176.983.458
TOTAL			18.332.808.000	8.419.195.727	45,92	26.752.003.727

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran sampai dengan periode laporan ini telah mencapai 45,92%, yaitu sebesar Rp. 8.419.195.727 dari total anggaran Rp. 18.332.808.000. Penyerapan anggaran terbesar berasal dari Layanan

Perkantoran, karena memiliki alokasi dana paling besar, yaitu Rp.15.966.012.000, dengan realisasi sebesar 48,79%.

Pada kegiatan kekarantinaan, Layanan Kesehatan Haji pada Masa Embarkasi Dalam Kota menunjukkan kinerja yang sangat baik. Anggaran yang telah digunakan mencapai 97,28%, sehingga hanya tersisa sekitar Rp.8.642.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pelayanan kesehatan haji pada tahap keberangkatan telah selesai dilaksanakan. Selain itu, Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan penyerapan anggaran hampir mencapai 50%.

Meskipun demikian, masih ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya rendah dan perlu dipercepat. Beberapa program surveilans penyakit baru menyerap anggaran di bawah 10%, seperti survei faktor risiko Malaria (2,47%), survei HIV/AIDS (3,23%), dan pelayanan kesehatan rutin di pintu masuk pelabuhan/bandara (3,59%). Selain itu, Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan juga baru menyerap 9,98% dari anggaran sebesar Rp.395.233.000. Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat kesiapan sarana dan kelancaran pelayanan kesehatan di lapangan.

Selain itu, terdapat tiga kegiatan yang hingga saat ini belum menyerap anggaran sama sekali (0%). Untuk Layanan Kesehatan Haji pada Masa Debarkasi, kondisi tersebut masih wajar karena pelaksanaannya menunggu jadwal kepulangan jemaah haji. Namun, untuk Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan dan Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria, akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Balai Kekarantinaan Kesehatan Palembang telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan target yang ditetapkan. Sasaran tersebut diatas dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menitikberatkan pada pengendalian penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara atau wilayah sesuai dengan tupoksi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan

- 1) Pencapaian Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan kelas I Palembang tahun 2026 semester I target dan realisasi dengan 7 Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Persentase penyakit dipintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah dengan realisasi capaian 100% dari target 76% yang ditetapkan sehingga persentase capaian 131,57%.
 - b. Nilai SAKIP dengan realisasi capaian 89,75 dari target sebesar 83 yang ditetapkan sehingga persentase capaian 108,13%
 - c. Nilai kinerja anggaran dengan realisasi capaian 63,28% dari target yang ditetapkan sebesar 30% sehingga persentase capaian 210,93%
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan realisasi capaian 100% dari 95% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian 105,26%
 - e. Persentase Realisasi Anggaran dengan realisasi capaian 45,92% dari 45% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian 102,11%
 - f. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2 x 24 Jam dengan realisasi capaian 100% dari 95% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian 105,26%
 - g. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance dengan realisasi capaian 0 dari target yang ditetapkan sebesar 0 sehingga persentase capaian sebesar 100%
- 2) Seluruh indikator BKK Palembang telah mencapai target
- 3) Realisasi Anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Palembang Pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp 18.332.808.000,- dari pagu total sebesar Rp. 18.332.808.000,- dengan persentase sebesar 45,92% dengan sisa anggaran Rp. 9.913.612.273,-.

B. TINDAK LANJUT

Berikut ini rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
2. Melibatkan pimpinan untuk komitmen bersama khususnya dalam ketercapaian output kegiatan di seluruh wilayah kerja BKK Palembang dan penyerapan anggaran pagu TA 2026.
3. Meningkatkan jejaring kerja dengan pengguna jasa pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.

LAMPIRAN

Matriks Keselarasan Indikator Kinerja TA 2026
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Kementerian Kesehatan				Ditjen Penanggulangan Penyakit			BKK Kelas I Palembang			Kegiatan										Anggaran	
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator KRO	Volume/ Satuan	No	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	PJ Kegiatan	Jumlah	Sumber		
1.	Sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif	Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan	Nilai Kapasitas IHR dalam JEE	1.	Program Sistem Ketahanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Persentase Faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko	Koordinasi pelayanan kekarantinaan di Pintu masuk negara dan wilayah	16 Kegiatan	A	Koordinasi LS/LP Timker Di Wilayah Kerja	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan deteksi faktor	Jumlah Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Timker 1	Rp10.404.000	PNBP		
													B	Rapat Dalam Kantor Dengan LS/LP Terkait Hygiene Sanitasi	Meningkatnya pengawasan hygiene sanitasi di wilayah kerja	Jumlah rapat koordinasi hygiene sanitasi yang dilaksanakan	Timker 3	Rp13.950.000	PNBP		
													C	Koordinasi Penguatan Pengamanan Pangan di Bandara dan Pelabuhan	Meningkatnya keamanan pangan di pintu masuk	Jumlah kegiatan pengawasan/pembinaan keamanan pangan	Timker 3	Rp13.950.000	PNBP		
													D	Rapat Kerja Bandara Sehat di Pos Bandara SMB II Palembang	Meningkatnya implementasi program bandara sehat	Jumlah kegiatan rapat kerja bandara sehat yang dilaksanakan	Timker 3	Rp22.500.000	PNBP		
													E	Rapat Persiapan Pelabuhan Sehat di Wilker Boombaru Palembang	Meningkatnya kesiapan pelaksanaan pelabuhan sehat	Jumlah kegiatan rapat persiapan pelabuhan sehat	Timker 3	Rp22.500.000	PNBP		
													F	Pertemuan Jejaring Kerja Surveilans Epidemiologi LS	Meningkatnya koordinasi surveilans epidemiologi lintas sektor	Jumlah pertemuan jejaring surveilans epidemiologi yang dilaksanakan	Timker 1	Rp14.230.000	PNBP		
													G	Rapat Koordinasi Persiapan, Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Meningkatnya kesiapsiagaan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan pada kegiatan haji	Jumlah rapat koordinasi persiapan embarkasi dan debarkasi haji	Timker 4	Rp52.700.000	PNBP		
													H	Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan haji	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan embarkasi dan debarkasi haji	Timker 4	Rp2.700.000	PNBP		
											Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	25 Layanan	A	Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan	Meningkatnya pengawasan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan penyeberangan	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai standar	Timker 2	Rp16.500.000	PNBP		
											Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara	70 Layanan	A	Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	Meningkatnya pengawasan kekarantinaan kesehatan di bandar udara	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai standar	Timker 2	Rp61.600.000	PNBP		
											Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	20 Layanan	A	Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	Meningkatnya pengendalian faktor risiko penyakit DBD di wilayah kerja	Persentase faktor risiko DBD yang dikendalikan	Timker 3	Rp24.520.000	PNBP		

Matriks Keselarasan Indikator Kinerja TA 2026
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Kementerian Kesehatan				Ditjen Penanggulangan Penyakit			BKK Kelas I Palembang			Kegiatan										Anggaran	
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator KRO	Volume/ Satuan	No	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	PJ Kegiatan	Jumlah	Sumber		
											Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis	40 Layanan	A	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit PES dan Leptospirosis	Meningkatnya deteksi dini faktor risiko penyakit PES dan leptospirosis	Persentase lokasi yang dilakukan survei faktor risiko	Timker 3	Rp117.240.000	PNBP		
											Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	16 Layanan	A	Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	Meningkatnya pengendalian faktor risiko penyakit diare	Persentase faktor risiko diare yang dikendalikan	Timker 3	Rp7.712.000	PNBP		
											Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	50 Layanan	A	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	Meningkatnya deteksi dini faktor risiko penyakit DBD	Persentase lokasi yang dilakukan survei faktor risiko	Timker 3	Rp18.000.000	PNBP		
											Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	16 Layanan	A	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	Meningkatnya deteksi dini faktor risiko penyakit malaria	Persentase lokasi yang dilakukan survei faktor risiko	Timker 3	Rp27.520.000	PNBP		
											Layanan survei faktor risiko penyakit diare	34 Layanan	A	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	Meningkatnya deteksi dini faktor risiko penyakit diare di wilayah kerja	Persentase lokasi yang dilakukan survei faktor risiko diare	Timker 3	Rp18.020.000	PNBP		
											Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS	12 Layanan	A	Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian HIV/AIDS	Meningkatnya pengendalian faktor risiko HIV/AIDS di wilayah kerja	Persentase faktor risiko HIV/AIDS yang dikendalikan	Timker 1	Rp15.768.000	PNBP		
											Layanan survei faktor risiko penyakit TB	12 Layanan	A	Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	Meningkatnya deteksi dini faktor risiko penyakit TB	Persentase lokasi yang dilakukan survei faktor risiko TB	Timker 4	Rp65.460.000	PNBP		
											Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Pelabuhan	100 Layanan	A	Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	Meningkatnya pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	Persentase faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pelabuhan	Timker 2	Rp66.000.000	PNBP		
											Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	14 Layanan	A	Pelaksanaan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	Meningkatnya deteksi kasus malaria pada pelaku perjalanan	Persentase pelaku perjalanan yang dilakukan skrining malaria	Timker 1	Rp13.580.000	PNBP		
											Layanan kesehatan haji pada masa embarkasi dalam kota	19 Layanan	A	Pelaksanaan Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Dalam Kota	Meningkatnya pelayanan kesehatan jamaah haji pada masa embarkasi	Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Timker 4	Rp318.250.000	PNBP		
											Layanan kesehatan haji pada masa debarkasi dalam kota	19 Layanan	A	Pelaksanaan Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Dalam Kota	Meningkatnya pelayanan kesehatan jamaah haji pada masa debarkasi	Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Timker 4	Rp290.700.000	PNBP		

Matriks Keselarasan Indikator Kinerja TA 2026
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Kementerian Kesehatan				Ditjen Penanggulangan Penyakit			BKK Kelas I Palembang			Kegiatan										Anggaran	
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator KRO	Volume/ Satuan	No	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	PJ Kegiatan	Jumlah	Sumber		
											Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	71 Layanan	A	Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Kecil Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus	Persentase kejadian situasi khusus yang ditangani sesuai standar	Timker 4	Rp61.770.000	PNBP		
											Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	20 Layanan	A	Pelaksanaan Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan Jarak Dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	Meningkatnya penanganan kegawatdaruratan kesehatan di wilayah kerja	Persentase kasus kegawatdaruratan yang ditangani sesuai standar	Timker 4	Rp13.600.000	PNBP		
											Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria skala besar	4 Layanan	A	Pelaksanaan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria Skala Besar	Meningkatnya deteksi dini kasus malaria pada pelaku perjalanan	Persentase pelaku perjalanan yang diskринing malaria	Timker 1	Rp6.280.000	PNBP		
											Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	6 Layanan	A	Pemeriksaan Lingkungan Pra/Embarkasi/Debarkasi	Meningkatnya kualitas lingkungan pada kegiatan embarkasi dan debarkasi	Persentase lokasi yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	Timker 1	Rp58.638.000	PNBP		
													B	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan (Kualitas Air, Limbah, Makanan, Udara, Sanitasi Bangunan/Gedung)	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan di wilayah kerja	Persentase hasil pemeriksaan yang memenuhi baku mutu kesehatan	Timker 3	Rp121.300.000	PNBP		
													C	Uji Resistensi Insektisida di Wilayah Kerja	Meningkatnya efektivitas pengendalian vektor penyakit	Persentase lokasi dengan hasil uji resistensi yang ditindaklanjuti	Timker 3	Rp11.204.000	PNBP		
													D	Pengolahan Limbah Medis	Meningkatnya pengelolaan limbah medis sesuai standar	Persentase limbah medis yang dikelola sesuai ketentuan	Timker 4	Rp11.988.000	PNBP		
													E	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan Pada Masa Pra/Embarkasi/Debarkasi	Meningkatnya keamanan pangan pada kegiatan embarkasi dan debarkasi	Persentase penjamah makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Timker 4	Rp8.680.000	PNBP		
													F	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan	Meningkatnya keamanan pangan di wilayah kerja	Persentase penjamah makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Timker 4	Rp59.052.000	PNBP		
											Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	8 Layanan	A	Pemeriksaan Deteksi Dini HIV/AIDS di Wilker	Meningkatnya deteksi dini HIV/AIDS pada pelaku perjalanan	Persentase pelaku perjalanan yang dilakukan deteksi dini HIV/AIDS	Timker 1	Rp24.702.000	PNBP		

Matriks Keselarasan Indikator Kinerja TA 2026
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Kementerian Kesehatan				No	Ditjen Penanggulangan Penyakit			BKK Kelas I Palembang				Volume/ Satuan	Kegiatan					Anggaran	
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator KRO		No	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	PJ Kegiatan	Jumlah	Sumber
													B	Penanganan Alat Angkut, Orang dan Barang pada Situasi Potensi KLB/Wabah/KKM	Meningkatnya penanganan faktor risiko pada situasi KLB/Wabah/KKM	Persentase penanganan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Timker 2	Rp16.800.000	PNBP
													C	Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah/KKM	Meningkatnya ketepatan dan kecepatan penyelidikan epidemiologi	Persentase kejadian yang dilakukan penyelidikan epidemiologi sesuai standar	Timker 1	Rp23.736.000	PNBP
													D	Pemeriksaan Deteksi Dini TB di Wilker	Meningkatnya deteksi dini TB pada pelaku perjalanan	Persentase pelaku perjalanan yang dilakukan deteksi dini TB	Timker 4	Rp51.630.000	PNBP
													E	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Pelabuhan Tanjung Api - Api	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan	Tersusunnya dokumen rencana kontinjensi pelabuhan	Timker 1	Rp43.675.000	PNBP
													F	Pelaksanaan Pengawasan Dalam Rangka Situasi Khusus	Meningkatnya pengawasan pada situasi khusus kesehatan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar	Timker 4	Rp102.950.000	PNBP
													G	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fungsi BKK ke Pusat	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dengan pusat	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	Timker 1	Rp40.016.000	PNBP
													H	Konsultasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dari Wilker ke Induk	Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan tugas antar unit kerja	Jumlah kegiatan konsultasi yang dilaksanakan	Timker 1	Rp18.612.000	PNBP
											Pelayanan kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	1800 Orang	A	Verifikasi RS / Klinik yang Menerbitkan ICV	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan penerbit ICV	Persentase RS/Klinik yang memenuhi standar penerbitan ICV	Timker 4	Rp66.464.000	PNBP
													B	Pengawasan RS / Klinik yang Menerbitkan ICV	Meningkatnya kepatuhan RS/Klinik dalam penerbitan ICV	Persentase RS/Klinik yang diawasi sesuai standar	Timker 4	Rp16.662.000	PNBP
											Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	5 paket	A	Bahan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan dukungan operasional pelayanan	Ketersediaan bahan pelayanan sesuai kebutuhan	Timker 4	Rp42.415.000	PNBP
													B	Bahan Laboratorium Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan bahan laboratorium	Ketersediaan bahan laboratorium sesuai standar	Timker 4	Rp79.590.000	PNBP

Matriks Keselarasan Indikator Kinerja TA 2026
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Kementerian Kesehatan				Ditjen Penanggulangan Penyakit			BKK Kelas I Palembang			Kegiatan										Anggaran	
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator KRO	Volume/ Satuan	No	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	PJ Kegiatan	Jumlah	Sumber		
													C	Sarana dan Prasarana Kekarantinaan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kekarantinaan kesehatan	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai	Timker 2	Rp51.976.000	PNBP		
													D	Sarana dan Prasarana Pengendalian Risiko Lingkungan	Meningkatnya ketersediaan sarana pengendalian risiko lingkungan	Persentase sarana pengendalian risiko lingkungan yang tersedia sesuai	Timker 3	Rp202.993.000	PNBP		
													E	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Pelayanan dan Pendukung Kekarantinaan Kesehatan	Meningkatnya fungsi dan kesiapan alat pelayanan kekarantinaan kesehatan	Persentase alat yang berfungsi baik dan siap digunakan	Timker 2	Rp18.259.000	PNBP		
2.	Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	2.	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Unit Kerja	Nilai SAKIP			A	Pengumpulan data dukung penilaian komponen SAKIP	Meningkatnya kualitas laporan	Laporan kinerja dikumpulkan tepat waktu	Subbag Adum				
							Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit			Nilai Kinerja Anggaran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Terpenuhinya hak pegawai secara tepat waktu	Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	Subbag Adum	Rp13.110.649.000	RM		
													B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	Terpenuhinya hak pegawai PPPK secara tepat waktu	Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK tepat waktu	Subbag Adum	Rp431.326.000	RM		
													C	Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Terjaganya kondisi gedung dan kantor yang layak operasional	Persentase gedung/kantor dalam kondisi baik	Subbag Adum	Rp129.270.000	RM		
													D	Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terjaganya fungsi peralatan kantor	Peralatan kantor yang berfungsi baik	Subbag Adum	Rp38.985.000	RM		
													E	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/4	Terjaganya kesiapan operasional kendaraan dinas	Persentase kendaraan dinas yang siap operasional	Subbag Adum	Rp74.475.000	RM		
													F	Langganan Daya dan Jasa	Terpenuhinya kebutuhan daya dan jasa operasional	Persentase ketersediaan layanan daya dan jasa	Subbag Adum	Rp545.349.000	RM		
													G	Sewa Gedung Kantor Wilker	Terpenuhinya sarana kerja wilayah kerja	Persentase ketersediaan gedung kantor wilker	Subbag Adum	Rp50.000.000	RM		
													H	Operasional Perkantoran	Mendukung kelancaran operasional perkantoran	Persentase dukungan operasional yang terpenuhi	Timker 5	Rp159.350.000	RM		

Matriks Keselarasan Indikator Kinerja TA 2026
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Kementerian Kesehatan				No	Ditjen Penanggulangan Penyakit			BKK Kelas I Palembang					Kegiatan				Anggaran	
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator KRO	Volume/ Satuan	No	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	PJ Kegiatan	Jumlah
												I	Tenaga Outsourcing	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung operasional	Persentase tenaga outsourcing yang tersedia sesuai kebutuhan	Timker 5	Rp1.296.408.000	RM
												J	Pelaksana Pengelola Satker	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi satker	Persentase pelaksanaan pengelolaan satker sesuai ketentuan	Subbag Adum	Rp130.200.000	RM
									Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti			A	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Meningkatnya kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan BPK	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti tepat waktu	Subbag Adum		
									Persentase Realisasi Anggaran			A	Pelaksanaan dan pengendalian anggaran	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase realisasi anggaran sesuai target	Subbag Adum		
									Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam			A	Pelayanan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan alat angkut	Meningkatnya kecepatan pelayanan dokumen kekarantinaan kesehatan	Persentase dokumen yang diterbitkan sesuai standar waktu (<2x24 jam)	Timker 2		
									Penyalahgunaan kewenangan kepala BKK zero tolerance			A	Pengawasan internal dan pengendalian gratifikasi	Meningkatnya integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Persentase kasus penyalahgunaan kewenangan yang ditindaklanjuti	Subbag Adum		

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Palembang



EMMILYA ROSA, SKM, MKM
NIP 197305251997032001

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emmilya Rosa

Jabatan : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murti Utami

Jabatan : Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

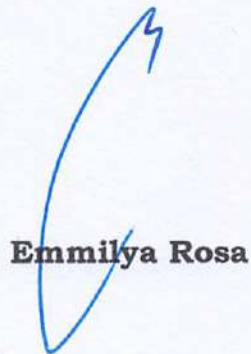
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,


Murti Utami

Pihak Pertama,


Emmilya Rosa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 3: Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	IT 3 International Health Regulations (IHR) score**	
	Sasaran Program: Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	IKP 24.2 Persentase Faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan**	
		IKK 24.2.1 Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%
II	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.05.WA Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKM 33.1.1 Nilai SAKIP	83 (Nilai)
		IKM 33.2 Nilai Kinerja Anggaran	92,75 (Nilai)
		IKM 33.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%
		IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran	96%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKD 33.1.2 Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95%
		IKD 33.1.3 Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK <i>zero tolerance</i>	0 penyalahgunaan

Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory Program Dukungan Manajemen

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
2. Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan

Total Anggaran DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

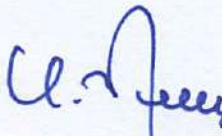
Anggaran

Rp. 15.966.012.000,-

Rp. 2.366.796.000,-

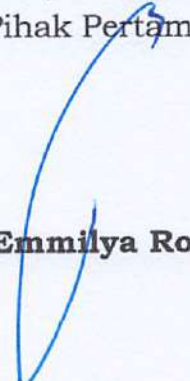
Rp. 18.332.808.000,-

Pihak Kedua,


Murti Utami

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,


Emmilya Rosa

Perhitungan Akumulasi IKK 24.2.1

IKK 24.2.1:
Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah (RPJMN)

Definisi Operasional:
Jumlah pintu masuk negara (pelabuhan/bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah

Target:

2025	2026	2027	2028	2029
73%	76%	79%	82%	85%

Cara Perhitungan:

Jumlah pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah

seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik

X 100%

Induk atau Wilayah Kerja	Jumlah Pengawasan Alat Angkut	Jumlah Pengawasan Orang	Jumlah Pengawasan Barang	Jumlah Pengawasan Lingkungan	Alat Angkut Ya	Orang Ya	Barang Ya	Lingkungan Ya	Jumlah Ya	Capaian Ya	Status
Pelabuhan Tanjung Api-Api	2.859	147.155	16	138	3	3	3	3	12	3	Tercapai
Pelabuhan Sungai Lumpur	2.096	10.183	701	17	3	3	3	3	12	3	Tercapai
Pelabuhan Boom Baru Palembang <i>*Data sudah digabungkan dengan Bandar Udara Silampari</i>	7.709	85.624	3.238	296	3	3	3	3	12	3	Tercapai
Induk : SMB II	705.090	702.609	30	586	3	3	3	3	12	3	Tercapai
Total	717.754	945.571	3.985	1.037	12	12	12	12	48	12	

Capaian = 100% Tercapai

Target Tahun 2026 76%
Capaian s/d Juni 2026 100%



Jumlah Tercapai

4

Jumlah Tidak Tercapai

0

Pintu Masuk, Bandara, Pelabuhan,

4

Bulan : Juni

MATRIK MONITORING CAPAIAN INDIKATOR
BALAI KEKARANTINAN KESEHATAN KELASI I PALEMBANG TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	PJ	TARGET	JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			STATUS	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN
			2026	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	76%	CAPAIAN	STATUS	TARGET	76%	CAPAIAN	STATUS	TARGET	76%	CAPAIAN	STATUS				
I	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi		76%	76%	80%		76%	80%		76%	80%		76%	25%		76%	100%		76%	100%		Tercapai			
A	IKK 24.2.1. Deteksi Faktor Risiko																								
	Induk: Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II		4,793	110,009	1		4,790	99,400	1	4,808	148,163	1	4,884	127,098	1	4,916	106,760	1	4,867	112,660	1				
a	Pemeriksaan Alat Angkut		148	345			139	221		148	316		153	366		156	367		120	250					
i	Jumlah RBA kapal dengan risiko tinggi (merah)	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ii	Jumlah RBA kapal dengan risiko sedang (kuning)	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
iii	Jumlah RBA kapal dengan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
iv	Jumlah dokumen PHQC yang diterbitkan	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
v	Jumlah dokumen COP kapal/pesawat yang diterbitkan	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
vi	Jumlah dokumen SSCC yang diterbitkan	TIMKER 2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
vii	Jumlah dokumen SSCCEC yang diterbitkan	TIMKER 2	79	143	-	-	75	106	-	80	139	-	82	160	-	85	151	-	60	64	-	-	-		
viii	Jumlah dokumen P3K kapal yang diterbitkan	TIMKER 2	38	90	-	-	34	62	-	38	80	-	40	97	-	40	99	-	30	36	-	-	-		
ix	Jumlah dokumen GCDH/GenDec yang diterbitkan	TIMKER 2	30	111	-	-	30	53	-	30	97	-	30	108	-	30	116	-	30	150	-	-	-		
x	Jumlah pemeriksaan kapal/pesawat/kendaraan darat lainnya (jumlah kapal/pesawat/kendaraan darat yang tidak diterbitkan dokumen kesehatan)	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	Pemeriksaan Orang		4,600	109,619	1		4,600	99,115	1	4,600	148,787	1	4,600	126,601	1	4,600	106,228	1	4,600	112,259	1				
i	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 1	4,600	10,196	-	-	4,600	7,186	-	4,600	6,769	-	4,600	5,588	-	4,600	5,066	-	4,600	12,106	-	-	-		
ii	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan dari daerah terjangkit (kuning)	TIMKER 1	-	9	-	-	-	21	-	-	8	-	-	-	-	-	452	-	-	367	-	-	-		
iii	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan bergelaja (merah)	TIMKER 1	-	1	-	-	-	21	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	226	-	-	-		
iv	Sentinel site ILI jumlah kasus Influenza Like Illness (ILI)	TIMKER 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
v	Jumlah pemeriksaan surveilans migrasi malaria	TIMKER 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
vi	Jumlah survei faktor risiko TB	TIMKER 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
vii	Jumlah survei faktor risiko HIV	TIMKER 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
viii	Jumlah surat keterangan laik terbang penumpang diterbitkan	TIMKER 4	12	-	-	-	11	-	-	30	-	-	28	-	-	7	-	-	13	-	-	-			
ix	Jumlah surat keterangan tidak laik terbang penumpang diterbitkan	TIMKER 4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-			
x	Jumlah orang melakukan pengujian kesehatan	TIMKER 4	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
xi	Jumlah pengawasan keberangkatan PPLN (Non Embarkasi Haji)	TIMKER 4	9,770	-	-	-	7,505	-	-	4,529	-	-	4,880	-	-	5,629	-	-	8,542	-	-	-			
xii	Jumlah pengawasan keberangkatan PPLN (Embarkasi Haji)	TIMKER 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
xiii	Jumlah pengawasan keberangkatan pelaku perjalanan domestik	TIMKER 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
xiv	Jumlah kasus penyakit menular potensial KLB/wabah lainnya (Covid-19, Varicella, Campak, PHBR, etc)	TIMKER 4	89,620	-	-	-	84,368	-	-	137,440	-	-	108,966	-	-	4,141	-	-	90,730	-	-	-			
c	Pemeriksaan Barang		2	2	1		2	11	1	2	2	1	2	2	1	2	7	1	2	6	1				
i	Jumlah surat izin angkutan penumpang/janazah/kerangka yang diterbitkan	TIMKER 2	2	2	-	-	2	11	-	2	2	-	2	2	-	2	7	-	2	6	-	-			
ii	Jumlah dokumen MTA (Material Transfer Agreement) diterbitkan	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
iii	Jumlah dokumen sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya yang diawasi	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
iv	Jumlah dokumen sertifikat kesehatan untuk OMKARA yang diawasi	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
v	Jumlah kegiatan pengawasan atau pemeriksaan barang lainnya (kargo penumpang/gabot dan akses pada alat angkut)	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
d	Pemeriksaan Lingkungan		43	43	1		49	53	1	56	88	1	129	129	1	158	158	1	145	145	1				
i	Jumlah pemeriksaan air tanah yang dilakukan	TIMKER 3	2	2	-	-	2	4	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-			
ii	Jumlah pemeriksaan laik higiein jasa boga yang dilakukan	TIMKER 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
iii	Jumlah survei kualitas air di lingkungan bandarapetabuhan/PLBN	TIMKER 3	2	2	-	-	2	4	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-			
iv	Jumlah survei kualitas udara di lingkungan bandarapetabuhan/PLBN	TIMKER 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
v	Jumlah survei kualitas tanah di lingkungan bandarapetabuhan/PLBN?	TIMKER 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
vi	Jumlah survei kualitas TPP (Tempat Pengelolaan Pangan)	TIMKER 3	20	20	-	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-	-			
vii	Jumlah survei faktor risiko malaria (Anopheles) yang dilakukan	TIMKER 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
viii	Jumlah survei faktor risiko DBD (Aedes) yang dilakukan	TIMKER 3	1	1	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	3	3	-	-			
ix	Jumlah survei faktor risiko diare (latat dan kecoak) yang dilakukan	TIMKER 3	2	2	-	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	3	3	-	3	3	-	-			
x	Jumlah survei faktor risiko pes (tikus) dilakukan	TIMKER 3	-	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	-			
xi	Jumlah inspeksi Kesehatan Lingkungan pada kegiatan embarkasi-debakasi haji dan/atau situasi khusus lainnya	TIMKER 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
xii	Jumlah pengawasan/pemeriksaan lingkungan lainnya	TIMKER 3	16	16	-	-	16	16	-	16	16	-	16	16	-	16	16	-	16	16	-	-			
2	Akumulasi Pelabuhan Boom Baru Palembang dan Pos Bandara Silampari		978	14,724	0		1,046	13,754	0	996	17,954	0	1,020	15,610	0	1,021	17,597	1	990	17,828	1				
a	Pemeriksaan Alat Angkut		2,906	30,380	1		3,092	29,448	1	2,939	36,567	1	3,017	33,046	1	769	1,451	769	1,611	1					
i	Jumlah RBA kapal dengan risiko tinggi (merah)	TIMKER 2	-	-	-	-	2	3	-	2	3	-	2	7	-	2	9	-	2	4	-	-			
ii	Jumlah RBA kapal dengan risiko sedang (kuning)	TIMKER 2	33	50	-	-	33	37	-	33	25	-	33	39	-	33	62	-	33	56	-	-			
iii	Jumlah RBA kapal dengan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 2	15	34	-	-	15	16	-	15	30	-	15	42	-	15	43	-	15	38	-	-			
iv	Jumlah dokumen PHQC yang diterbitkan	TIMKER 2	667	936	-	-	667	990	-	667	1,025	-	667	1,105	-	667	1,168	-	667	1,238	-	-			
v	Jumlah dokumen COP kapal/pesawat yang diterbitkan	TIMKER 2	50	87	-	-	50	56	-	50	63	-	50	88	-	50	114	-	50	98	-	-			
vi	Jumlah dokumen SSCC yang diterbitkan	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
vii	Jumlah dokumen SSCCEC yang diterbitkan	TIMKER 2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	19	-	1	19	-	1	109	-	-			
viii	Jumlah dokumen P3K kapal yang diterbitkan	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ix	Jumlah dokumen GCDH/GenDec yang diterbitkan	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
x	Jumlah pemeriksaan kapal/pesawat/kendaraan darat lainnya (jumlah kapal/pesawat/kendaraan darat yang tidak diterbitkan dokumen kesehatan)	TIMKER 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b	Pemeriksaan Orang		170	6,979	1		225	8,674	1	175	11,091	1	200	9,892	1	226	14,218	1	198	14,858	1				
i	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 1	150	892	-	-	150	566	-	150	638	-	150	706	-	150	920	-	150	846	-	-			
ii	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan dari daerah terjangkit (kuning)	TIMKER 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
iii	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan bergelaja (merah)	TIMKER 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
iv	Sentinel site ILI jumlah kasus Influenza Like Illness (ILI)	TIMKER 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

BALAI MONITORING CAPAIAN INDIKATOR
BALAI KEKARANTINAN KESEHATAN KELASI I PALEMBANG TAHUN 2026

No	INDIKATOR	PJ	TARGET 2026	JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN
				TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS			
b	Pemeriksaan Orang			170	8.979		225	8.674	1	175	11.001	1	200	9.692	1	200	10.546	1	175	11.176	1			
i	SSHP-AJ Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 1		150	892		150	566		150	638		150	706		150	920	1	150	846				
ii	SSHP-AJ Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan dari daerah terjangkit (kuning)	TIMKER 1																						
iii	SSHP-AJ Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tergejala (merah)	TIMKER 1																						
iv	Sentinel site ILI jumlah kasus Influenza Like illness (ILI)	TIMKER 1		-	-		50	50		-	-		50	50		50	53							
v	Jumlah pemeriksaan surveilans migrasi malaria	TIMKER 1																						
vi	Jumlah survei faktor risiko TB	TIMKER 4																						
vii	Jumlah survei faktor risiko HIV	TIMKER 1		20	23		25	62		25	21		-	-					25	25				
viii	Jumlah surat keterangan laik terbang penumpang diterbitkan	TIMKER 4																						
ix	Jumlah surat keterangan tidak laik terbang penumpang diterbitkan	TIMKER 4																						
x	Jumlah orang melakukan pengujian kesehatan	TIMKER 4																						
xi	Jumlah pengawasan keberangkatan PPLN (Non Embarkasi Haji)	TIMKER 4			1.045		787			625				862			1.036			1.029				
xii	Jumlah pengawasan keberangkatan PPLN (Embarkasi Haji)	TIMKER 4																						
xiii	Jumlah pengawasan keberangkatan pelaku perjalanan domestik	TIMKER 4			7.019		7.149			9.692				8.074			8.537			9.276				
xiv	Jumlah kasus penyakit menular potensial KLB/wabah lainnya (Covid-19, Varicella, Campak, PHBR, etc)	TIMKER 4																						
c	Pemeriksaan Barang			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.902	1	-	1.336	1			
i	Jumlah surat izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
ii	Jumlah dokumen MTA (Material Transfer Agreement) diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iii	Jumlah dokumen/sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya yang diawasi	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iv	Jumlah dokumen/sertifikat kesehatan untuk OMKABA yang diawasi	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
v	Jumlah kegiatan pengawasan atau pemeriksaan barang lainnya (kargo penumpang/obat dan akses pada alat angkut)	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
d	Pemeriksaan Lingkungan			19	19	1	26	26	1	26	26	1	26	26	1	26	26	1	23	23	1			
i	Jumlah pemeriksaan air bersih yang dilakukan	TIMKER 3			2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2				
ii	Jumlah pemeriksaan laik hygiene jasa boga yang dilakukan	TIMKER 3																						
iii	Jumlah survei kualitas air di lingkungan bandarapelaabuhan/PLBN	TIMKER 3		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2				
iv	Jumlah survei kualitas udara di lingkungan bandarapelaabuhan/PLBN	TIMKER 3																						
v	Jumlah survei kualitas tanah di lingkungan bandarapelaabuhan/PLBN?	TIMKER 3																						
vi	Jumlah survei kualitas TPP (Tempat Pengelolaan Pangan)	TIMKER 3		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4				
vii	Jumlah survei faktor risiko malaria (Anopheles) yang dilakukan	TIMKER 3																						
viii	Jumlah survei faktor risiko DBD (Aedes) yang dilakukan	TIMKER 3		1	1		3	3		3	3		3	3		3	3		3	3				
ix	Jumlah survei faktor risiko diare (salat dan kecak) yang dilakukan	TIMKER 3		2	2		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4				
x	Jumlah survei faktor risiko pes (tikus) dilakukan	TIMKER 3					3	3		3	3		3	3		3	3							
xi	Jumlah Inspeksi Kesehatan Lingkungan pada kegiatan embarkasi-debakasi haji dan/atau situasi khusus lainnya	TIMKER 3																						
xii	Jumlah pengawasan/pemeriksaan lingkungan lainnya	TIMKER 3		8	8		8	8		8	8		8	8		8	8		8	8				
3	Pelabuhan Sungai Lumpur			470	2.057	0	450	1.961	0	490	2.156	0	476	2.255	0	482	2.212	1	474	2.356	1			
a	Pemeriksaan Alat Angkut			320	399	1	300	344	1	340	380	1	318	345	1	294	318	1	315	360	1			
i	Jumlah RBA kapal dengan risiko tinggi (merah)	TIMKER 2		1	1		1	2		1	2		1	3		1	2		1	1				
ii	Jumlah RBA kapal dengan risiko sedang (kuning)	TIMKER 2		20	21		20	20		20	26		20	22		20	24		20	21				
iii	Jumlah RBA kapal dengan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 2		25	33		25	31		25	23		25	29		25	26		20	20				
iv	Jumlah dokumen PHOC yang diterbitkan	TIMKER 2		220	221		200	202		240	242		230	236		200	212		230	234				
v	Jumlah dokumen COP kapal/pesawat yang diterbitkan	TIMKER 2		46	55		46	53		46	51		46	54		46	52		41	42				
vi	Jumlah dokumen SSCC yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
vii	Jumlah dokumen SSCC yang diterbitkan	TIMKER 2		4	16		4	22		4	23		1	1		2	2		1	21				
viii	Jumlah dokumen PSK kapal yang diterbitkan	TIMKER 2		4	10		4	14		4	13		-	-		-	-		-	-				
ix	Jumlah dokumen GCDH/GenDec yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
x	Jumlah pemeriksaan kapal/pesawat/kendaraan darat lainnya (jumlah kapal/pesawat/kendaraan darat yang tidak diteliti)	TIMKER 2		150	1.690	1	150	1.617	1	150	1.776	1	150	1.910	1	150	1.461	1	150	1.721	1			
b	Pemeriksaan Orang			150	398		150	309		150	405		150	455		150	433		150	301				
i	SSHP-AJ Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 1		150	398		150	399		150	405		150	455		150	433		150	301				
ii	SSHP-AJ Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan dari daerah terjangkit (kuning)	TIMKER 1																						
iii	SSHP-AJ Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tergejala (merah)	TIMKER 1																						
iv	Sentinel site ILI jumlah kasus Influenza Like illness (ILI)	TIMKER 1																						
v	Jumlah pemeriksaan surveilans migrasi malaria	TIMKER 1																						
vi	Jumlah survei faktor risiko TB	TIMKER 4																						
vii	Jumlah survei faktor risiko HIV	TIMKER 1																						
viii	Jumlah surat keterangan laik terbang penumpang diterbitkan	TIMKER 4																						
ix	Jumlah surat keterangan tidak laik terbang penumpang diterbitkan	TIMKER 4																						
x	Jumlah orang melakukan pengujian kesehatan	TIMKER 4																						
xi	Jumlah pengawasan keberangkatan PPLN (Non Embarkasi Haji)	TIMKER 4									442			494			217			432				
xii	Jumlah pengawasan keberangkatan PPLN (Embarkasi Haji)	TIMKER 4																						
xiii	Jumlah pengawasan keberangkatan pelaku perjalanan domestik	TIMKER 4																						
xiv	Jumlah kasus penyakit menular potensial KLB/wabah lainnya (Covid-19, Varicella, Campak, PHBR, etc)	TIMKER 4																						
c	Pemeriksaan Barang			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	1	-	276	1			
i	Jumlah surat izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
ii	Jumlah dokumen MTA (Material Transfer Agreement) diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iii	Jumlah dokumen/sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya yang diawasi	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iv	Jumlah dokumen/sertifikat kesehatan untuk OMKABA yang diawasi	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
v	Jumlah kegiatan pengawasan atau pemeriksaan barang lainnya (kargo penumpang/obat dan akses pada alat angkut)	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
d	Pemeriksaan Lingkungan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	1	-	276	1			
i	Jumlah pemeriksaan air bersih yang dilakukan	TIMKER 3																						

MATRIK MONITORING CAPAIAN INDIKATOR
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELASI I PALEMBANG TAHUN 2026

Bulan : Juni

NO	INDIKATOR	PJ	TARGET 2026	JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN
				TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS	TARGET	CAPAIAN	STATUS			
i	Jumlah surat izin angkut jenazah/abtu jenazah/kerangka yang diterbitkan	TIMKER 2		2	4		2	4		2	1		1	-		3	6		1	1				
ii	Jumlah dokumen MTA (Material Transfer Agreement) diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iii	Jumlah dokumen/sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya yang diawasi	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iv	Jumlah dokumen/sertifikat kesehatan untuk OMKABA yang diawasi	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
v	Jumlah kegiatan pengawasan atau pemeriksaan barang lainnya (kargo penumpangiabot dan alkes pada alat angkut)	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
b. Pemeriksaan Lingkungan				18	18	1	25	25	1	25	25	1	26	24	1	24	24	1	22	22	1			
i	Jumlah pemeriksaan air bersih yang dilakukan	TIMKER 3		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2				
ii	Jumlah pemeriksaan laik higieine jasa boga yang dilakukan	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iii	Jumlah survei kualitas air di lingkungan bandarapelayabuhan/PLBN	TIMKER 3		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2				
iv	Jumlah survei kualitas udara di lingkungan bandarapelayabuhan/PLBN?	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
v	Jumlah survei kualitas tanah di lingkungan bandarapelayabuhan/PLBN?	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
vi	Jumlah survei kualitas TPP (Tempat Pengobatan Pangan)	TIMKER 3		4	4		4	4		4	4		3	3		3	3		4	4				
vii	Jumlah survei faktor risiko malaria (Anopheles) yang dilakukan	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
viii	Jumlah survei faktor risiko DBD (Aedes) yang dilakukan	TIMKER 3		1	1		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2				
ix	Jumlah survei faktor risiko diare (stasi dan kecok) yang dilakukan	TIMKER 3		2	2		5	5		5	5		5	5		5	5		5	5				
x	Jumlah survei faktor risiko pes (tikus) dilakukan	TIMKER 3		3	3		3	3		3	3		3	3		3	3		-	-				
xi	Jumlah Inspeksi Kesehatan Lingkungan pada kegiatan embarkasi-debakasi haji dan/atau situasi khusus lainnya	TIMKER 3		7	7		7	7		7	7		7	7		7	7		7	7				
xii	Jumlah pengawasan/pemeriksaan lingkungan lainnya	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
c. Pos Bandar Udara Silangrejo				21	4,615	0	26	3,951	0	28	5,776	0	26	4,010	0	26	3,672	0	23	3,682	0			
a. Pemeriksaan Alat Angkut				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
i	Jumlah RBA kapal dengan risiko tinggi (merah)	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
ii	Jumlah RBA kapal dengan risiko sedang (kuning)	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iii	Jumlah RBA kapal dengan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iv	Jumlah dokumen PHQC yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
v	Jumlah dokumen COP kapal/pesawat yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
vi	Jumlah dokumen SSCC yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
vii	Jumlah dokumen SSCEC yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
viii	Jumlah dokumen PSK kapal yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
ix	Jumlah dokumen GCDH/GenDec yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
x	Jumlah pemeriksaan kapal/pesawat/kendaraan darat lainnya (jumlah kapal/pesawat/kendaraan darat yang tidak diteliti)	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
b. Pemeriksaan Orang				-	4,594	1	-	3,925	1	-	5,748	1	-	3,984	1	-	3,646	1	-	3,659	1			
i	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tidak berisiko (hijau)	TIMKER 1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
ii	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan diare demam berjangkit (kuning)	TIMKER 1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iii	SSHP-AJI Indonesia - jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan bergejala (merah)	TIMKER 1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iv	Sentinel site ILI jumlah kasus influenza Like illness (ILI)	TIMKER 1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
v	Jumlah pemeriksaan surveilans migrasi malaria	TIMKER 1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
vi	Jumlah survei faktor risiko TB	TIMKER 4		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
vii	Jumlah survei faktor risiko HIV	TIMKER 1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
viii	Jumlah surat keterangan laik terbang penumpang diterbitkan	TIMKER 4		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		1		
ix	Jumlah surat keterangan tidak laik terbang penumpang diterbitkan	TIMKER 4		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
x	Jumlah orang melakukan pengujian kesehatan	TIMKER 4		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
xi	Jumlah pengawasan keberangkatan PPLN (Non Embarkasi Haji)	TIMKER 4		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
xii	Jumlah pengawasan keberangkatan PPLN (Embarkasi Haji)	TIMKER 4		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
xiii	Jumlah pengawasan keberangkatan pelaku perjalanan domestik	TIMKER 4		4,594	-		3,925	-		5,748	-		3,984	-		3,646	-		3,658	-				
xiv	Jumlah kasus penyakit menular potensial KLB/abah lainnya (Covid-19, Varicella, Campak, PHBR, etc)	TIMKER 4		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
c. Pemeriksaan Barang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
i	Jumlah surat izin angkut jenazah/abtu jenazah/kerangka yang diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
ii	Jumlah dokumen MTA (Material Transfer Agreement) diterbitkan	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iii	Jumlah dokumen/sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya yang diawasi	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iv	Jumlah dokumen/sertifikat kesehatan untuk OMKABA yang diawasi	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
v	Jumlah kegiatan pengawasan atau pemeriksaan barang lainnya (kargo penumpangiabot dan alkes pada alat angkut)	TIMKER 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
d. Pemeriksaan Lingkungan				21	21	1	26	26	1	28	28	1	26	26	1	26	26	1	23	23	1			
i	Jumlah pemeriksaan air bersih yang dilakukan	TIMKER 3		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2				
ii	Jumlah pemeriksaan laik higieine jasa boga yang dilakukan	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
iii	Jumlah survei kualitas air di lingkungan bandarapelayabuhan/PLBN	TIMKER 3		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2				
iv	Jumlah survei kualitas udara di lingkungan bandarapelayabuhan/PLBN?	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
v	Jumlah survei kualitas tanah di lingkungan bandarapelayabuhan/PLBN?	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
vi	Jumlah survei kualitas TPP (Tempat Pengobatan Pangan)	TIMKER 3		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4				
vii	Jumlah survei faktor risiko malaria (Anopheles) yang dilakukan	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
viii	Jumlah survei faktor risiko DBD (Aedes) yang dilakukan	TIMKER 3		1	1		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2				
ix	Jumlah survei faktor risiko diare (stasi dan kecok) yang dilakukan	TIMKER 3		2	2		3	3		3	3		3	3		3	3		3	3				
x	Jumlah survei faktor risiko pes (tikus) dilakukan	TIMKER 3		-	-		3	3		3	3		3	3		3	3		-	-				
xi	Jumlah Inspeksi Kesehatan Lingkungan pada kegiatan embarkasi-debakasi haji dan/atau situasi khusus lainnya	TIMKER 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				
xii	Jumlah pengawasan/pemeriksaan lingkungan lainnya	TIMKER 3		10	10		10	10		10	10		10	10		10	10		10	10				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG
TAHUN 2025**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			89,75
Kategori Predikat			A

No	Catatan
1	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
2	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
3	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
4	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
5	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
6	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
7	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
8	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
9	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
10	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
11	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)
12	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)

No	Catatan Lainnya
1	

No	Rekomendasi
1	Perbanyak inovasi mengenai dibidang kebijakan / regulasi, teknologi kesehatan untuk tahun be
2	

Tim Reviu SAKIP BKK Kelas I Palembang

1.dr. Bobby Widyawati, M.Kes
NIP. 197408062006042012



2. Rudy R, SKM, M.Kes
NIP. 198603082009121003



3. dr. Artineke, M.Kes
NIP. 197708232005012008



5. Fahmi Rizal, S.Kep, Ners, M.Kes
NIP. 197712082005011004



6. Merry Natalia Panjaitan, M.Kes
NIP. 198212232009122002



**LEMBAR KERJA SELF ASSEMENT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG
TAHUN 2025**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,60	92,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	100,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,1	90,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,5	90,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	27,60	92,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	100,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,1	90,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,5	90,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,80	92,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3	100,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	4,05	90,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,75	83,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	80,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kategori Predikat			89,75	A

Evaluatan,
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG
Ketua Tim Sakip


Mira Susilawati
NIP 197906212006042002

Palembang, 21 April 2026

TIM SKI BKK KELAS I
PALEMBANG
Ketua,


Dwi Marinajati, SKM, M.Kes
NIP 198203212006042003

Ketua BKK Kelas I Palembang,

Emmilya Rosa, SKM, M.Kes
NIP 197305251997032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		27,6		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)	- Jika seluruh kriteria terpenuhi namun usia dokumen belum 1 tahun maka nilai maksimal BB - Jika hanya 5 kriteria terpenuhi maka 5/6x100% = 83% sehingga nilai maksimal B
Kriteria:					100,00	
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				1	Pedoman dan SOP Penyusunan Perencanaan Kinerja yang dimiliki satuan kerja
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				1	Tidak diwajibkan untuk satuan kerja
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				1	RAK/RSB (5 Tahun)
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				1	RKT (1 Tahun)
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				1	Rencana Aksi
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				1	RKA-K/L dan Rencana Aksi
Usia Dokumen					5 tahun	Rekapitulasi perumusan dan pentapan perencanaan
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,1	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)	- Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai maksimal BB - Jika hanya 10 kriteria terpenuhi maka 10/11x100% = 91% sehingga nilai maksimal B
Kriteria:					100,00	
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				1	RAK/RSB yang telah ditandatangani
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				1	- Bukti publikasi RSB di website - Paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan				1	Analisis IKU telah sesuai dengan tupoksi satker
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas				1	Matriks Keselarasan Tujuan/Sasaran/IKU
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria				1	Analisis IKU telah SMART (seluruh IKU)

6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	1	IKU Tahun awal RSB IKU Tahun evaluasi Dalam 1 periode IKU dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Terhadap perubahan tersebut tetap dianggap sustainabel apabila perubahan IKU yang dilakukan dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi.
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	1	Analisis target kinerja untuk kriteria achievable, menantang dan realistis
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	1	Cascading PK dengan Kontrak Kinerja Pegawai di setiap level jabatan. Dokumen yang menunjukkan hubungan keselarasan hasil yang ingin dicapai mulai Kepala Satker (IKK/PK) sampai ke staf (IKI/SKP)
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	1	Analisis RAK/RSB/RKT/RA telah menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar unit kerja kantor pusat/satuan kerja kantor daerah dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan	1	Absensi dan Notulen Rapat Perencanaan Kinerja
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	1	Absensi dan Notulen Rapat Perencanaan Kinerja

	Terdapat upaya inovatif terkait kualitas perencanaan kinerja				Dapat Dihargai	Jenis inovasi : SAKIP berupa: 1. Kebijakan/regulasi, 2. Teknologi Kesehatan 3. Teknologi Sistem Informasi, 4. Pelayanan Publik, 5. Budaya Kerja, 6. Metode Kerja/SOP, 7. MoU/perjanjian 8. Produk Prototipe Kriteria Inovasi: 1. Pembaharuan/orisinil/modifikasi 2. Memudahkan pelayanan 3. Mempercepat pelayanan 4. Disebarluaskan 5. Bermanfaat 6. Spesifik 7. Berkelanjutan 8. Solusi/upaya pemecahan masalah 9. Dapat dihargai : a) Diaplikasikan di Internal satker atau b) Diadopsi satker serumpun (inovasi RSV diadopsi RSV lain) atau c) Diadopsi satker eksternal di luar rumpun (inovasi rs diadopsi Poltekes) secara terbatas (<25% satker) 10. Percontohan Nasional : a) Diadopsi satker serumpun (90%) atau b) Diadopsi satker di luar rumpun (50%) atau c) Diadopsi satker IP lain (25%) Kategori inovasi: 1. Dapat dihargai/ diadopsi satker lain (kriteria 1-9) Nilai 0,5 2. Percontohan Nasional (kriteria 1-10) Nilai 1 3. Tidak ada inovasi Nilai 0
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	A	13,5	(Diisi catatan yang terdapat pada kriteria)	- Jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai maksimal BB - Jika hanya 7 kriteria terpenuhi maka $7/8 \times 100\% = 87,5\%$ sehingga nilai maksimal B
Kriteria:					100,00	
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				1	Rencana Aksi telah memuat anggaran per prog/kegiatan RKA-K/L
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin				1	Rencana Aksi dan bukti pelaksanaan aktivitas

KKE SUPLEMEN 1.b

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TUGAS DAN FUNGSI	HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
1b.3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN		SESUAI	SESUAI	1
		2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut , barang dan lingkungan		SESUAI		
		3	Indeks pengendalian faktor resiko pelabuhan/bandara/PLBDN		SESUAI		
		4	Nilai Kinerja anggaran		SESUAI		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		SESUAI		
		6	Kinerja implementasi WBK satker		SESUAI		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		SESUAI		
		8	Persentase realisasi anggaran		SESUAI		
					SESUAI		
					112,50		

NO KKE	URAIAN	TUJUAN/SASARAN		HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
1b.4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	1	Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	OUTCOME	MENGGAMBARAKAN HASIL	1
				100,00		

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	S	M	A	R	T	TOTAL	HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
1b.5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	1 Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1	1	1	1	1	5	SMART	SMART	1
		2 Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1	1	1	1	1	5	SMART		
		3 Indeks pengendalian faktor resiko pelabuhan/bandara/PLBDN	1	1	1	1	1	5	SMART		
		4 Nilai Kinerja anggaran	1	1	1	1	1	5	SMART		
		5 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	1	1	1	1	1	5	SMART		
		6 Kinerja implementasi WBK satker	1	1	1	1	1	5	SMART		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	1	1	1	1	1	5	SMART		
		8	Persentase realisasi anggaran	1	1	1	1	1	5	SMART		
									100,00			

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
1b.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	1	Indeks deteksi faktor risiko di	BERKELANJUTAN/TDK BERUBAH	BERKELANJUTAN/ TDK BERUBAH	1
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut , barang dan lingkungan	BERKELANJUTAN/TDK BERUBAH		
		3	Indeks pengendalian faktor resiko pelabuhan/bandara/PLBDN	BERKELANJUTAN/TDK BERUBAH		
		4	Nilai Kinerja anggaran	BERKELANJUTAN/TDK BERUBAH		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	BERKELANJUTAN/TDK BERUBAH		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	BERKELANJUTAN/TDK BERUBAH		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan	BERKELANJUTAN/TDK BERUBAH		
		8	Persentase realisasi anggaran	BERKELANJUTAN/TDK BERUBAH		
		100				

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI	
1b.7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1.	0,92	REALISTIS-DAPAT DICAPAI-MENANTANG	REALISTIS, DAPAT DICAPAI, MENANTANG	1
		2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut , barang dan lingkungan	2.	100%	REALISTIS-DAPAT DICAPAI-MENANTANG		
		3	Indeks pengendalian faktor resiko pelabuhan/bandara/PLBDN	3	0,97	REALISTIS-DAPAT DICAPAI-MENANTANG		
		4	Nilai Kinerja anggaran	4	88	REALISTIS-DAPAT DICAPAI-MENANTANG		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	5	96	REALISTIS-DAPAT DICAPAI-MENANTANG		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	6	85	REALISTIS-DAPAT DICAPAI-MENANTANG		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	7	85%	REALISTIS-DAPAT DICAPAI-MENANTANG		
		8	Persentase realisasi anggaran	8	96%	REALISTIS-DAPAT DICAPAI-MENANTANG		
					100,00			

NO KKE	URAIAN	DOKUMEN RENCANA KINERJA			KINERJA LEVEL JABATAN		HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
		INDIKATOR		TARGET	INDIKATOR	TARGET			
1b.8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1.	0,92		SELARAS	SELARAS	1
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	2.	100%		SELARAS		
		3	Indeks pengendalian faktor risiko pelabuhan/bandara/PLBDN	3	0,97		SELARAS		
		4	Nilai Kinerja anggaran	4	88		SELARAS		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	5	96		SELARAS		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	6	85		SELARAS		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	jabatan (Cascading).	7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	7	85%			SELARAS		
		8	Persentase realisasi anggaran	8	96%			SELARAS		

NO KKE	URAIAN	SIMPULAN		NILAI
1b.9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	SUDAH MEMBERIKAN INFORMASI MENYELURUH		1

KKE SUPLEMEN 1.c

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		ALOKASI ANGGARAN		HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
1c.1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1	DIPA	SESUAI KINERJA YG AKAN DICAPAI	ANGGARAN SESUAI KINERJA YANG AKAN DICAPAI	1
		2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat	2	DIPA	SESUAI KINERJA YG AKAN DICAPAI		
		3	Indeks pengendalian faktor resiko pelabuhan/bandara/PLBDN	3	DIPA	SESUAI KINERJA YG AKAN DICAPAI		
		4	Nilai Kinerja anggaran	4	DIPA	SESUAI KINERJA YG AKAN DICAPAI		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	5	DIPA	SESUAI KINERJA YG AKAN DICAPAI		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	6	DIPA	SESUAI KINERJA YG AKAN DICAPAI		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	7	DIPA	SESUAI KINERJA YG AKAN DICAPAI		
		8	Persentase realisasi anggaran	8	DIPA	SESUAI KINERJA YG AKAN DICAPAI		
						100,00		

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		AKTIVITAS		HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
1c.2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1	Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran	AKTIVITAS Mendukung KINERJA	AKTIVITAS Mendukung KINERJA	1
		2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut , barang dan lingkungan	2	Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor resiko kesehatan pada alat angkut, orang , barang , dan atau lingkungan	AKTIVITAS Mendukung KINERJA		
		3	Indeks pengendalian faktor resiko pelabuhan/bandara/PLBDN	3	terhadap penyakit dan faktor resiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan	AKTIVITAS Mendukung KINERJA		
		4	Nilai Kinerja anggaran	4	penyakit dan faktor resiko kesehatan pada alat angkut, orang , barang, dan atau lingkungan	AKTIVITAS Mendukung KINERJA		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	5	Pelaksanaan pelayanan	AKTIVITAS Mendukung KINERJA		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	6	Pelaksanaan penindakan	AKTIVITAS Mendukung KINERJA		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	7	Pengelolaan data dan informasi dibidang kekarantinaan	AKTIVITAS Mendukung KINERJA		
		8	Persentase realisasi anggaran	8	Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama	AKTIVITAS Mendukung KINERJA		
				9	Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kekarantinaan kesehatan	AKTIVITAS Mendukung KINERJA		

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PERHITUNGAN	HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI	
1c.3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1	0,92	0,99	107,61	DICAPAI/ON THE TRACK	DICAPAI/ON THE TRACK	1	
		2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat	2	100%	100%	100,00	DICAPAI/ON THE TRACK			
		3	Indeks pengendalian faktor resiko pelabuhan/bandara/PLBDN	3	0,97	1,06	109,28	DICAPAI/ON THE TRACK			
		4	Nilai Kinerja anggaran	4	88	94,64	100,00	DICAPAI/ON THE TRACK			
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	5	96	97,39	100,00	DICAPAI/ON THE TRACK			
		6	Kinerja implementasi WBK satker	6	85	94,19	100,00	DICAPAI/ON THE TRACK			
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	7	85%	118,79%	139,75	120,00			DICAPAI/ON THE TRACK
		8	Persentase realisasi anggaran	8	96%	99,35%	107,50	107,50			DICAPAI/ON THE TRACK
		9									
							140,00	120,00			DICAPAI/ON THE TRACK
							107,15				

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	HASIL ANALISA		SIMPULAN	NILAI
1c.4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1	0,92	DIPANTAU BERKALA	DIPANTAU BERKALA	1
		2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat	2	100%	DIPANTAU BERKALA		
		3	Indeks pengendalian faktor resiko pelabuhan/bandara/PLBDN	3	0,97	DIPANTAU BERKALA		
		4	Nilai Kinerja anggaran	4	88	DIPANTAU BERKALA		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	5	96	DIPANTAU BERKALA		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	6	85	DIPANTAU BERKALA		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	7	85%	DIPANTAU BERKALA		
		8	Persentase realisasi anggaran	8	96%	DIPANTAU BERKALA		

KKE SUPLEMEN 2.b

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULA DAN DATA	HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
2b.2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	1	Indeks deteksi faktor risiko di	0,92		DATA KINERJA RELEVAN	1
		2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada	100%	SESUAI DENGAN KAMUS INDIKATOR/DO/FORMULA		
		3	Indeks pengendalian faktor resiko	0,97	SESUAI DENGAN KAMUS INDIKATOR/DO/FORMULA		
		4	Nilai Kinerja anggaran	88	SESUAI DENGAN KAMUS INDIKATOR/DO/FORMULA		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	96	SESUAI DENGAN KAMUS INDIKATOR/DO/FORMULA		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	85	SESUAI DENGAN KAMUS INDIKATOR/DO/FORMULA		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	SESUAI DENGAN KAMUS INDIKATOR/DO/FORMULA		
		8	Persentase realisasi anggaran	96%	SESUAI DENGAN KAMUS INDIKATOR/DO/FORMULA		
						100,00	
NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	HASIL ANALISA	SIMPULAN	NILAI
2b.3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	1	Indeks deteksi faktor risiko di	0,92	0,99	MENDUKUNG CAPAIAN KINERJA	1
		2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada	100%	100%		
		3	Indeks pengendalian faktor resiko	0,97	1,06		
		4	Nilai Kinerja anggaran	88	94,64		
		5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	96	97,39		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	85	94,19		
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	118,79%		
		8	Persentase realisasi anggaran	96%	99,35%		
						100,00	

JANUARI

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

Download Excel

Tampilkan 1 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	001.01.000000	KELOMPOK KEMENTERIAN KESEHATAN RI BALAI PASAR	0,00	97,42	48,71

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Nilai Kinerja Anggaran



FEBRUARI

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

Download Excel

Tampilkan 11 entri

Cari

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	001-01-ALB890	SALAH SATU MAMPUAN KETERANGAN KELAS 1 MUDIRAN	6,68	95,71	91,20

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Nilai Kinerja Anggaran



MARET

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja					
Tampilkan:	10	entri	Cari:		
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	BALAI KEMERIAH	BALAI EKONOMI/HAMBA RESERVASI/KELAS II POLIDARUM	6,68	- 90,73	32,74

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya | Selanjutnya

Nilai Kinerja Anggaran

APRIL

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

Download Excel

Tampilkan 11 entri Cari

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	014.00.40000	BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK KELAS 1 PALANGMANG	14,55	95,71	55,13

Meskipun 1 sampel 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Nilai Kinerja Anggaran



MEI

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Membuat / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	00000000000000000000	BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK	35,80	97,42	66,61

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Nilai Kinerja Anggaran



JUNI

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja						Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja
Tampilkan 20 entri Download Excel						
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	
1	104.05.410094	BALAI CESKANTIRMAN CESKANTER KOTA PALJONGKONG	28,02	98,53	63,28	
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri						Sebelumnya Selanjutnya



Partisipasi Satuan Kerja																
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nov	Des		
1	01000	DALAM PENGANTARAN RESEKSI KELAS II PROBABIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11	11	11	11	11		

Menampilkan 1 sampel 1 dari 2 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Menunjuk kepada:

1. Instruksi Menkes Nomor : 234/MENKES/INS/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 perihal Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.

2. Surat Tugas Inspektur III Kementerian Kesehatan RI Nomor : PS.07.01/G.IV/392/2026 tanggal 08 April 2026 perihal melakukan melakukan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Triwulan II Tahun 2026

Pada hari ini Jumat tanggal 3 (tiga) bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam telah dilakukan monitoring dan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Jenderal pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dengan hasil sebagai berikut:

No	Nomor LHP	Saldo Awal				Hasil Tindak Lanjut Triwulan II 2026				Saldo Akhir	
		Nomor Temuan	Uraian Temuan	Nomor Saran	Uraian saran	Nilai Temuan (Rp)	Dokumen yang Diterima	Nilai Temuan (Rp)	Status	Nilai Temuan (Rp)	
1	PS.01.01/G.IV/263/R/2026 2026-03-06 LAPORAN HASIL AUDIT KEPATUHAN TRANSFORMASI KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG TAHUN 2025	1	TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR SEBESAR RP.2.248.450,00 YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEHADIRAN.	1	KEPALA BKK KELAS I PALEMBANG AGAR MEMPERKETAT PROSES VALIDASI UANG LEMBUR DENGAN MEWAJIBKAN LAMPIRAN LOG ABSENSI YANG TELAH DIVALIDASI OLEH ATASAN LANGSUNG	Rp	- Nota Dinas Dari Kepala BKK Kelas I Palembang Kepada Kasubbag Adum, Ketua Tim Kerja dan Koordinator Wilker Nomor UI.01.02/C.X.7/613/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang Peningkatan Akurasi dan Akuntabilitas Validasi Lembur	Rp	- Selesai	Rp	
		2	TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI YANG MENJALANI CUTI BESAR SEBESAR RP2.691.976,00	1	KEPALA BKK KELAS I PALEMBANG AGAR MELAKUKAN REKONSILIASI DATA CUTI PEGAWAI SECARA RUTIN SEBELUM DAFTAR PEMBAYARAN TUKIN DITERBITKAN UNTUK MENCEGAH TERULANGNYA KEJADIAN SERUPA	Rp	- Nota Dinas NOMOR : KP.05.02/C.X.7.1/749/2026 tanggal 26 Februari 2026 dari Kepala BKK Kelas I Palembang kepada Kasubbag Adum tentang Instruksi Rekonsiliasi Data Cuti Terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja	Rp	- Selesai	Rp	
		3	FREKUENSI MUTASI INTERNAL PEGAWAI TERLALU TINGGI DAN TIDAK MENCERMINKAN PRINSIP EFEKTIVITAS ORGANISASI (EVALUASI POLA MUTASI INTERNAL BERULANG TAHUN 2022 - 2025)	1.1	MENETAPKAN MASA MINIMUM PENUGASAN: MENAMBAH KLAUSUL DALAM POLA MUTASI YANG MENGATUR MASA PENUGASAN MINIMAL (MISAL: 1 ATAU 2 TAHUN) DI SATU LOKASI SEBELUM DAPAT DIUSULKAN MUTASI KEMBALI.	Rp	- Nota Dinas NOMOR: KP.02.03/C.X.7/626/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Pola Mutasi Internaldari Kepala BKK Kelas I Palembang kepada Kasubbag Adum dan Ketua Tim Kerja	Rp	- Selesai	Rp	
				1.2	EVALUASI KOMPREHENSIF: SEBELUM MENERBITKAN SK MUTASI KOLEKTIF, BAGIAN ADUM HARUS MENGECEK RIWAYAT MUTASI PEGAWAI BERSANGKUTAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR GUNA MENGHINDARI MUTASI BERULANG PADA ORANG YANG SAMA.	Rp	- KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG NOMOR HK.02.03/C.X.7/619/2026 TENTANG PEDOMAN MUTASI INTERNAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG Tanggal 13 Februari 2026	Rp	- Selesai	Rp	
				2.1	JUSTIFIKASI TERTULIS: SETIAP USULAN MUTASI YANG DILAKUKAN DI BAWAH MASA PENUGASAN 1 TAHUN WAJIB DISERTAI ALASAN KEDARURATAN OPERASIONAL YANG DISETUJUI KEPALA BALAI	Rp	- KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG NOMOR HK.02.03/C.X.7/619/2026 TENTANG PEDOMAN MUTASI INTERNAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG Tanggal 13 Februari 2026	Rp	- Selesai	Rp	
				2.2	MENGINSTRUKSIKAN KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN PARA KETUA TIM KERJA UNTUK MEMATUHI TIMELINE USULAN MUTASI (H-30) SESUAI SK POLA MUTASI YANG TELAH DITETAPKAN	Rp	- Surat Pemyataan Dari Kasubbag Adum, Para Ketua Tim Kerja terkait timeline usulan mutasi sesuai pola mutasi yang telah ditetapkan (2026-07-01)	Rp	- Selesai	Rp	
				3.1	MEWAJIBKAN LAMPIRAN "DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI" ATAU "PERTIMBANGAN KOMPETENSI" PADA SETIAP NOTA DINAS USULAN MUTASI SEBELUM SK DITERBITKAN.	Rp	- KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG NOMOR HK.02.03/C.X.7/619/2026 TENTANG PEDOMAN MUTASI INTERNAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG Tanggal 13 Februari 2026	Rp	- Selesai	Rp	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nomor LHP	Saldo Awal				Hasil Tindak Lanjut Triwulan II 2026				Saldo Akhir	
		Nomor Temuan	Uraian Temuan	Nomor Saran	Uraian saran	Nilai Temuan (Rp)	Dokumen yang Diterima	Nilai Temuan (Rp)	Status	Nilai Temuan (Rp)	
				4.1	MELAKUKAN EVALUASI BERKALA TERHADAP PEGAWAI YANG DIMUTASI (MISAL 6 BULAN SEKALI) UNTUK MEMASTIKAN BAHWA ROTASI TERSEBUT BENAR-BENAR MEMENUHI KEBUTUHAN ORGANISASI, BUKAN SEKADAR PERPINDAHAN ADMINISTRATIVE	Rp -	KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG NOMOR HK.02.03/C.X.7/619/2026 TENTANG PEDOMAN MUTASI INTERNAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG Tanggal 13 Februari 2026	Rp -	Selesai	Rp -	
				4.2	MELAKUKAN ROTASI TERHADAP PEGAWAI WILKER BANDARA SILAMPARI YANG DI TEMPATKAN LEBIH DARI 3 TAHUN	Rp -	KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG NOMOR: KP.02.03/C.X.7/605/2026 TENTANG MUTASI INTERN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	Rp -	Selesai	Rp -	
	4		TERDAPAT PELAKSANAAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA YANG DILAKUKAN TIDAK SESUAI DENGAN KRO/RO DAN PENJELASAN DO KEGIATAN YANG MENYEBABKAN INEFISIENSI SEBESAR RP10.800.000,00.	1.1	KEPALA BKK KELAS I PALEMBANG AGAR MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PEGAWAI YANG BERTUGAS DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA AGAR LEBIH CERMAT DALAM MENYUSUN PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SEHINGGA TERHINDAR DARI SISA ANGGARAN YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN	Rp -	SURAT EDARAN Nomor : KU.03.01/C.X.7/747/2026 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	Rp -	Selesai	Rp -	
				2.1	MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS KEPADA KASUBAG ADUM DAN PPK TAHUN ANGGARAN 2025 TERKAIT BELANJA BARANG YANG TIDAK SESUAI KRO/RO.	Rp -	SURAT PERINGATAN Nomor : PS.01.01/C.X.7/1422/2026 tanggal 22 April 2026 kepada Kasubbag Adum SURAT PERINGATAN Nomor : KU.03.01/C.X.7.2.1/739/2026 tanggal 23 Februari 2026 kepada Pejabat Pembuat Komitmen	Rp -	Selesai	Rp -	
	5		ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGADAAN BELANJA MODAL DILAKUKAN OLEH PENYEDIA YANG IZIN USAHANYA TIDAK SESUAI DAN BELUM SELURUH PERMINTAAN PENGADAAN DISERTAI DENGAN PERMINTAAN TERTULIS DARI PPK KEPADA PEJABAT PENGADAAN	1.1	MENGINSTRUKSIKAN PPK AGAR MEMBUAT KAK DENGAN PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU TERKAIT BARANG/JASA YANG DILAKUKAN PENGADAAN.	Rp -	Nota Dinas Nomor KU.02.04/C.X.7/620/2026 tanggal 14 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Realisasi Belanja Modal Sesuai Dengan Ketentuan	Rp -	Selesai	Rp -	
				1.2	MENGINSTRUKSIKAN PPK AGAR LEBIH CERMAT DALAM MENYUSUN KAK/ SPESIFIKASI TEKNIS DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.	Rp -	Nota Dinas Nomor KU.02.04/C.X.7/620/2026 tanggal 14 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Realisasi Belanja Modal Sesuai Dengan Ketentuan	Rp -	Selesai	Rp -	

No	Nomor LHP	Saldo Awal				Hasil Tindak Lanjut Triwulan II 2026		Saldo Akhir	
		Nomor Temuan	Uraian Temuan	Nomor Saran	Uraian saran	Nilai Temuan (Rp)	Dokumen yang Diterima	Nilai Temuan (Rp)	Status
				1.3	MENGINSTRUKSIKAN PPK, PEJABAT PENGADAAN, SERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BKK KELAS I PALEMBANG AGAR MEMATUHI PERATURAN PERUNDANGAN SERTA PROSEDUR INTERNAL YANG BERLAKU TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA.	Rp -	Nota Dinas Nomor KU.02.04/C.X.7/620/2026 tanggal 14 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Realisasi Belanja Modal Sesuai Dengan Ketentuan	Rp -	Selesai
				2.1	MENGINSTRUKSIKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PPK AGAR MELAKUKAN EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI/KUALIFIKASI PENYEDIA SEBELUM BERKONTRAK DENGAN PENYEDIA.	Rp -	Nota Dinas Nomor KU.03.01/C.X.7/621/2026 tanggal 14 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp -	Selesai
				3.1	MELAKUKAN KAJI ULANG TERKAIT SOP YANG BERLAKU SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN YANG DIBUTUHKAN, KHUSUSNYA TERKAIT PEMBELIAN BARANG DIBAWAH RP10.000.000,00 SERTA PEMBELIAN BARANG YANG DIBUTUHKAN SEGERA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA	Rp -	SOP Belanja Barang dibawah Rp10.000.000 Nomor OT.02/C.X.7/634/2026 tanggal 14 Februari 2026	Rp -	Selesai
	6		PENERBITAN SERTIFIKASI PERIZINAN KAPAL TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG MEMADAI	1.1	KEPALA BKK KELAS I PALEMBANG AGAR MENGINSTRUKSIKAN KEPADA KETUA TIM KERJA PENGAWASAN ALAT ANGKUT DAN BARANG KAPAL SERTA KEPALA WILAYAH KERJA PELABUHAN/POS PELABUHAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGAWASAN SECARA LEBIH EFEKTIF, KHUSUSNYA DALAM MEMASTIKAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH DOKUMEN PENDUKUNG PEMERIKSAAN SEBELUM PENERBITAN SERTIFIKAT	Rp -	Surat Edaran Nomor KU.04.08/C.X.7/588/2026 TENTANG TERTIB ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	Rp -	Selesai
				2.1	MELAKUKAN PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PADA APLIKASI E-CEK KAPAL MINIMAL DENGAN MELAKSANAKAN PROSEDUR SEBAGAI BERIKUT: A) BERKOORDINASI DENGAN DIREKTORAT SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN (SKK) GUNA MEMPEROLEH AKSES DAN PEMANFAATAN APPLICATION	Rp -	Surat Permohonan Integrasi Aplikasi E-Cekkapal Nomor IR.02.01/C.X.7/611/2026 tanggal 13 Februari 2026 Usulan Pengembangan Aplikasi E-cekkapal nomor SR.02.04/C.X.7.4/609/2026 tanggal 13 Februari 2026	Rp -	Selesai
Total		6		18		Rp -		Rp -	-

Mengetahui,
Kepala BKK Kelas I Palembang

Emmilya Rosa, SKM., MKM
NIP. 197305251997032001

Jakarta, 02-07-2026
Tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI

Achmad Rofik, SKM, MM, CRMP
NIP. 197108312006041002

Dedi Permedi, S.Kom, CHFI
NIP. 197303082009011008

Thudsy Sucy Ira P.
NIP. 197303082008011008

Mochamad Anwarid Ardans Pratama, SKM, MKM, CIAP
NIP. 198809052010121002

Andina Sri Fahmi,
NIP. 199101302015032001

Sadam Chandra Wijaya,
NIP. 199201222015031001

Mutiara Desy Kamariah, S.H
NIP. 199412272025062003

Irwan Seprianus Zega, S.T.
NIP. 199809272025061006

Muhammad Khairi Muflih, S.Ak.
NIP. 200003242025061001

Viviania Salsa Bella, S.A.P.
NIP. 200112202025062006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



INFOGRAFIS REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI

PAGU ANGGARAN

18.332.808.000

PAGU BLOKIR

0

PAGU EFEKTIF

18.332.808.000

REALISASI ANGGARAN

8.419.195.727

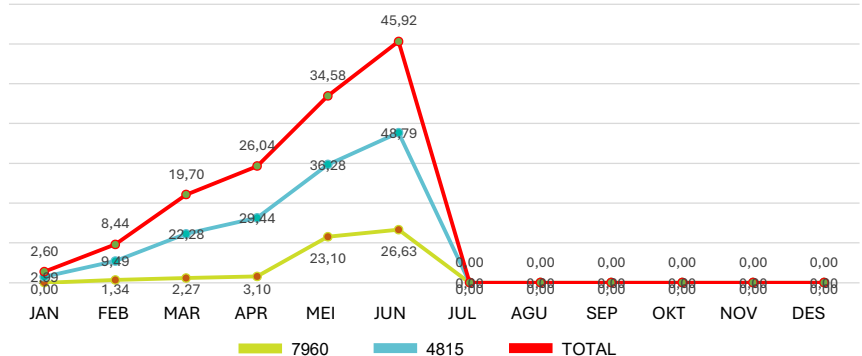
% REALISASI **45,92**

% EFEKTIF **45,92**

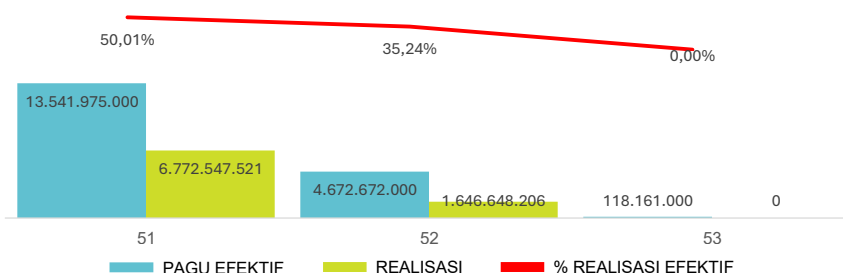
SISA **9.913.612.273**

SISA EFEKTIF **9.913.612.273**

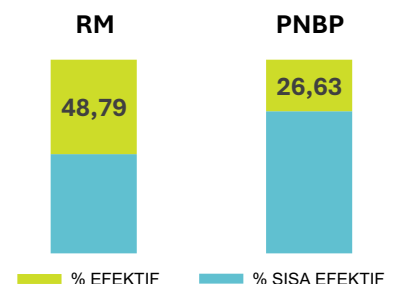
% REALISASI EFEKTIF PER KEGIATAN



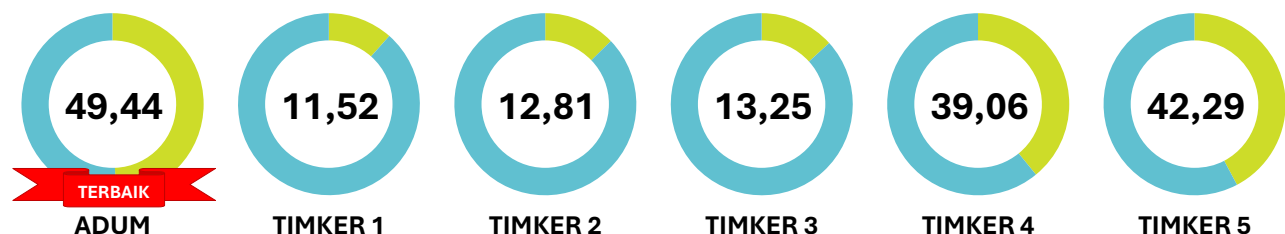
REALISASI EFEKTIF PER JENIS BELANJA



% REALISASI EFEKTIF PER SD



% REALISASI EFEKTIF PER BAGIAN



TARGET PENDAPATAN



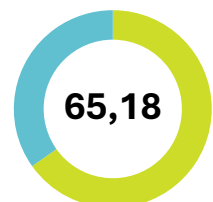
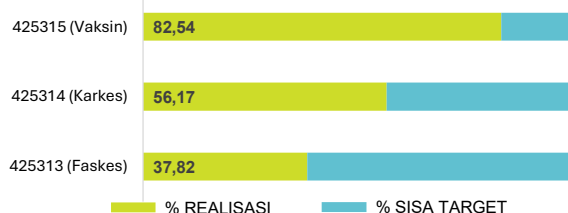
Naik 74,14% dibanding target tahun 2025

2.752.100.000

Rencana target tahun 2027 naik 34,46%



% REALISASI PENDAPATAN PNPB FUNGSIONAL





IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI

A. REALISASI BELANJA PER SATKER

NO.	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
1	416094 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	PAGU	Rp 13.541.975.000	Rp 4.672.672.000	Rp 118.161.000	Rp 18.332.808.000
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		PAGU EFEKTIF	Rp 13.541.975.000	Rp 4.672.672.000	Rp 118.161.000	Rp 18.332.808.000
		REALISASI	Rp 6.772.547.521	Rp 1.646.648.206	Rp -	Rp 8.419.195.727
		%	50,01%	35,24%	0,00%	45,92%
		% EFEKTIF	50,01%	35,24%	0,00%	45,92%
		SISA	Rp 6.769.427.479	Rp 3.026.023.794	Rp 118.161.000	Rp 9.913.612.273
		SISA EFEKTIF	Rp 6.769.427.479	Rp 3.026.023.794	Rp 118.161.000	Rp 9.913.612.273

B. REALISASI BELANJA PER KEGIATAN

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
1	7960 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	PAGU	Rp -	Rp 2.248.635.000	Rp 118.161.000	Rp 2.366.796.000
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 2.248.635.000	Rp 118.161.000	Rp 2.366.796.000
		REALISASI	Rp -	Rp 630.167.185	Rp -	Rp 630.167.185
		%	0,00%	28,02%	0,00%	26,63%
		% EFEKTIF	0,00%	28,02%	0,00%	26,63%
		SISA	Rp -	Rp 1.618.467.815	Rp 118.161.000	Rp 1.736.628.815
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 1.618.467.815	Rp 118.161.000	Rp 1.736.628.815
2	4815 DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM DI DITJEN PENANGGULANGAN PENYAKIT	PAGU	Rp 13.541.975.000	Rp 2.424.037.000	Rp -	Rp 15.966.012.000
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		PAGU EFEKTIF	Rp 13.541.975.000	Rp 2.424.037.000	Rp -	Rp 15.966.012.000
		REALISASI	Rp 6.772.547.521	Rp 1.016.481.021	Rp -	Rp 7.789.028.542
		%	50,01%	41,93%	0,00%	48,79%
		% EFEKTIF	50,01%	41,93%	0,00%	48,79%
		SISA	Rp 6.769.427.479	Rp 1.407.555.979	Rp -	Rp 8.176.983.458
		SISA EFEKTIF	Rp 6.769.427.479	Rp 1.407.555.979	Rp -	Rp 8.176.983.458

C. REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO.	(KODE) SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	Rp 13.541.975.000	Rp 2.424.037.000	Rp -	Rp 15.966.012.000
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		PAGU EFEKTIF	Rp 13.541.975.000	Rp 2.424.037.000	Rp -	Rp 15.966.012.000
		REALISASI	Rp 6.772.547.521	Rp 1.016.481.021	Rp -	Rp 7.789.028.542
		%	50,01%	41,93%	0,00%	48,79%
		% EFEKTIF	50,01%	41,93%	0,00%	48,79%
		SISA	Rp 6.769.427.479	Rp 1.407.555.979	Rp -	Rp 8.176.983.458
		SISA EFEKTIF	Rp 6.769.427.479	Rp 1.407.555.979	Rp -	Rp 8.176.983.458
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	Rp -	Rp 2.248.635.000	Rp 118.161.000	Rp 2.366.796.000
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 2.248.635.000	Rp 118.161.000	Rp 2.366.796.000
		REALISASI	Rp -	Rp 630.167.185	Rp -	Rp 630.167.185
		%	0,00%	28,02%	0,00%	26,63%
		% EFEKTIF	0,00%	28,02%	0,00%	26,63%
		SISA	Rp -	Rp 1.618.467.815	Rp 118.161.000	Rp 1.736.628.815
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 1.618.467.815	Rp 118.161.000	Rp 1.736.628.815

D. REALISASI BELANJA PER SUB BAGIAN DAN TIM KERJA

NO.	SUB BAGIAN DAN TIMKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
1	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	PAGU	Rp 13.541.975.000	Rp 968.279.000	Rp -	Rp 14.510.254.000
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		PAGU EFEKTIF	Rp 13.541.975.000	Rp 968.279.000	Rp -	Rp 14.510.254.000
		REALISASI	Rp 6.772.547.521	Rp 400.906.992	Rp -	Rp 7.173.454.513
		%	50,01%	41,40%	0,00%	49,44%
		% EFEKTIF	50,01%	41,40%	0,00%	49,44%
		SISA	Rp 6.769.427.479	Rp 567.372.008	Rp -	Rp 7.336.799.487
		SISA EFEKTIF	Rp 6.769.427.479	Rp 567.372.008	Rp -	Rp 7.336.799.487

NO.	SUB BAGIAN DAN TIMKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA				TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL		
2	TIMKER 1 TIM KERJA SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	PAGU	Rp -	Rp 211.003.000	Rp -	Rp 211.003.000	
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 211.003.000	Rp -	Rp 211.003.000	
		REALISASI	Rp -	Rp 24.300.482	Rp -	Rp 24.300.482	
		%	0,00%	11,52%	0,00%	11,52%	
		% EFEKTIF	0,00%	11,52%	0,00%	11,52%	
		SISA	Rp -	Rp 186.702.518	Rp -	Rp 186.702.518	
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 186.702.518	Rp -	Rp 186.702.518	
3	TIMKER 2 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG	PAGU	Rp -	Rp 231.135.000	Rp -	Rp 231.135.000	
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 231.135.000	Rp -	Rp 231.135.000	
		REALISASI	Rp -	Rp 29.617.750	Rp -	Rp 29.617.750	
		%	0,00%	12,81%	0,00%	12,81%	
		% EFEKTIF	0,00%	12,81%	0,00%	12,81%	
		SISA	Rp -	Rp 201.517.250	Rp -	Rp 201.517.250	
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 201.517.250	Rp -	Rp 201.517.250	
4	TIMKER 3 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN	PAGU	Rp -	Rp 561.886.000	Rp 118.161.000	Rp 680.047.000	
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 561.886.000	Rp 118.161.000	Rp 680.047.000	
		REALISASI	Rp -	Rp 90.124.915	Rp -	Rp 90.124.915	
		%	0,00%	16,04%	0,00%	13,25%	
		% EFEKTIF	0,00%	16,04%	0,00%	13,25%	
		SISA	Rp -	Rp 471.761.085	Rp 118.161.000	Rp 589.922.085	
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 471.761.085	Rp 118.161.000	Rp 589.922.085	
5	TIMKER 4 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN, DAN SITUASI KHUSUS	PAGU	Rp -	Rp 1.244.611.000	Rp -	Rp 1.244.611.000	
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 1.244.611.000	Rp -	Rp 1.244.611.000	
		REALISASI	Rp -	Rp 486.124.038	Rp -	Rp 486.124.038	
		%	0,00%	39,06%	0,00%	39,06%	
		% EFEKTIF	0,00%	39,06%	0,00%	39,06%	
		SISA	Rp -	Rp 758.486.962	Rp -	Rp 758.486.962	
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 758.486.962	Rp -	Rp 758.486.962	
6	TIMKER 5 TIM KERJA LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS	PAGU	Rp -	Rp 1.455.758.000	Rp -	Rp 1.455.758.000	
		BLOKIR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 1.455.758.000	Rp -	Rp 1.455.758.000	
		REALISASI	Rp -	Rp 615.574.029	Rp -	Rp 615.574.029	
		%	0,00%	42,29%	0,00%	42,29%	
		% EFEKTIF	0,00%	42,29%	0,00%	42,29%	
		SISA	Rp -	Rp 840.183.971	Rp -	Rp 840.183.971	
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 840.183.971	Rp -	Rp 840.183.971	

E. DEVIASI HALAMAN III DIPA PER JENIS BELANJA (PERHITUNGAN KUMULATIF)

NO.	JENIS BELANJA	SUMBER DANA	PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI				
			RENCANA	REALISASI	DEVIASI	%	
1	51 - BELANJA PEGAWAI	(A) RM	Rp 6.921.779.000	Rp 6.772.547.521	Rp 149.231.479	2,16%	
		(D) PNBP	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	
		TOTAL	Rp 6.921.779.000	Rp 6.772.547.521	Rp 149.231.479	2,16%	
2	52 - BELANJA BARANG	(A) RM	Rp 1.075.436.000	Rp 1.016.481.021	Rp 58.954.979	5,48%	
		(D) PNBP	Rp 1.005.616.000	Rp 630.167.185	Rp 375.448.815	37,34%	
		TOTAL	Rp 2.081.052.000	Rp 1.646.648.206	Rp 434.403.794	20,87%	
3	53 - BELANJA MODAL	(A) RM	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	
		(D) PNBP	Rp 94.529.000	Rp -	Rp 94.529.000	100,00%	
		TOTAL	Rp 94.529.000	Rp -	Rp 94.529.000	100,00%	
GRAND TOTAL			Rp 9.097.360.000	Rp 8.419.195.727	Rp 678.164.273	7,45%	

F. DEVIASI HALAMAN III DIPA PER SUB BAGIAN DAN TIMKER (PERHITUNGAN KUMULATIF)

NO.	SUB BAGIAN DAN TIMKER	JENIS BELANJA	PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI			
			RENCANA	REALISASI	DEVIASI	%
1	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	51- BELANJA PEGAWAI	Rp 6.921.779.000	Rp 6.772.547.521	Rp 149.231.479	2,16%
		52- BELANJA BARANG	Rp 455.493.500	Rp 400.906.992	Rp 54.586.508	11,98%
		53- BELANJA MODAL	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL	Rp 7.377.272.500	Rp 7.173.454.513	Rp 203.817.987	2,76%
2	TIMKER 1 TIM KERJA SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	51- BELANJA PEGAWAI	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp 58.328.000	Rp 24.300.482	Rp 34.027.518	58,34%
		53- BELANJA MODAL	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL	Rp 58.328.000	Rp 24.300.482	Rp 34.027.518	58,34%

NO.	SUB BAGIAN DAN TIMKER	JENIS BELANJA	PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI						
			RENCANA	REALISASI	DEVIASI	%			
3	TIMKER 2 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG	51- BELANJA PEGAWAI	Rp	-	Rp	-	0,00%		
		52- BELANJA BARANG	Rp	96.593.000	Rp	29.617.750	Rp	66.975.250	69,34%
		53- BELANJA MODAL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	0,00%
		TOTAL	Rp	96.593.000	Rp	29.617.750	Rp	66.975.250	69,34%
4	TIMKER 3 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN	51- BELANJA PEGAWAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp	254.804.000	Rp	90.124.915	Rp	164.679.085	64,63%
		53- BELANJA MODAL	Rp	94.529.000	Rp	-	Rp	94.529.000	100,00%
		TOTAL	Rp	349.333.000	Rp	90.124.915	Rp	259.208.085	74,20%
5	TIMKER 4 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN, DAN SITUASI KHUSUS	51- BELANJA PEGAWAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp	595.891.000	Rp	486.124.038	Rp	109.766.962	18,42%
		53- BELANJA MODAL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	0,00%
		TOTAL	Rp	595.891.000	Rp	486.124.038	Rp	109.766.962	18,42%
6	TIMKER 5 TIM KERJA LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS	51- BELANJA PEGAWAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp	619.942.500	Rp	615.574.029	Rp	4.368.471	0,70%
		53- BELANJA MODAL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	0,00%
		TOTAL	Rp	619.942.500	Rp	615.574.029	Rp	4.368.471	0,70%
GRAND TOTAL			Rp	9.097.360.000	Rp	8.419.195.727	Rp	678.164.273	7,45%

Catatan :

1. Deviasi dihitung berdasarkan kumulatif kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja;
2. Ambang batas deviasi bulanan sebesar *5% untuk memperoleh nilai maksimal (100);
3. Batas maksimal deviasi tiap bulannya sebesar 100%;
4. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA akan tetap dilakukan paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan untuk memperbaiki nilai Deviasi pada IKPA;

G. REALISASI BELANJA PER KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)

NO.	KRO	PAGU	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI			SISA EFEKTIF
					RUPIAH	%	% EFEKTIF	
1	7960.PEA	Rp 152.934.000	Rp -	Rp 152.934.000	Rp 49.253.142	32,21%	32,21%	Rp 103.680.858
2	7960.QAA	Rp 83.126.000	Rp -	Rp 83.126.000	Rp 2.983.038	3,59%	3,59%	Rp 80.142.962
3	7960.QAH	Rp 1.735.503.000	Rp -	Rp 1.735.503.000	Rp 538.482.701	31,03%	31,03%	Rp 1.197.020.299
4	7960.RAB	Rp 395.233.000	Rp -	Rp 395.233.000	Rp 39.448.304	9,98%	9,98%	Rp 355.784.696
5	4815.EBA	Rp 15.966.012.000	Rp -	Rp 15.966.012.000	Rp 7.789.028.542	48,79%	48,79%	Rp 8.176.983.458
TOTAL		Rp 18.332.808.000	Rp -	Rp 18.332.808.000	Rp 8.419.195.727	45,92%	45,92%	Rp 9.913.612.273

H. REALISASI BELANJA PER RINCIAN OUTPUT (RO)

NO.	KRO - RO	PAGU	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI			SISA EFEKTIF
					RUPIAH	%	% EFEKTIF	
1	7960.PEA.001	Rp 152.934.000	Rp -	Rp 152.934.000	Rp 49.253.142	32,21%	32,21%	Rp 103.680.858
2	7960.QAA.001	Rp 83.126.000	Rp -	Rp 83.126.000	Rp 2.983.038	3,59%	3,59%	Rp 80.142.962
3	7960.QAH.016	Rp 270.862.000	Rp -	Rp 270.862.000	Rp 74.616.789	27,55%	27,55%	Rp 196.245.211
4	7960.QAH.017	Rp 322.121.000	Rp -	Rp 322.121.000	Rp 72.893.000	22,63%	22,63%	Rp 249.228.000
5	7960.QAH.U01	Rp 16.500.000	Rp -	Rp 16.500.000	Rp 6.796.000	41,19%	41,19%	Rp 9.704.000
6	7960.QAH.U02	Rp 61.600.000	Rp -	Rp 61.600.000	Rp 7.920.000	12,86%	12,86%	Rp 53.680.000
7	7960.QAH.U07	Rp 24.520.000	Rp -	Rp 24.520.000	Rp 1.610.500	6,57%	6,57%	Rp 22.909.500
8	7960.QAH.U08	Rp 117.240.000	Rp -	Rp 117.240.000	Rp 12.804.212	10,92%	10,92%	Rp 104.435.788
9	7960.QAH.U09	Rp 7.712.000	Rp -	Rp 7.712.000	Rp 507.600	6,58%	6,58%	Rp 7.204.400
10	7960.QAH.U11	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 2.659.000	14,77%	14,77%	Rp 15.341.000
11	7960.QAH.U12	Rp 27.520.000	Rp -	Rp 27.520.000	Rp 680.000	2,47%	2,47%	Rp 26.840.000
12	7960.QAH.U13	Rp 18.020.000	Rp -	Rp 18.020.000	Rp 2.730.000	15,15%	15,15%	Rp 15.290.000
13	7960.QAH.U14	Rp 15.768.000	Rp -	Rp 15.768.000	Rp 510.000	3,23%	3,23%	Rp 15.258.000
14	7960.QAH.U15	Rp 65.460.000	Rp -	Rp 65.460.000	Rp 11.397.600	17,41%	17,41%	Rp 54.062.400
15	7960.QAH.U19	Rp 66.000.000	Rp -	Rp 66.000.000	Rp -	0,00%	0,00%	Rp 66.000.000
16	7960.QAH.U20	Rp 13.580.000	Rp -	Rp 13.580.000	Rp 1.530.000	11,27%	11,27%	Rp 12.050.000
17	7960.QAH.U21	Rp 6.280.000	Rp -	Rp 6.280.000	Rp -	0,00%	0,00%	Rp 6.280.000
18	7960.QAH.U25	Rp 318.250.000	Rp -	Rp 318.250.000	Rp 309.608.000	97,28%	97,28%	Rp 8.642.000
19	7960.QAH.U28	Rp 290.700.000	Rp -	Rp 290.700.000	Rp -	0,00%	0,00%	Rp 290.700.000
20	7960.QAH.U34	Rp 61.770.000	Rp -	Rp 61.770.000	Rp 30.780.000	49,83%	49,83%	Rp 30.990.000
21	7960.QAH.U38	Rp 13.600.000	Rp -	Rp 13.600.000	Rp 1.440.000	10,59%	10,59%	Rp 12.160.000
22	7960.RAB.001	Rp 395.233.000	Rp -	Rp 395.233.000	Rp 39.448.304	9,98%	9,98%	Rp 355.784.696
23	4815.EBA.994	Rp 15.966.012.000	Rp -	Rp 15.966.012.000	Rp 7.789.028.542	48,79%	48,79%	Rp 8.176.983.458
TOTAL		Rp 18.332.808.000	Rp -	Rp 18.332.808.000	Rp 8.419.195.727	45,92%	45,92%	Rp 9.913.612.273

I. REALISASI BELANJA PER BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

NO.	KODE BAS	PAGU	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI			SISA EFEKTIF
					RUPIAH	%	% EFEKTIF	
1	511111	Rp 4.447.315.000	Rp -	Rp 4.447.315.000	Rp 2.419.437.800	54,40%	54,40%	Rp 2.027.877.200
2	511119	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000	Rp 30.550	40,73%	40,73%	Rp 44.450

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KODE BAS	PAGU	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI			SISA EFEKTIF
					RUPIAH	%	% EFEKTIF	
3	511121	Rp 283.788.000	Rp -	Rp 283.788.000	Rp 153.598.400	54,12%	54,12%	Rp 130.189.600
4	511122	Rp 94.132.000	Rp -	Rp 94.132.000	Rp 50.515.776	53,66%	53,66%	Rp 43.616.224
5	511123	Rp 25.200.000	Rp -	Rp 25.200.000	Rp 14.400.000	57,14%	57,14%	Rp 10.800.000
6	511124	Rp 557.830.000	Rp -	Rp 557.830.000	Rp 318.170.000	57,04%	57,04%	Rp 239.660.000
7	511125	Rp 538.745.000	Rp -	Rp 538.745.000	Rp 344.287.322	63,91%	63,91%	Rp 194.457.678
8	511126	Rp 215.956.000	Rp -	Rp 215.956.000	Rp 120.362.040	55,73%	55,73%	Rp 95.593.960
9	511129	Rp 602.721.000	Rp -	Rp 602.721.000	Rp 257.167.000	42,67%	42,67%	Rp 345.554.000
10	511151	Rp 10.360.000	Rp -	Rp 10.360.000	Rp 5.525.000	53,33%	53,33%	Rp 4.835.000
11	511611	Rp 155.785.000	Rp -	Rp 155.785.000	Rp 86.400.991	55,46%	55,46%	Rp 69.384.009
12	511619	Rp 5.000	Rp -	Rp 5.000	Rp 2.228	44,56%	44,56%	Rp 2.772
13	511621	Rp 11.576.000	Rp -	Rp 11.576.000	Rp 2.287.040	19,76%	19,76%	Rp 9.288.960
14	511622	Rp 1.601.000	Rp -	Rp 1.601.000	Rp 914.816	57,14%	57,14%	Rp 686.184
15	511624	Rp 11.760.000	Rp -	Rp 11.760.000	Rp 6.720.000	57,14%	57,14%	Rp 5.040.000
16	511625	Rp 9.125.000	Rp -	Rp 9.125.000	Rp 3.989.135	43,72%	43,72%	Rp 5.135.865
17	511628	Rp 37.296.000	Rp -	Rp 37.296.000	Rp 14.630.000	39,23%	39,23%	Rp 22.666.000
18	511633	Rp 2.590.000	Rp -	Rp 2.590.000	Rp 1.275.000	49,23%	49,23%	Rp 1.315.000
19	512211	Rp 42.672.000	Rp -	Rp 42.672.000	Rp 7.103.000	16,65%	16,65%	Rp 35.569.000
20	512212	Rp 10.272.000	Rp -	Rp 10.272.000	Rp 8.312.000	80,92%	80,92%	Rp 1.960.000
21	512411	Rp 6.291.855.000	Rp -	Rp 6.291.855.000	Rp 2.862.562.945	45,50%	45,50%	Rp 3.429.292.055
22	512414	Rp 191.316.000	Rp -	Rp 191.316.000	Rp 94.856.478	49,58%	49,58%	Rp 96.459.522
23	521111	Rp 1.736.181.000	Rp -	Rp 1.736.181.000	Rp 692.919.005	39,91%	39,91%	Rp 1.043.261.995
24	521115	Rp 130.200.000	Rp -	Rp 130.200.000	Rp 54.250.000	41,67%	41,67%	Rp 75.950.000
25	521119	Rp 72.926.000	Rp -	Rp 72.926.000	Rp 11.875.000	16,28%	16,28%	Rp 61.051.000
26	521211	Rp 247.428.000	Rp -	Rp 247.428.000	Rp 36.905.346	14,92%	14,92%	Rp 210.522.654
27	521219	Rp 9.534.000	Rp -	Rp 9.534.000	Rp 1.373.500	14,41%	14,41%	Rp 8.160.500
28	521252	Rp 17.220.000	Rp -	Rp 17.220.000	Rp -	0,00%	0,00%	Rp 17.220.000
29	521811	Rp 208.923.000	Rp -	Rp 208.923.000	Rp 34.045.800	16,30%	16,30%	Rp 174.877.200
30	522111	Rp 201.360.000	Rp -	Rp 201.360.000	Rp 99.014.477	49,17%	49,17%	Rp 102.345.523
31	522112	Rp 2.400.000	Rp -	Rp 2.400.000	Rp 1.050.059	43,75%	43,75%	Rp 1.349.941
32	522113	Rp 11.208.000	Rp -	Rp 11.208.000	Rp 8.076.015	72,06%	72,06%	Rp 3.131.985
33	522141	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100,00%	100,00%	Rp -
34	522151	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 14.400.000	Rp 4.050.000	28,13%	28,13%	Rp 10.350.000
35	522191	Rp 159.654.000	Rp -	Rp 159.654.000	Rp 56.667.000	35,49%	35,49%	Rp 102.987.000
36	523111	Rp 129.270.000	Rp -	Rp 129.270.000	Rp 7.722.000	5,97%	5,97%	Rp 121.548.000
37	523121	Rp 131.719.000	Rp -	Rp 131.719.000	Rp 95.260.815	72,32%	72,32%	Rp 36.458.185
38	524111	Rp 407.934.000	Rp -	Rp 407.934.000	Rp 83.969.189	20,58%	20,58%	Rp 323.964.811
39	524113	Rp 1.050.440.000	Rp -	Rp 1.050.440.000	Rp 384.550.000	36,61%	36,61%	Rp 665.890.000
40	524114	Rp 91.875.000	Rp -	Rp 91.875.000	Rp 24.920.000	27,12%	27,12%	Rp 66.955.000
41	532111	Rp 118.161.000	Rp -	Rp 118.161.000	Rp -	0,00%	0,00%	Rp 118.161.000
TOTAL		Rp 18.332.808.000	Rp -	Rp 18.332.808.000	Rp 8.419.195.727	45,92%	45,92%	Rp 9.913.612.273

J. REALISASI BELANJA PER SUB KOMPONEN / SBK

NO.	SUB KOMPONEN / SBK	PAGU	BLOKIR	REALISASI		
				RUPIAH	%	% EFEKTIF
1	Koordinasi LS/LP Timker Di Wilayah Kerja	Rp 10.404.000	Rp -	Rp 1.925.482	18,51%	18,51%
2	Rapat Dalam Kantor Dengan LS/LP Terkait Hygiene Sanitasi	Rp 13.950.000	Rp -	Rp 8.688.960	62,29%	62,29%
3	Koordinasi Penguatan Pengamanan Pangan di Bandara dan Pelabuhan	Rp 13.950.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
4	Rapat Kerja Bandara Sehat di Pos Bandara SMB II Palembang	Rp 22.500.000	Rp -	Rp 6.963.700	30,95%	30,95%
5	Rapat Persiapan Pelabuhan Sehat di Wilker Boombaru Palembang	Rp 22.500.000	Rp -	Rp 4.505.000	20,02%	20,02%
6	Pertemuan Jejaring Kerja Surveilans Epidemiologi LS	Rp 14.230.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
7	Rapat Koordinasi Persiapan, Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Rp 52.700.000	Rp -	Rp 27.170.000	51,56%	51,56%
8	Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Rp 2.700.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
9	Verifikasi RS / Klinik Yang Menerbitkan ICV	Rp 66.464.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
10	Pengawasan RS / Klinik Yang Menerbitkan ICV	Rp 16.662.000	Rp -	Rp 2.983.038	17,90%	17,90%
11	Pemeriksaan Lingkungan Pra/Embarkasi/Debarkasi	Rp 58.638.000	Rp -	Rp 24.080.000	41,07%	41,07%
12	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan (Kualitas Air, Limbah, Makanan, Udara,	Rp 121.300.000	Rp -	Rp 24.479.789	20,18%	20,18%
13	Uji Resistensi Insektisida di Wilayah Kerja	Rp 11.204.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
14	Pengelolaan Limbah Medis	Rp 11.988.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
15	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan Pada Masa	Rp 8.680.000	Rp -	Rp 5.965.000	68,72%	68,72%
16	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan	Rp 59.052.000	Rp -	Rp 20.092.000	34,02%	34,02%
17	Pemeriksaan Deteksi Dini HIV/AIDS di Wilker	Rp 24.702.000	Rp -	Rp 1.360.000	5,51%	5,51%
18	Penanganan Alat Angkut, Orang dan Barang pada Situasi Potensi	Rp 16.800.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
19	Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah/KKM	Rp 23.736.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
20	Pemeriksaan Deteksi Dini TB di Wilker	Rp 51.630.000	Rp -	Rp 3.982.000	7,71%	7,71%
21	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Pelabuhan Tanjung Api - Api	Rp 43.675.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
22	Pelaksanaan Pengawasan Dalam Rangka Situasi Khusus	Rp 102.950.000	Rp -	Rp 48.576.000	47,18%	47,18%
23	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fungsi BKK ke Pusat	Rp 40.016.000	Rp -	Rp 17.082.075	42,69%	42,69%
24	Konsultasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dari Wilker ke Induk	Rp 18.612.000	Rp -	Rp 1.892.925	10,17%	10,17%
25	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	Rp 16.500.000	Rp -	Rp 6.796.000	41,19%	41,19%
26	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	Rp 61.600.000	Rp -	Rp 7.920.000	12,86%	12,86%
27	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	Rp 24.520.000	Rp -	Rp 1.610.500	6,57%	6,57%
28	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES dan Leptospirosis	Rp 117.240.000	Rp -	Rp 12.804.212	10,92%	10,92%
29	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	Rp 7.712.000	Rp -	Rp 507.600	6,58%	6,58%
30	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 2.659.000	14,77%	14,77%
31	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	Rp 27.520.000	Rp -	Rp 680.000	2,47%	2,47%
32	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	Rp 18.020.000	Rp -	Rp 2.730.000	15,15%	15,15%
33	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	Rp 15.768.000	Rp -	Rp 510.000	3,23%	3,23%
34	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	Rp 65.460.000	Rp -	Rp 11.397.600	17,41%	17,41%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SUB KOMPONEN / SBK	PAGU	BLOKIR	REALISASI		
				RUPIAH	%	% EFEKTIF
35	Layanan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit di Pelabuhan	Rp 66.000.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
36	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	Rp 13.580.000	Rp -	Rp 1.530.000	11,27%	11,27%
37	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria Skala Besar	Rp 6.280.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
38	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Dalam Kota	Rp 318.250.000	Rp -	Rp 309.608.000	97,28%	97,28%
39	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Dalam Kota	Rp 290.700.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
40	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala	Rp 61.770.000	Rp -	Rp 30.780.000	49,83%	49,83%
41	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan Jarak Dekat Sumatera, Kalimantan,	Rp 13.600.000	Rp -	Rp 1.440.000	10,59%	10,59%
42	Bahan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	Rp 42.415.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
43	Bahan Laboratorium Kekarantinaan Kesehatan	Rp 79.590.000	Rp -	Rp 24.130.400	30,32%	30,32%
44	Sarana dan Prasarana Kekarantinaan Kesehatan	Rp 51.976.000	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
45	Sarana dan Prasarana Pengendalian Risiko Lingkungan	Rp 202.993.000	Rp -	Rp 416.154	0,21%	0,21%
46	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Pelayanan dan Pendukung Kekarantinaan	Rp 18.259.000	Rp -	Rp 14.901.750	81,61%	81,61%
47	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 13.110.649.000	Rp -	Rp 6.553.159.833	49,98%	49,98%
48	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp 431.326.000	Rp -	Rp 219.387.688	50,86%	50,86%
49	Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Rp 129.270.000	Rp -	Rp 7.722.000	5,97%	5,97%
50	Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp 38.985.000	Rp -	Rp 17.349.200	44,50%	44,50%
51	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/4	Rp 74.475.000	Rp -	Rp 63.009.865	84,61%	84,61%
52	Langganan Daya dan Jasa	Rp 545.349.000	Rp -	Rp 208.575.927	38,25%	38,25%
53	Sewa Gedung Kantor Wilker	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000	100,00%	100,00%
54	Operasional Perkantoran	Rp 159.350.000	Rp -	Rp 75.417.124	47,33%	47,33%
55	Tenaga Outsourcing	Rp 1.296.408.000	Rp -	Rp 540.156.905	41,67%	41,67%
56	Pelaksana Pengelola Satker	Rp 130.200.000	Rp -	Rp 54.250.000	41,67%	41,67%
TOTAL		Rp 18.332.808.000	Rp -	Rp 8.419.195.727	45,92%	45,92%

Catatan :

Jika nilai Blokir sama dengan nilai Pagu maka Persentase Efektif = 100%.

K. REALISASI BELANJA PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU	BLOKIR	REALISASI		
				RUPIAH	%	% EFEKTIF
1	Persentase Pintu Masuk Yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	Rp 2.366.796.000	Rp -	Rp 630.167.185	26,63%	26,63%
2	Nilai SAKIP	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
3	Nilai Kinerja Anggaran	Rp 15.966.012.000	Rp -	Rp 7.789.028.542	48,79%	48,79%
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
5	Persentase Realisasi Anggaran	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
6	Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Alat Angkut Dalam Kategori Merah Kurang Dari 2 x 24 Jam	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
7	Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%
TOTAL		Rp 18.332.808.000	Rp -	Rp 8.419.195.727	45,92%	45,92%

L. REALISASI PENDAPATAN PNBP PER AKUN

NO.	BULAN	KODE AKUN - JENIS PENDAPATAN					TOTAL
		425313	425314	425315	425911	425912	
1	Januari	Rp 14.720.000	Rp 150.855.000	Rp 397.585.000	Rp -	Rp -	Rp 563.160.000
2	Februari	Rp 2.840.000	Rp 138.285.000	Rp 131.715.000	Rp 2.400.826	Rp 10.800.000	Rp 286.040.826
3	Maret	Rp 580.000	Rp 151.285.000	Rp 30.150.000	Rp -	Rp -	Rp 182.015.000
4	April	Rp 240.000	Rp 159.945.000	Rp 12.545.000	Rp -	Rp -	Rp 172.730.000
5	Mei	Rp 1.300.000	Rp 173.855.000	Rp 68.465.000	Rp -	Rp -	Rp 243.620.000
6	Juni	Rp 3.010.000	Rp 186.635.000	Rp 169.725.000	Rp -	Rp -	Rp 359.370.000
7	Juli	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8	Agustus	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
9	September	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10	Oktober	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11	November	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12	Desember	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL PNBP FUNGSIONAL		Rp 22.690.000	Rp 960.860.000	Rp 810.185.000	Rp -	Rp -	Rp 1.793.735.000
TOTAL PNBP UMUM		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.400.826	Rp 10.800.000	Rp 13.200.826
TOTAL							Rp 1.806.935.826

Catatan :

PNBP Fungsional :

- 425313 | Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan

- 425314 | Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan

- 425315 | Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan

PNBP Umum (Non Fungsional) :

- 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

- 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

M. MONITORING RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) PER SUB KOMPONEN / SBK DIBANDING PERSENTASE REALISASI EFEKTIF

NO.	SUB KOMPONEN / SBK	BOBOT	PERSENTASE RPD											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	7960.PEA.001.051.A	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
2	7960.PEA.001.051.B	0,08%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
3	7960.PEA.001.051.C	0,08%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
4	7960.PEA.001.051.D	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
5	7960.PEA.001.051.E	0,12%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
6	7960.PEA.001.051.F	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
7	7960.PEA.001.051.G	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
8	7960.PEA.001.051.H	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	7960.QAA.001.051.A	0,36%	0,00%	0,04%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,03%	0,00%	0,03%	0,04%	0,00%	0,18%
10	7960.QAA.001.051.B	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
11	7960.QAH.016.051.A	0,32%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,09%
12	7960.QAH.016.051.B	0,66%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,01%	0,00%	0,11%	0,00%	0,07%	0,04%	0,01%	0,22%
13	7960.QAH.016.051.C	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
14	7960.QAH.016.051.D	0,07%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
15	7960.QAH.016.051.E	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
16	7960.QAH.016.051.F	0,32%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
17	7960.QAH.017.051.A	0,13%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,08%
18	7960.QAH.017.051.B	0,09%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,05%
19	7960.QAH.017.051.C	0,13%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,06%
20	7960.QAH.017.051.D	0,28%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,14%
21	7960.QAH.017.051.E	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%
22	7960.QAH.017.051.F	0,56%	0,01%	0,02%	0,04%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,34%
23	7960.QAH.017.051.G	0,22%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,03%	0,11%
24	7960.QAH.017.051.H	0,10%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%
25	7960.QAH.U01.051	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
26	7960.QAH.U02.051	0,34%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,15%
27	7960.QAH.U07.051	0,13%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%
28	7960.QAH.U08.051	0,64%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,02%	0,24%
29	7960.QAH.U09.051	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
30	7960.QAH.U11.051	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
31	7960.QAH.U12.051	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
32	7960.QAH.U13.051	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
33	7960.QAH.U14.051	0,09%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
34	7960.QAH.U15.051	0,36%	0,11%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%
35	7960.QAH.U19.051	0,36%	0,01%	0,02%	0,04%	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,15%
36	7960.QAH.U20.051	0,07%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,04%
37	7960.QAH.U21.051	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
38	7960.QAH.U25.051	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
39	7960.QAH.U28.051	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40	7960.QAH.U34.051	0,34%	0,00%	0,02%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,18%
41	7960.QAH.U38.051	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
42	7960.RAB.001.051.A	0,23%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
43	7960.RAB.001.051.B	0,43%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
44	7960.RAB.001.051.C	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
45	7960.RAB.001.051.D	1,11%	0,00%	0,00%	0,39%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%
46	7960.RAB.001.051.E	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%
47	4815.EBA.994.001.A	71,51%	2,45%	4,92%	9,64%	4,92%	4,92%	9,64%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	10,39%
48	4815.EBA.994.001.B	2,35%	0,09%	0,17%	0,32%	0,17%	0,17%	0,32%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,25%
49	4815.EBA.994.002.A	0,71%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
50	4815.EBA.994.002.B	0,21%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
51	4815.EBA.994.002.C	0,41%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
52	4815.EBA.994.002.D	2,97%	0,09%	0,26%	0,26%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%	0,26%	0,39%
53	4815.EBA.994.002.E	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
54	4815.EBA.994.002.F	0,87%	0,00%	0,09%	0,05%	0,06%	0,15%	0,08%	0,15%	0,07%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
55	4815.EBA.994.002.G	7,07%	0,00%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	1,18%
56	4815.EBA.994.002.H	0,71%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,12%
RPD PER BULAN			2,96%	7,11%	12,24%	7,71%	8,31%	11,30%	8,40%	6,46%	6,46%	6,59%	6,48%	15,99%
KUMULATIF RPD			2,96%	10,06%	22,30%	30,01%	38,32%	49,62%	58,02%	64,48%	70,94%	77,52%	84,01%	100,00%
KUMULATIF % REALISASI EFEKTIF			2,60%	8,44%	19,70%	26,04%	34,58%	45,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Disetujui oleh :
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Emmilya Rosa, SKM, MKM
NIP 197305251997032001

Palembang, 06 Juli 2026
Disusun oleh :
Analisis Anggaran Ahli Pertama

Rezi Bertli Dariska, S.Kom
NIP 199103202015031001

MATRIK MONITORING CAPAIAN INDIKATOR
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELASI I PALEMBANG TAHUN 2026

Bulan :Juni

NO	INDIKATOR	PJ	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN			
1	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	TIMKER 1, 2, 3, 4	76%	50%	76%	50%	76%	50%	76%	50%	76%	100%	76%	100%			
2	Nilai SAKIP	ADUM	83.00	88.45	83.00	88.45	83.00	88.45	83.00	89.75	83.00	89.75	83.00	89.75			
3	Nilai Kinerja Anggaran	ADUM	1.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	51.20	20.00	66.61	30.00	63.28			
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	ADUM	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%			
5	Persentase Realisasi Anggaran	ADUM	2.96%	3%	7.11%	8%	12.24%	20%	7.71%	26%	8.31%	34.58%	11.30%	45.92%			
6	Penerbitan dokumen layanan kekarantina Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	TIMKER 2	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%			
7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	ADUM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Palembang, 15 Juli 2026
Kepala BKK Kelas I Palembang



Emmilya Rosa.SKM.,MKM
NIP. 197305251997032001

IKD 33.1.3-

Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Zero Tolerance



Triwulan II Tahun 2026

IKD.33.1.3 -

Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance*

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
- c. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
- f. Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan
- i. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai
- j. Negeri Sipil.

2. Pengertian

Adalah tidak ditemukannya adalah tindakan pelanggaran jabatan di mana seorang pimpinan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan lembaga menerapkan kebijakan **tanpa kompromi** (menghukum atau memecat langsung) terhadap segala bentuk pelanggaran disiplin, kecurangan, gratifikasi, dan korupsi

3. Definisi Operasional

Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenangwenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang

4. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang dikali 100%.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Jumlah Penyalahgunaan Wewenang

B = Jumlah Target Penyalahgunaan Wewenang

% C = Persentase Penyalahgunaan Wewenang

5. Capaian Indikator

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 0 penyalahgunaan atau 100% tidak ada temuan dan tidak dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus karena hasil *undefined* ($\emptyset$). Sedangkan untuk melihat perbandingan target dan realisasi capaian indikator pada Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada data berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK <i>Zero Tolerance</i>	0	0	<i>undefined</i> ($\emptyset$)

Dari data di atas menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* dapat tercapai sesuai target yaitu 0 atau tidak ditemukan penyalahgunaan wewenang.